

**PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) PEREMPUAN, PERTUMBUHAN
EKONOMI, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA (TPAK) PEREMPUAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2018-2023**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

Fuji Rondlotul Haniah

(2105026004)

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG SEMARANG
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Telp. / Fax. (024) 7601291, Ngaliyan - Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdri. Fuji Rondlotul Haniah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fuji Rondlotul Haniah
NIM : 2105026004
Program Studi : S1 Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2025

PEMBIMBING

Pembimbing I

Singgih Maheramtohadhi, M.E.I.

NIP : 198210312015031003

Pembimbing II

Septiana Na'afi, M.S.I.

NIP. 198909242019032018

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Telp. / Fax. (024) 7601291, Ngaliyan - Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fuji Rondlotul Haniah
NIM : 2105026004
Program Studi : S1 Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 24 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude, serta dapat diterima untuk pelengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 26 Juni 2025

Ketua Sidang

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005

Penguji Utama I

Dr. Suhrman, M.A.Ek
NIP. 198412122019031010

Pembimbing I

Singgih Muhtaramtohad, M.E.I
NIP. 198210312015031003



Sekretaris Sidang

Septiana Na'afl, M.S.I
NIP. 198909242019032018

Penguji Utama II

Tri Widvastuti Ningsih, M.Ak
NIP. 198710102019032017

Pembimbing II

Septiana Na'afl, M.S.I
NIP. 198909242019032018

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:6)

“Pendidikan bagi perempuan adalah pondasi untuk membangun peradaban yang bermartabat”

(KH. Hasyim Asy’ari)

“Emansipasi bukan berarti perempuan harus meninggalkan kodratnya, tapi memberi ruang untuk berperan lebih luas dalam kehidupan”

(Yenny Wahid)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat Islam dan kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Dengan Penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi, serta kontribusi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Adapun skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muchron dan Ibu Maroah atas kasih sayang yang tiada henti, ridho yang tak terhingga, serta pengorbanan yang luar biasa dalam membiayai dan mendukung pendidikan penulis. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan demi mewujudkan pendidikan penulis.
2. Kakak-kakak tercinta, Almh. Anis Shofiyatun, Asib Ahmad Ridwan, Nur Azizah, Ari Hidayat, Anik Nur Dianingsih, dan Slamet Khoirul Udin atas segala dukungan moral maupun material, serta ketulusan hati yang menerima penulis sebagai satu-satunya anak yang melanjutkan kuliah tanpa rasa iri.
3. Keponakan-keponakan tersayang, Alif, Fadli, Aisyah, dan Meysha atas senyuman dan canda tawa sebagai pelipur lelah dan penyejuk hati di tengah perjuangan ini.
4. Kedua Dosen Pembimbing, Bapak Singgih Muheramtohad, M.E.I dan Ibu Septiana Na’afi, M.S.I yang dengan sabar dan bijaksana membimbing dan memberi arahan selama proses penyusunan skripsi.
5. Teman seperjuangan, Shinta Arviana, Adya Yuliasuti, dan Aulia Rosyida Kusuma Dewi yang telah telah menemani sejak awal perjalanan di UIN Walisongo serta hadir di setiap kesulitan dengan bantuan yang tulus.
6. Teman-teman terdekat, Fika Sahala, Aizzatul Muna, Minatus Najihah, Ananda Nur Aulia, dan Anita Dyah Purnama Sari atas kebersamaan dan momen berharga selama masa kuliah. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan saling menguatkan di setiap langkah perjalanan ini.
7. Teman-teman kelas EIA 2021, atas kekompakan, kebersamaan, dan kenangan indah selama masa perkuliahan yang tidak akan terlupakan. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga meskipun tidak lagi berada di ruang yang sama.
8. Almater tercinta, UIN Walisongo Semarang, tempat penulis menimba ilmu, berkembang, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Seluruh pihak yang pernah hadir dan membantu penulis selama masa studi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap bantuan yang diberikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuji Rondlotul Haniah

NIM : 2105026004

Program Studi : S1 Ekonomi Islam

Dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023" tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2025

Deklator



Fuji Rondlotul Haniah

NIM. 2105026004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987. Penjelasan terkait pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

1. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	‘	Ha
ء	Hamzah	Y	Apostrof
ي	Ya		Ye

2. Huruf Vokal

Huruf vokal Bahasa Arab sama seperti huruf vokal Bahasa Indonesia karena terdiri dari vokal tunggal, vokal monofrong dan vokal rangkap/diftong. Vokal tunggal atau Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

Vokal rangka Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, translasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أُ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Syaddah (Tasydid)

Dalam penulisan Bahasa Arab, syaddah dilambangkan menggunakan tanda (ّ). Sedangkan, dalam transliterasi pada huruf ada syaddahnya dibaca dengan pengulangan huruf (konsonan ganda).

4. Ta' Marbutah

Terdapat dua macam translasi untuk ta' marbutah. Berikut penjelasan dari macam-macam ta' marbutah:

- Ta' yang apabila dimatikan atau mendapatkan harakat, sukun literasinya ditulis. Contoh: حكمة
- Ta' yang apabila dirangkai dengan kata lain dan dihidupkan atau diberikan kasroh atau dhammah, maka dalam translasinya dibaca t. Contoh: زكاة الفطر

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan alif lam ma'rifah (ال). Kata sandang ditransliterasikan biasanya baik Ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariyah. Kata sandang penulisannya dipisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis (-). Contohnya: القرع

6. Huruf Kapital

Sistem kepenulisan Bahasa Arab tidak menggunakan huruf kapital. Dalam translasinya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan berdasarkan penggunaan huruf kapital menggunakan pedoman dan ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital umumnya digunakan untuk menuliskan nama orang, tempat, bulan ataupun sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Apabila terdapat huruf (Al) sebelum awal kalimat, maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Apabila menjadi judul referensi harus juga ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh: الغزل

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam ruang publik semakin banyak dibicarakan sebagai aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Di Provinsi Jawa Tengah, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan menempati posisi kedua tertinggi di Pulau Jawa. Potensi perempuan dalam pembangunan ekonomi di Jawa Tengah semakin nyata, terlihat dari semakin mengecilnya kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan selama periode 2018–2023. Meskipun demikian, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan belum sepenuhnya sejalan dengan kemajuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Jawa Tengah periode 2018–2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel penelitian mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan teknik sampel jenuh. Data dianalisis menggunakan metode regresi data panel yang diolah dengan EViews 12. Model regresi terbaik yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil uji simultan menunjukkan bahwa RLS perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun, secara parsial, hanya variabel upah minimum yang berpengaruh positif dan signifikan, sementara rata-rata lama sekolah perempuan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Kata kunci: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum.

ABSTRACT

Women's participation in the public sphere has increasingly become a crucial aspect of economic development. In Central Java Province, the female labor force participation rate (LFPR) ranks second highest on the island of Java. The potential of women in Central Java's economic development is becoming more evident, as seen in the narrowing gap of the Human Development Index (HDI) between men and women during the 2018–2023 period. However, the increase in female labor force participation has not fully aligned with this progress. This study aims to analyze the effect of women's average years of schooling, economic growth, and minimum wage on the female labor force participation rate in Central Java Province from 2018 to 2023.

This research uses a quantitative approach with secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS). The sample includes 35 regencies/cities in Central Java Province using a saturated sampling technique. The data were analyzed using panel data regression processed with EViews 12. The best regression model selected was the Random Effect Model (REM). The simultaneous test results show that women's average years of schooling, economic growth, and minimum wage together have a significant effect on the female labor force participation rate. However, partially, only the minimum wage variable has a positive and significant effect, while women's average years of schooling and economic growth have positive but insignificant effects.

Keywords: Female labor force participation rate, women's average years of schooling, economic growth, minimum wage.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023" ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh pimpinan universitas.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A., selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam, dan Ibu Fita Nurotul Faizah, M.E., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dosen Wali penulis, yang memberikan perhatian, motivasi, dan arahan selama masa studi.
5. Bapak Singgih Muheramtohad, M.E.I dan Ibu Septiana Na'afi, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan tenaga kependidikan di UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pelayanan terbaik selama masa studi.
7. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, sebagai penyedia data sekunder utama dalam penelitian ini, yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi lebih baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan wawasan tambahan bagi pembaca, terutama dalam kajian Ekonomi Islam dan isu-isu ketenagakerjaan.

Semarang, 12 Juni 2025

Penulis



Fuji Rondlotul Haniah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	ixx
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.2 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Modal Manusia (<i>Human Capital Theory</i>).....	18
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik Solow-Swan	19
2.1.3 Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja.....	20
2.1.4 Teori Gender	23
2.2 Deskripsi Teoritis Variabel Penelitian.....	26
2.2.1 Tenaga Kerja	26
2.2.1.1 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	27
2.2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	28
2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	29
2.2.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Perspektif Islam	29
2.2.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan	31

2.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Perspektif Islam.....	32
2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	34
2.2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam.....	36
2.2.5 Upah Minimum	37
2.2.5.1 Upah Minimum Perspektif Islam	38
2.3 Penelitian Terdahulu.....	39
2.4 Kerangka Pemikiran.....	44
2.5 Hipotesis.....	45
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis dan Sumber Data	48
3.1.1 Jenis Penelitian	48
3.1.2 Sumber Data	48
3.2 Populasi dan Sampel	48
3.2.1 Populasi	48
3.2.2 Sampel.....	49
3.3 Metode Pengumpulan Data	49
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran	50
3.5 Teknik Analisis Data	51
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	51
3.5.2 Analisis Regresi Data Panel	52
3.5.2.1 Persamaan Regresi Data Panel	52
3.5.2.2 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel	53
3.5.2.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	54
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	54
3.5.3.1 Uji Normalitas.....	54
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas.....	55
3.5.4 Uji Hipotesis.....	55
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
3.5.4.2 Uji t atau Uji Parsial.....	55
3.5.4.3 Uji F atau Uji Simultan	56
BAB IV.....	57
HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	59

4.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	59
4.2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan	61
4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi	62
4.2.4 Upah Minimum	65
4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data	66
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	66
4.3.2 Estimasi Model Regresi Data Panel	68
4.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel	70
4.3.4 Uji Asumsi Klasik	72
4.3.5 Uji Hipotesis	74
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.5 Tinjauan terhadap Partisipasi Kerja Perempuan dalam Perspektif Islam	81
BAB V	85
PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Persentase TPAK Perempuan Di Pulau Jawa Tahun 2018-2023	4
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia Produktif di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023	5
Tabel 1. 3 Perbandingan Persentase TPAK Laki-laki dan TPAK Perempuan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	6
Tabel 1. 4 Fenomena Gap Angka RLS Perempuan dan TPAK Perempuan	8
Tabel 1. 5 Fenomena Gap Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan TPAK Perempuan Tahun 2018-2023 ..	11
Tabel 1. 6 Fenomena Gap Angka Upah Minimum dan TPAK Perempuan Tahun 2018-2023	13
Tabel 1. 7 IPM Menurut Jenis Kelamin dan Gap IPG Provinsi Jawa Tengah	14
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3. 1 Definisi Operasional	51
Tabel 4. 1 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	57
Tabel 4. 2 TPAK Perempuan Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah	59
Tabel 4. 3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	61
Tabel 4. 4 Laju Pertumbuhan ADHK Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	63
Tabel 4. 5 Upah Minimum Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	65
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	67
Tabel 4. 7 Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model	68
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model	69
Tabel 4. 9 Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)	70
Tabel 4. 10 Hasil Uji Chow	71
Tabel 4. 11 Hasil Uji Hausman	71
Tabel 4. 12 Hasil Uji Lagrange Multiplier	72
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas	73
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4. 15 Uji Hipotesis	74
Tabel 4. 16 Hasil Uji R ²	75
Tabel 4. 17 Hasil Uji Simultan	76
Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial	76
Tabel 4. 19 Proporsi Lapangan Kerja Informal Di Provinsi Jawa Tengah	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja	21
Gambar 2. 2 Kurva Asal Penawaran Tenaga Kerja.....	22
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses pertumbuhan ekonomi yang disertai perubahan struktur ekonomi dan pola kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi berkelanjutan sering disertai kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tanah, dan modal. Perubahan struktur ekonomi berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan pengangguran. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang meningkat akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara atau daerah dalam mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat diukur dari jumlah tenaga kerja yang berhasil di serap wilayah tersebut.² Dengan demikian, pemanfaatan tenaga kerja secara optimal merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut International Labour Organization (ILO), tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun.³ Tenaga kerja dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jika dilihat dari jenis aktivitasnya, angkatan kerja mencakup individu yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran), sementara kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari mereka yang masih menempuh pendidikan, menjalankan tugas rumah tangga, atau terlibat dalam aktivitas lain di luar kegiatan ekonomi.⁴

Tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan memiliki peran yang penting dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, dan mendorong keberlanjutan ekonomi. Faktor utama yang menggerakkan serta mengatur laju perubahan daya saing ekonomi meliputi ketersediaan tenaga kerja, kondisi infrastruktur, dan efektivitas tata kelola pemerintah.⁵ Peran dan

¹ Fitri Amalia, et al. *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 87.

² Tri Wahyuningsih, "Sektor Pertanian Dan Perannya Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Buru", *Media Trend*, 10.2 (2015), h. 129.

³ Maulida Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Gema Keadilan*, Vol. 3, No (2016), h. 68.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Profil Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Hasil Sakernas Agustus 2023* (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024), h.17.

⁵ Ika Ayuningtyas dan Muhammad Suryanata, "Pengelompokan Provinsi Di Indonesia Menurut Indikator Pasar Tenaga Kerja", *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022.1 (2022), h. 430.

kedudukan perempuan memiliki dampak besar di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Perkembangan zaman yang semakin terbuka memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi dan menunjukkan bahwa perempuan mampu berperan aktif di ruang domestik maupun publik.⁶

Keterlibatan perempuan di ruang publik dewasa ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan seiring berkembangnya fenomena "*independent woman*". Dikutip dari *kompasiana.com*, *independent woman* menurut Susan Walsh seorang pakar dalam bidang hubungan dan gender merupakan perempuan yang mampu merencanakan, mengelola, dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri yang meliputi kemandirian finansial, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri terkait hubungan dan karir, serta memiliki kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi.⁷ Stigma masyarakat dalam memandang fenomena *independent woman* berbeda-beda baik dari sisi positif maupun sisi negatif.⁸ Wanita mandiri menjadi simbol perubahan yang mematahkan stereotip tradisional yang menganggap wanita hanya berperan dalam ranah domestik. Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka, mereka mampu mendorong lingkungan sekitarnya untuk lebih menghargai kesetaraan. Dengan demikian, fenomena wanita mandiri tidak hanya memperkuat posisi mereka sendiri, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih besar menuju kesetaraan gender.⁹

Islam mengakui bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja. Islam dan negara sama-sama memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi perempuan pekerja.¹⁰ Isu-isu gender dalam perspektif Islam merupakan topik yang kompleks dan kerap menjadi perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Meski terdapat perbedaan biologis dan peran sosial, Islam menekankan keadilan dan keseimbangan, bukan diskriminasi. Al-Qur'an secara normatif mengakui kesetaraan manusia tanpa membedakan jenis kelamin, tetapi dalam konteks sosial, perempuan masih sering terpinggirkan dari ruang publik dan diposisikan lebih rendah.¹¹ Salah satu isu utama adalah pemahaman yang bias terhadap kesetaraan gender, di mana perempuan

⁶ Muhamad Rahman Bayumi, et al, "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 2.2 (2022), h. 125.

⁷ M. Fitra Rachmandani, "Peyorasi Istilah Independent Woman", *kompasiana.com*, 24 September 2023 <<https://www.kompasiana.com/fitrarch/6510228008a8b50fd81fb7f2/peyorasi-istilah-independent-woman>>, diakses 15 Januari 2024..

⁸ Klarissa Senjaya, "Stigma Independent Woman Dalam Kesetaraan Gender", *Kompasiana.Com*, 24 January 2024 <<https://www.kompasiana.com/klarissasenjaya/65b09ef7de948f6d6a30d8d2/stigma-independent-women-dalam-kesetaraan-gender>>, diakses 15 Januari 2025.

⁹ Bayumi, Jaya, and Shalihah.

¹⁰ Isna Rahmah Solihatin, "Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga", *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12.2 (2017), h. 46-47.

¹¹ Aep Saepul Anwar and Imam Sofi'i, "Konsep Dan Isu Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Paris Langkis*, 5.1 (2024), h. 151.

masih sering ditempatkan dalam posisi subordinat akibat interpretasi agama yang bias gender. Padahal, Islam secara prinsip menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal martabat dan tanggung jawab di hadapan Allah. Isu lainnya adalah keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, meskipun Islam mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap Muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Selain itu, partisipasi perempuan di ruang publik juga masih dibatasi oleh pandangan budaya patriarki, padahal sejarah Islam mencatat perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid memiliki peran penting dalam ekonomi dan dakwah. Peran perempuan dalam keluarga pun sering dipahami secara hierarkis, padahal dalam Islam peran tersebut bersifat saling melengkapi, bukan untuk mendominasi.¹²

Konsep *mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir merupakan pendekatan tafsir dan fiqh yang menekankan prinsip kesalingan (*reciprocity*) antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sosial, keluarga, maupun keagamaan. Dalam perspektif *mubadalah*, semua ayat, hadis, dan hukum Islam yang membicarakan hak dan kewajiban laki-laki juga berlaku bagi perempuan, kecuali jika ada dalil eksplisit yang menunjukkan pengecualian. Pendekatan ini hadir sebagai respon atas penafsiran fiqh klasik yang kerap menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan domestik. Melalui *mubadalah*, Faqihuddin menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif di ruang publik, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, sebagaimana halnya laki-laki. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja atau tampil di ranah publik, selama tetap menjaga nilai-nilai moralitas dan etika Islam. Justru, pelibatan perempuan di ruang publik adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, apalagi jika kontribusinya membawa maslahat yang luas. Dalam konteks ini, *mubadalah* bukan hanya metodologi tafsir, tetapi juga menjadi landasan moral untuk mendorong transformasi sosial yang adil gender, di mana perempuan diakui sebagai subjek yang utuh, merdeka, dan berdaya.¹³

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana perempuan terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, sekaligus mencerminkan potensi pasokan tenaga kerja perempuan di suatu daerah.¹⁴ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), TPAK perempuan dihitung sebagai persentase antara jumlah angkatan kerja perempuan dan total penduduk berusia 15 tahun ke atas. Berikut ini disajikan data persentase TPAK perempuan di Pulau Jawa untuk periode 2018–2023.

¹² Fatmawati, "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam", *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9.2 (2024), h. 91–93.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

¹⁴ Wulan Kurniasari, et al, "Dinamika Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: Faktor Kunci Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 7.1 (2024), h. 38.

Tabel 1. 1 Perbandingan Persentase TPAK Perempuan Di Pulau Jawa Tahun 2018-2023

No	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	DKI Jakarta	47,86	47,62	47,47	47,34	46,62	50,12	47,84
2	Jawa Barat	42,25	46,33	46,79	47,88	48,01	47,98	46,54
3	Jawa Tengah	56,43	55,35	57,54	57,58	58,31	58,92	57,36
4	DI Yogyakarta	64,03	63,95	64,33	64,59	63,38	64,75	64,17
5	Jawa Timur	55,31	55,07	56,56	56,11	57,28	59,46	56,63
6	Banten	44,30	45,21	46,62	46,84	47,17	46,16	46,04

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Merujuk pada data persentase TPAK perempuan di Pulau Jawa periode 2018-2023 yang ada di Tabel 1.1, rata-rata TPAK perempuan yang paling besar terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan rata-rata persentase TPAK perempuan sebesar 64,17%. Selanjutnya, urutan kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata persentase TPAK perempuan sebesar 57,36% dan disusul oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 56,63% yang menempati urutan ketiga. Kemudian urutan keempat ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 47,84% dan disusul Provinsi Jawa barat yang menempati urutan kelima sebesar 46,54%. Terakhir, terdapat Provinsi Banten yang menempati urutan terakhir atau keenam dengan rata-rata persentase TPAK perempuan terendah di Pulau Jawa periode 2018-2023 yaitu sebesar 46,04%.

Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua dalam rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Pulau Jawa selama periode 2018 hingga 2023 menunjukkan kontribusi signifikan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Meskipun DI Yogyakarta memiliki TPAK perempuan lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah, secara absolut jumlah perempuan yang bekerja di Jawa Tengah lebih tinggi daripada DI Yogyakarta. Perbedaan tersebut terjadi karena populasi perempuan usia produktif dan yang tergolong dalam angkatan kerja di Jawa Tengah lebih besar dibandingkan di DI Yogyakarta. Contohnya pada tahun 2023, berdasarkan data dari bps.go.id jumlah angkatan kerja perempuan di Jawa Tengah yaitu sebesar 8.655.684 jiwa, sedangkan DIY sebesar 988.337 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah sebesar 14.690.815 jiwa, sedangkan DIY sebesar 1.526.449 jiwa. Dalam konteks penawaran tenaga kerja, jumlah penduduk yang terus meningkat terutama di usia produktif akan meningkatkan pasokan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya mengindikasikan adanya peningkatan permintaan terhadap lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup yang pada akhirnya membentuk pasar tenaga kerja.¹⁵ Berikut rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif di Provinsi Jawa Tengah.

¹⁵ Yulia Putri and Mike Triani, "Analisis Pasar Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap Tingkat Upah Di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1.2 (2019), h. 488.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia Produktif di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Laki-laki Usia Produktif Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	225.430	1.423.617	1.458.230	1.447.267	1.441.110	1.443.572
20-24	301.800	1.413.120	1.486.859	1.466.458	1.449.093	1.467.520
25-29	162.323	1.266.426	1.476.305	1.470.891	1.466.452	1.486.756
30-34	199.958	1.146.481	1.458.026	1.458.059	1.458.710	1.470.267
35-39	299.668	1.170.649	1.407.405	1.415.339	1.425.985	1.438.170
40-44	225.147	1.194.579	1.355.960	1.366.351	1.376.901	1.385.611
45-49	249.429	1.156.235	1.254.616	1.270.917	1.290.544	1.309.884
50-54	194.045	1.091.603	1.144.787	1.162.885	1.180.963	1.195.340
55-59	188.460	974.369	985.148	1.008.711	1.034.513	1.056.358
60-64	199.746	800.196	808.672	831.996	856.018	875.083
Total	2.246.006	11.637.275	12.836.008	12.898.874	12.980.289	13.128.561
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Perempuan Usia Produktif Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	614.535	1.353.136	1.373.465	1.359.213	1.350.244	1.357.183
20-24	766.543	1.337.940	1.407.219	1.386.707	1.368.657	1.386.658
25-29	464.658	1.239.465	1.410.790	1.403.810	1.397.819	1.408.663
30-34	520.604	1.183.646	1.409.788	1.408.160	1.407.175	1.408.663
35-39	860.974	1.247.463	1.382.668	1.383.813	1.388.929	1.396.349
40-44	648.250	1.250.732	1.363.713	1.367.928	1.371.159	1.372.578
45-49	787.865	1.219.145	1.278.932	1.292.679	1.309.824	1.326.710
50-54	613.127	1.174.036	1.184.283	1.201.287	1.217.441	1.231.572
55-59	631.814	1.045.324	1.024.609	1.052.051	1.080.795	1.108.154
60-64	598.619	827.948	835.196	865.034	896.109	924.970
Total	6.506.989	11.878.835	12.670.663	12.720.682	12.788.152	12.921.500

Sumber: jateng.bps.go.id

Berdasarkan data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif Provinsi Jawa Tengah yang ada pada Tabel 1.2, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki usia produktif cenderung lebih tinggi hampir setiap tahunnya daripada jumlah penduduk perempuan usia produktif. Namun, jika dilihat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif hampir selalu sama bahkan di beberapa tahun dan kelompok usia jumlah penduduk

perempuan usia produktif lebih tinggi. Di tahun 2018 dan 2019, jumlah penduduk perempuan usia produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki usia produktif. Walaupun di tahun 2020-2023 lebih banyak jumlah penduduk laki-laki usia produktif, tetapi selisihnya hanya tipis. Pada tahun 2020, selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif adalah 165.345 jiwa atau sekitar 1,30%. Di tahun 2021, selisihnya adalah 178.192 jiwa setara dengan 1,40%. Selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif di tahun 2022 sebesar 192.137 jiwa atau sekitar 1,50%, sedangkan di tahun 2023 selisihnya sebesar 207.061 jiwa setara dengan 1,60%. Meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif selisih perbandingannya tidak begitu besar, pada kenyataannya TPAK perempuan selalu jauh di bawah TPAK laki-laki. Berikut perbandingan TPAK laki-laki dan TPAK perempuan di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.

Tabel 1. 3 Perbandingan Persentase TPAK Laki-laki dan TPAK Perempuan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Tahun	TPAK Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Persen)	
		Laki-laki	Perempuan
1	2018	81,59	56,43
2	2019	82,78	55,35
3	2020	81,68	57,54
4	2021	81,94	57,58
5	2022	83,74	58,31
6	2023	84,52	58,92

Sumber: jateng.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1.3, diketahui bahwa TPAK laki-laki jauh lebih tinggi daripada TPAK perempuan dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten diatas 81% selama periode 2018-2023, meskipun ditahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,10% dari 82,78% pada tahun sebelumnya menjadi 81,68% di tahun 2020, sedangkan TPAK perempuan berada pada level yang lebih rendah daripada TPAK laki-laki dan pertumbuhannya terbilang lambat dan cenderung stagnan. Pada tahun 2019 TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 1,46%, sedangkan TPAK perempuan justru menurun sebesar 1,91%. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,33%, sedangkan TPAK perempuan meningkat sebesar 3,96%. TPAK laki-laki mengalami kenaikan tipis sebesar 0,32% di tahun 2021, sedangkan TPAK perempuan pada tahun yang sama cenderung stagnan dengan kenaikan hanya 0,07%. Pada tahun 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan signifikan sebesar 2,20%, sedangkan TPAK perempuan naik sebesar 1,27%. Terakhir, pada tahun 2023 TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,93% dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,05%.

Pada Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 gap antara TPAK laki-laki dan perempuan sebesar 25,16% dan di tahun 2019 lebih besar yaitu 27,43%. Pada tahun 2020 kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu

menjadi 24,14%. Kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan lagi di tahun 2021 yaitu menjadi 24,36% dan di tahun 2022 kesenjangan masih mengalami kenaikan menjadi 25,43%. Terakhir, pada tahun 2023 kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan masih menunjukkan kenaikan yaitu menjadi 25,60%. Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan setiap tahunnya cenderung semakin melebar ditunjukkan dengan persentase gap yang mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pasar tenaga kerja laki-laki dan perempuan secara berbeda.

Rendahnya TPAK perempuan jika dikaitkan dengan isu gender dikarenakan masyarakat memposisikan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga menjadikan kesempatan perempuan untuk bekerja lebih kecil. Konsep dualisme budaya telah melekat pada perempuan, dimana perempuan dituntut untuk mampu bekerja di ruang domestik yaitu tugasnya sebagai seorang istri, ibu, serta mengurus pekerjaan rumah tangga dan di ruang publik yaitu perannya sebagaimana pekerjaannya. Perempuan sering dihadapkan pada keadaan “*double standar*” yang seakan-akan memaksa perempuan untuk memilih perannya di ruang domestik atau di ruang publik, padahal hakikatnya perempuan mampu mengambil multiperan baik di ruang domestik maupun ruang publik tanpa adanya diskriminasi.¹⁶ Peningkatan upaya untuk melibatkan perempuan di berbagai sektor akan berkontribusi dalam mengubah pola pikir dan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan di era global.¹⁷ Ananta (1990) menyatakan bahwa meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, tumbuhnya kesadaran akan peran strategis perempuan dalam pembangunan, serta dorongan internal perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh penghasilan secara mandiri, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan meluasnya kesempatan kerja untuk tenaga kerja.¹⁸

Pendidikan termasuk ke dalam faktor internal yang memengaruhi kecenderungan perempuan dalam berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan rasa percaya diri yang pada akhirnya dapat membuka peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas dan tinggi.¹⁹ Dalam *Human Capital Theory*, tingginya

¹⁶ Muhamad Rahman Bayumi, et al, "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 2.2 (2022), h. 125.

¹⁷ Shindita Apriliani Nirmalasari dan Nurchalisa Putri, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tenggaran Kabupaten Semarang)", *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), h. 51.

¹⁸ Rona Sandila, et al, "Analisis Kesetaraan Gender Provinsi Papua Tahun 2019", *Analisis Sumberdaya Manusia Dan Ekonomi-ASDME Yogyakarta*, October, 2020.

¹⁹ Fitri Amalia, et al. *Ekonomi ...*, h. 48.

pendidikan berdampak pada kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, peningkatan produktivitas, serta peningkatan pendapatan. *Human Capital Theory* memandang pendidikan dan proses pembelajaran sebagai investasi dalam sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan produktivitas, mempersiapkan tenaga kerja, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan global.²⁰

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi salah satu indikator yang umum digunakan untuk melihat tingkat pendidikan suatu daerah. Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), RLS menunjukkan jumlah rata-rata tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan.²¹ Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan kemajuan pembangunan sumber daya manusia yang berpotensi meningkatkan kinerja individu sekaligus memperbesar peluang bersaing di dunia kerja. Berikut perbandingan angka RLS perempuan dan TPAK perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.

Tabel 1. 4 Fenomena Gap Angka RLS Perempuan dan TPAK Perempuan

Tahun	RLS Perempuan (tahun)	TPAK Perempuan (%)
2018	6,87	56,43
2019	7,03	55,35
2020	7,24	57,54
2021	7,34	57,58
2022	7,55	58,31
2023	7,62	58,92

Sumber: jateng.bps.go.id

Tabel 1.4 memberikan gambaran fenomena gap yang terjadi antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. Data menunjukkan bahwa pada periode 2018-2019 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan mengalami peningkatan dari angka 6,87 tahun menjadi 7,03 tahun, akan tetapi pada periode yang sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan justru mengalami penurunan dari 56,43% turun menjadi 55,35%. RLS Perempuan di Provinsi Jawa Tengah termasuk rendah dan belum sesuai dengan program pemerintah yang mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Pada Tabel 1.3, diketahui bahwa RLS Perempuan di Provinsi Jawa Tengah cukup rendah dengan rata-rata 7,28 tahun selama periode 2018-2023. Rendahnya partisipasi kerja perempuan dengan pendidikan rendah lebih disebabkan oleh kurangnya kemampuan bersaing dengan mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi untuk masuk ke sektor modern. Sementara itu, perempuan berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi di pasar kerja, terutama pada jenis pekerjaan di sektor modern yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi.²² Hal tersebut sesuai dengan

²⁰ Hidayati, et al, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), h. 31.

²¹ Dinas Perempuan dan Anak, *Profil Gender Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*, 2023.

²² Devanto Shasta Pratomo, "Pendidikan Dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-U", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10.02 (2017), h. 2.

kondisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan Provinsi Jawa Tengah yang rendah sehingga TPAK perempuan Provinsi Jawa Tengah juga rendah.

Adapun penelitian terkait Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang telah dilakukan oleh Rieke Novita dengan judul “Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di 6 Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022” dengan metode analisis regresi data panel menemukan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Hal tersebut diyakini karena lamanya pendidikan yang ditempuh perempuan membuat semakin besar peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja karena mempunyai kemampuan dan keterampilan lebih baik.²³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paulus Uppun, dkk dengan judul “Kajian Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Daerah Pusat Perekonomian Kawasan Tengah Indonesia” dengan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan secara signifikan tidak mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut karena perempuan lebih banyak berpartisipasi pada sektor informal karena pendidikan tidak menjadi syarat utama karena sektor ini tidak menuntut keterampilan yang tinggi yang berbeda dengan sektor formal yang melihat latar belakang pendidikan individu merupakan hal yang penting untuk memenuhi syarat.²⁴

Faktor kedua yang mempengaruhi TPAK perempuan yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan bertambahnya *output* barang dan jasa di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk.²⁵ Menurut Samuelson dan Nordhaus (1992) dalam Septiawan dan Wijaya, pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator untuk menilai terciptanya lapangan kerja baru. Jika diasumsikan bahwa kenaikan PDRB terjadi akibat peningkatan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah, maka peningkatan *output* tersebut akan mendorong permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, hal ini akan menyebabkan bertambahnya penawaran tenaga kerja.²⁶

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang sering disebut sebagai PDRB Riil biasanya ditunjukkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, dimana

²³ Rieke Novita, "Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di 6 Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

²⁴ Paulus Uppun, et al, "Kajian Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Daerah Pusat Perekonomian Kawasan Tengah Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Dinamika Sosial*, 3.1 (2024), h. 79–93.

²⁵ Mulyaningsih, *Pembangunan Ekonomi* (Bandung: CV Kimfa Mandiri, 2019), h. 10.

²⁶ Anggi Septiawan and Siti Haiyinah Wijaya, "Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia Tahun 2015-2019 Menggunakan Model Regresi Data Panel", in *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021, MMXX, I, 452, doi:10.34123/semnasoffstat.v2020i1.387.

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga tetap dari tahun dasar sebagai patokan perhitungan.²⁷ PDRB ADHK yang mengalami peningkatan umumnya mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi sehingga menciptakan lebih banyak kesempatan kerja yang membuat penyerapan tenaga kerja cenderung meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Great Ali, dkk. menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Peningkatan nilai PDRB mencerminkan bertambahnya nilai tambah dari output atau penjualan di seluruh sektor ekonomi dalam suatu daerah. Ketika volume produksi atau penjualan perusahaan meningkat, kebutuhan akan tambahan tenaga kerja juga ikut naik guna memperluas kapasitas produksi dalam rangka memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.²⁸

Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).²⁹ Untuk memahami bagaimana ekonomi suatu wilayah berkembang dari waktu ke waktu, digunakan laju pertumbuhan PDRB ADHK, yang menunjukkan persentase perubahan PDRB ADHK dari tahun sebelumnya. Indikator ini lebih tepat dalam menggambarkan dinamika ekonomi karena memperlihatkan apakah ekonomi mengalami pertumbuhan atau justru mengalami perlambatan. Dalam analisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi umumnya diproksikan dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK karena bukan hanya ukuran ekonomi yang penting, tetapi juga seberapa cepat ekonomi tersebut bertumbuh. Jika laju pertumbuhan PDRB ADHK positif, berarti ekonomi mengalami ekspansi, sedangkan jika negatif menandakan adanya kontraksi ekonomi. Dengan demikian, PDRB ADHK menjadi dasar dalam penghitungan, laju pertumbuhan PDRB ADHK menggambarkan dinamika perubahan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi direpresentasikan melalui laju pertumbuhan tersebut. Berikut perbandingan angka laju pertumbuhan PDRB ADHK dan TPAK perempuan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.

²⁷ Dwi Prasetyani dan Sumardi, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*, (Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press, 2020), h. 8.

²⁸ Great Ali, et al, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20.1 (2020), h. 10.

²⁹ Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012", *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8.1 (2015), h. 89.

Tabel 1. 5 Fenomena Gap Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan TPAK Perempuan Tahun 2018-2023

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	TPAK Perempuan (%)
2018	5,30	56,43
2019	5,36	55,35
2020	-2,65	57,54
2021	3,33	57,58
2022	5,31	58,31
2023	4,97	58,92

Sumber: bps.go.id

Tabel 1.5 memberikan gambaran fenomena gap yang terjadi antara laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. Data menunjukkan bahwa pada periode 2018-2019, TPAK perempuan mengalami penurunan dari 56,43% menjadi 55,35%, sementara pada periode yang sama laju pertumbuhan PDRB ADHK justru mengalami peningkatan dari 5,30% menjadi 5,36%. Fenomena gap antara PDRB ADHK dan TPAK perempuan juga terlihat pada periode 2019-2020. Pada periode 2019-2020, TPAK perempuan mengalami peningkatan dari 55,35% menjadi 57,54%, tetapi laju pertumbuhan PDRB ADHK mengalami kontraksi signifikan dari 5,36% menjadi -2,65%. Penurunan tajam ini diduga akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan di sektor utama seperti industri manufaktur, perdagangan, serta penurunan konsumsi rumah tangga. Adanya Covid 19 berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.³⁰

Adapun penelitian terkait pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang telah dilakukan oleh Siti Hardiyanti Hatta dengan judul “Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Kota Makassar” dengan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita di Kota Makassar. Hal tersebut karena pertumbuhan ekonomi yang menciptakan peningkatan kesempatan kerja sehingga angkatan kerja juga ikut meningkat dan gilirannya TPAK wanita juga meningkat.³¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Kurniasari, dkk dengan judul “Dinamika Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: Faktor Kunci Di Indonesia” dengan metode analisis regresi linier multivariabel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap TPAK perempuan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan

³⁰ Septiana Na’afi, ‘Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19’, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2020), p. 242.

³¹ Siti Hardiyanti Hatta, "Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Kota Makassar" (UIN Alauddin Makassar, 2017), h.78.

pertumbuhan ekonomi mendorong spesialisasi yang mengurangi permintaan tenaga kerja perempuan.³²

Faktor ketiga yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yaitu upah. Sistem pengupahan di Indonesia telah diatur dengan jelas, sehingga terdapat ketentuan mengenai upah minimum. Penetapan upah minimum dalam sistem pengupahan nasional merupakan bagian penting dari perlindungan tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.³³ Ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum menyebutkan bahwa “Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman”.³⁴ Pada tingkat regional, kebijakan pengupahan dibedakan menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMP berperan sebagai standar dasar dalam penetapan UMK, di mana UMK tidak diperbolehkan lebih rendah dari UMP. Oleh karena itu, kenaikan UMP secara tidak langsung turut memengaruhi peningkatan UMK di wilayah terkait.

Upah memiliki peran strategis bagi berbagai pihak, yaitu pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Bagi pekerja, upah berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Bagi perusahaan, upah merupakan bagian dari biaya produksi yang dapat mempengaruhi keuntungan, sehingga perusahaan cenderung menekan biaya upah seminimal mungkin untuk memaksimalkan laba. Sementara itu, bagi pemerintah, upah berperan sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Perubahan tingkat upah berpengaruh terhadap banyaknya tenaga kerja yang ditawarkan. Ketika upah mengalami kenaikan, maka jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja juga cenderung meningkat, dan sebaliknya. Hubungan ini tercermin dalam kurva penawaran tenaga kerja yang memiliki kemiringan positif, yang menunjukkan bahwa kenaikan pada sumbu horizontal (upah) sejalan dengan peningkatan pada sumbu vertikal (jumlah tenaga kerja). Peningkatan upah akan mendorong peningkatan jam kerja jika efek substitusi (*substitution effect*) lebih dominan dibandingkan efek pendapatan (*income effect*). Oleh karena itu, semakin tinggi upah yang

³² Kurniasari, Gunarto, and Yuliawan.

³³ Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5.1 (2014), h. 19.

³⁴ KEMNAKER, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, 2008, h. 3

³⁵ Dirla Pratama Atiyatna, Nurlina T. Muhyiddin, and Bambang Bemby Soebyakto, "Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14.1 (2016), h. 10.

ditawarkan, semakin besar kemungkinan seseorang akan mempertimbangkan untuk masuk ke dunia kerja, karena upah tersebut biasanya berkaitan erat dengan banyaknya jam kerja yang harus dijalani.³⁶

Upah minimum yang mengalami kenaikan menjadi insentif ekonomi yang mendorong lebih banyak perempuan untuk masuk ke pasar kerja. Kenaikan upah minimum berpotensi mengubah keputusan perempuan yang sebelumnya tidak bekerja menjadi bersedia bekerja. Upah minimum Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang secara logis seharusnya turut mendorong peningkatan TPAK perempuan. Berikut perbandingan angka upah minimum dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.

Tabel 1. 6 Fenomena Gap Angka Upah Minimum dan TPAK Perempuan Tahun 2018-2023

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	TPAK Perempuan (%)
2018	1.367.000	56,43
2019	1.605.396	55,35
2020	1.742.015	57,54
2021	1.798.979	57,58
2022	1.812.935	58,31
2023	1.958.169	58,92

Sumber: SK Gubernur Jateng dan jateng.bps.go.id

Tabel 1.6 memberikan gambaran fenomena gap yang terjadi antara upah minimum dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahunnya mengalami kenaikan yang juga mencerminkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Amriani (2023) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia.³⁷ Data pada Tabel 1.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2019 TPAK perempuan mengalami penurunan dari 56,43% menjadi 55,35%, sementara pada periode yang sama upah minimum mengalami peningkatan dari Rp1.367.000 menjadi Rp1.605.396.

Adapun penelitian terkait upah minimum perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang telah dilakukan oleh Jusriati Harahap dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2019” dengan metode analisis regresi linier berganda

³⁶ Sokhikhatul Mawadah, "Kurva Penawaran Tenaga Kerja Dan Jam Kerja Perempuan", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.3 (2018), h. 360.

³⁷ Nur Rahma Amriani, ‘Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berbasis Gender Di Indonesia’, *Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2023.

menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan. Hal tersebut karena Kenaikan upah minimum dalam masyarakat yang semakin tinggi berdampak pada masyarakat lebih tertarik masuk pasar kerja.³⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Choiru Muna dengan judul “Pengaruh Rata Lama Sekolah Perempuan, Upah Minimum Provinsi Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Pulau Jawa Tahun 2017-2022” dengan metode analisis regresi data panel menunjukkan bahwa upah minimum secara signifikan tidak mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Hal tersebut karena banyak perempuan bekerja di sektor informal yang tidak terpengaruh langsung oleh kebijakan upah minimum, sehingga perubahan upah minimum tidak berdampak besar pada keputusan mereka untuk bekerja.³⁹

Penelitian terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah penting untuk dilakukan. Hal tersebut karena Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK perempuan) di Provinsi Jawa Tengah menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya peran perempuan dalam berbagai sektor ekonomi. Saat ini, peran dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya semakin luas. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan karier menjadi dorongan utama bagi perempuan untuk menyetarakan hak-haknya dengan laki-laki.⁴⁰ Perempuan tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif di dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut gender atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Gap antara IPM laki-laki dan IPM perempuan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 7 IPM Menurut Jenis Kelamin dan Gap IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Tahun	[IPG] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin		Gap Nilai IPG
		Laki-laki	Perempuan	
1	2018	75,13	69,08	6,05
2	2019	75,79	69,64	6,15
3	2020	75,87	69,94	5,93
4	2021	76,08	70,36	5,72
5	2022	76,54	71,05	5,49
6	2023	77,13	71,63	5,5

Sumber: jateng.bps.go.id

³⁸ Jusriati Harahap, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) Perempuan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2019" (UIN Sumatera Utara, 2020), h. 62.

³⁹ Ibnu Choiru Muna, 'Pengaruh Rata Lama Sekolah Perempuan, Upah Minimum Provinsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Pulau Jawa Tahun 2017-2022', *Repositori Mahasiswa Untidar* (Universitas Tidar, 2023).

⁴⁰ Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih and Fita Nurotul Faizah, "Relevansi Kesetaraan Gender Dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)", *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13.1 (2020), h. 39.

Tabel 1.7 menunjukkan perkembang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023. Data tersebut menunjukkan IPM laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan setiap tahunnya. Akan tetapi, gap nilai antara IPG perempuan dan IPG laki-laki setiap tahunnya pada periode 2018-2023 menunjukkan angka yang semakin mengecil. Artinya, pertumbuhan pembangunan perempuan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pembangunan laki-laki sehingga dapat dikatakan perempuan semakin berperan dalam peningkatan pembangunan di Jawa Tengah. Penurunan gap IPM ini terutama dipengaruhi oleh komponen-komponen pembentuk IPM seperti peningkatan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang lebih cepat membaik pada kelompok perempuan. Percepatan perbaikan pada aspek-aspek tersebut membuat nilai IPM perempuan mengalami pertumbuhan tahunan yang lebih pesat dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, mengecilnya gap IPM mencerminkan bahwa perempuan tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi mulai tampil sebagai aktor aktif yang mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia secara umum. Peningkatan peran perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi inilah yang menjadikan perempuan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan di Jawa Tengah.

Pemilihan periode penelitian tahun 2018 hingga 2023 dipilih untuk menangkap dinamika partisipasi angkatan kerja perempuan sebelum pandemi, saat pandemi, hingga pasca pandemi Covid-19 dan adanya data yang menunjukkan fenomena gap dalam rentang tahun tersebut. Tahun 2023 dipilih sebagai tahun akhir pengamatan karena merupakan data terbaru yang tersedia hingga saat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan konfirmasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), data TPAK Perempuan tahun 2024 baru akan dipublikasikan pada Agustus 2025, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan mengingat keterbatasan waktu penyusunan skripsi. Oleh karena itu, periode 2018–2023 dinilai tepat dan relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada uraian permasalahan dalam latar belakang yang telah dipaparkan, ditemukan adanya fenomena kesenjangan serta perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya (*research gap*), sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mendalami permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018– 2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian dalam latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023?
3. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023?

1.2 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman akademik dan menjadi tambahan referensi dalam studi mengenai TPAK perempuan khususnya hubungan antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum dengan TPAK perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi pendidikan

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan referensi dalam dunia pendidikan untuk mendukung pembelajaran dan penelitian terkait partisipasi angkatan kerja perempuan

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya pendidikan dan faktor ekonomi dalam meningkatkan partisipasi di dunia kerja.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mendorong kesetaraan

kesempatan kerja serta optimalisasi potensi perempuan di pasar tenaga kerja.

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu terkait TPAK perempuan dengan pendekatan, wilayah, atau variabel yang berbeda

e. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini memberikan penulis pengalaman dalam menganalisis data TPAK perempuan serta menambah pemahaman mengenai isu ketenagakerjaan perempuan di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab utama dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas dasar-dasar teori yang relevan dengan topik penelitian, penjabaran konsep dari masing-masing variabel, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung, penyusunan kerangka pemikiran secara teoritik, serta pengajuan hipotesis sebagai dasar pengujian empiris dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi variabel penelitian, serta teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai objek penelitian, hasil pengujian data, serta pembahasan atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan sebagai implikasi dari temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori modal manusia berfokus pada konsep bahwa individu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka dengan menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan. Modal manusia merupakan kajian tentang sumber daya manusia yang berkaitan dengan perkembangan nilai ekonomi dalam masyarakat. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Skotlandia abad ke-18, Adam Smith. Namun, ekonom Amerika, Gary Becker, dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini. Melalui berbagai karya di bidang ekonomi, ia mengemukakan pentingnya investasi dalam manusia sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Konsep modal manusia pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith pada abad ke-18, yang menganggapnya sebagai kemampuan yang diperoleh oleh anggota masyarakat dan dapat ditingkatkan melalui pendidikan serta pelatihan. Pada tahun 1950-an, Gary Becker dan Theodore Schultz mempopulerkan teori modal manusia dalam ekonomi modern. Mereka menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan individu merupakan bentuk modal yang dapat meningkatkan hasil ekonomi serta pendapatan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelatihan dianggap penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada 1960-an, Gary Becker dan Theodore Schultz menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah investasi yang meningkatkan produktivitas.⁴² Teori modal manusia diakui pada awal tahun 1960-an saat Theodore Schultz (1961) menulis artikel "*Investment in Human Being*" dan menjadi baku setelah Gary Becker (1964) menulis buku "*Human Capital*".

Relevansi *Human Capital Theory* dalam penelitian ini terletak pada hubungan antara tingkat pendidikan perempuan, yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah. *Human Capital Theory* menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar keterampilannya, sehingga meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Dalam konteks ini, semakin tinggi RLS perempuan, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja karena memiliki

⁴¹ Muhammad Hasan, et al, *Human Capital Management (Teori Dan Aplikasi)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), h. 2.

⁴² Hasan, et al, h. 3.

kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. Dengan demikian, teori ini relevan dalam memahami bagaimana investasi dalam pendidikan dapat mendorong peningkatan TPAK perempuan dan mengurangi hambatan dalam akses terhadap pekerjaan yang lebih layak.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik Solow-Swan

Robert Solow dan Trevor Swan merupakan ekonom pelopor dalam pengembangan teori Neo Klasik yang mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan berbagai faktor produksi, antara lain jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan perkembangan teknologi. Model tersebut berasumsi bahwa seluruh faktor produksi digunakan secara optimal, termasuk kondisi tenaga kerja penuh, sehingga proses pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui penambahan modal serta inovasi teknologi.⁴³ Model pertumbuhan ekonomi Solow menyoroti hubungan antara peningkatan modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam pandangan Solow, kemajuan teknologi memainkan peran sentral dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang, sementara pada jangka pendek, pertumbuhan lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan akumulasi modal dan jumlah tenaga kerja.⁴⁴

Faktor tenaga kerja memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi karena tenaga kerja merupakan salah satu elemen utama dalam proses produksi. Ketika jumlah tenaga kerja meningkat, kapasitas produksi suatu negara bertambah, yang berdampak pada kenaikan output nasional. Jika lebih banyak orang bekerja, maka produktivitas agregat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatnya permintaan tenaga kerja akibat pertumbuhan ekonomi juga menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, yang kemudian meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja bersifat saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan partisipasi tenaga kerja, dan sebaliknya, tenaga kerja yang berkualitas serta terserap dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan Teori Solow-Swan, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan

⁴³ Lestari Sukarniati, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, and Nurul Azizah Az Zakiyyah, *Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Tantangan Di Negara Berkembang)*, (DIY: UAD PRESS, 2021), h. 39.

⁴⁴ Erlyger Romeo, et al, "Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Belanja Modal, Dan Pengguna Internet Terhadap Tingkat Pertumbuhan PDRB Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, 2.2 (2023), h. 111.

tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam perspektif Teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan adanya peningkatan output total yang dipengaruhi oleh faktor produksi, salah satunya tenaga kerja. Ketika ekonomi tumbuh, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, sehingga kesempatan kerja semakin luas. Hal ini mendorong lebih banyak individu untuk masuk ke pasar tenaga kerja, yang tercermin dalam peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2.1.3 Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja bersifat turunan (*derived demand*), yang berarti dipengaruhi oleh permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi. Jika permintaan barang dan jasa meningkat, perusahaan cenderung menambah tenaga kerja. Untuk menjaga stabilitas permintaan tenaga kerja, perusahaan perlu memastikan permintaan masyarakat atas produk dan jasa tetap stabil atau meningkat, misalnya melalui diversifikasi produk, perluasan pasar, dan peningkatan intensitas produksi. Di pasar tenaga kerja, tenaga kerja dibutuhkan bukan semata-mata karena keberadaannya, tetapi karena adanya tugas atau layanan tertentu yang harus dipenuhi. Permintaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan akan mencapai tingkat optimal ketika produktivitas tenaga kerja setara dengan biaya marginal tenaga kerja.⁴⁵

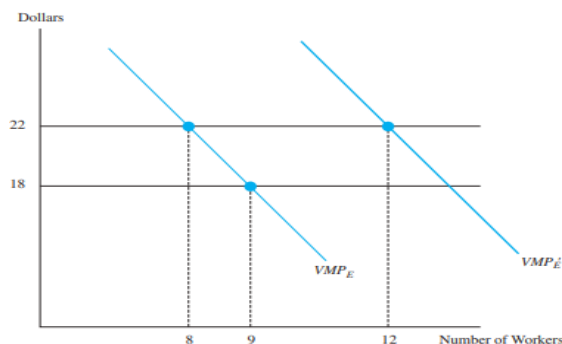
Menurut Miller & Meiners (1993), permintaan tenaga kerja ditentukan oleh nilai produk marjinal atau *Value of Marginal Product* (VMP), yaitu hasil perkalian antara produk fisik marjinal atau *Marginal Physical Product* (MPP) dengan harga produk (P). MPP menunjukkan tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu tenaga kerja. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan akan terus mempekerjakan tenaga kerja selama $VMP \geq \text{upah tenaga kerja } (P_N)$. Untuk meminimalkan biaya produksi, perusahaan mengatur kombinasi input (tenaga kerja dan modal) pada titik di mana kurva isoquant yang menunjukkan tingkat output bersinggungan dengan kurva isocost yang menunjukkan tingkat biaya. Syarat optimal ini terjadi ketika rasio antara upah dan biaya modal (w/r) sama dengan rasio antara MPP tenaga kerja dan MPP modal (MPP_L/MPP_K). Artinya, setiap unit biaya tambahan pada input apa pun harus menghasilkan tambahan output yang sama. Dalam bentuk rumus, hal ini dituliskan sebagai $MPP_x/P_x = MPP_y/P_y$, yang berarti rasio antara produktivitas marginal dan harga dari setiap input harus sama. Rasio ini juga setara dengan $1/MC$ (biaya marjinal), dan dalam pasar persaingan sempurna, karena harga (P) sama dengan penerimaan marjinal (MR), maka persamaan menjadi $MPP_x/P_x = 1/P$, sehingga $MPP_x \times P = P_x$. Ini menunjukkan bahwa perusahaan akan tetap menggunakan suatu input termasuk tenaga kerja selama nilai tambahnya setara atau lebih besar dari biaya input tersebut. Maka,

⁴⁵ Hidayati, et al, h. 38.

meskipun terjadi kenaikan upah, permintaan tenaga kerja tidak selalu menurun, karena selama produktivitas tenaga kerja tinggi atau permintaan terhadap output meningkat, perusahaan tetap akan mempekerjakan tenaga kerja untuk menjaga efisiensi dan kapasitas produksinya.⁴⁶

Kurva VMP menggambarkan permintaan tenaga kerja jangka pendek pada perusahaan yang beroperasi di bawah kondisi pasar persaingan sempurna. Kurva ini mencerminkan pendapatan tambahan yang dihasilkan dari penggunaan satu unit tenaga kerja tambahan, dengan asumsi bahwa jumlah modal tetap. Artinya, setiap tambahan tenaga kerja akan menyumbang pada peningkatan pendapatan sesuai dengan nilai kontribusinya. Dalam konteks ini, harga *output* dianggap sebagai variabel eksogen yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Rata-rata nilai produk tenaga kerja mencerminkan harga output per pekerja. Apabila tingkat upah mengalami penurunan, perusahaan cenderung meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja pun meningkat. Namun, jika jumlah tenaga kerja bertambah secara signifikan dan *output* meningkat, harga produk akan menurun, menyebabkan nilai produk marginal menurun, yang mengakibatkan kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek cenderung menurun.⁴⁷ Berikut gambar kurva permintaan tenaga kerja.

Gambar 2. 1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja



Sumber: Borjas, 2016

Gambar 2.1 menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Kurva ini memiliki kemiringan negatif yang menandakan adanya hubungan terbalik antara jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan tingkat upah, dengan asumsi bahwa modal tetap. Saat upah berada di angka \$22, perusahaan akan mempekerjakan 8 pekerja. Namun, jika upah menurun, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan meningkat menjadi 9 orang. Seiring bertambahnya jumlah pekerja, nilai produk marjinal cenderung menurun. Jika harga output meningkat, kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke kanan dari VMP_E ke

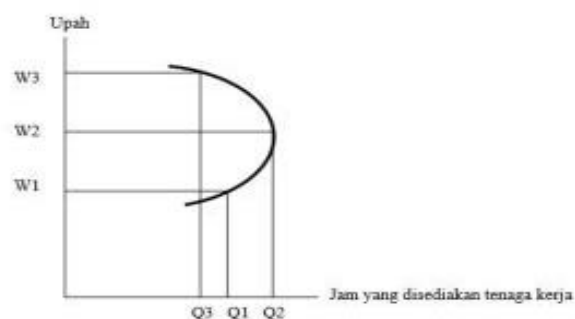
⁴⁶ Sholeh Maimun, "Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta UPah: Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4.1 (2007), h. 63–64.

⁴⁷ Hidayati, et al, h.51.

VMP_E. Dalam kondisi harga *output* yang lebih tinggi, perusahaan akan berupaya memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan produksi. Oleh karena itu, ketika upah tetap \$22, kenaikan harga *output* akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja dari 8 menjadi 12 pekerja.⁴⁸ Kenaikan upah tidak selalu membuat perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Meskipun upah adalah biaya bagi perusahaan, tetapi upah yang lebih tinggi juga bisa meningkatkan pendapatan pekerja. Ketika pendapatan mereka naik, daya beli atau konsumsi mereka juga ikut naik. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Untuk memenuhi permintaan ini, perusahaan justru bisa menambah produksi, yang berarti membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.

Hubungan antara tingkat upah dan jumlah individu yang bersedia menawarkan jasanya sebagai tenaga kerja dalam suatu perekonomian dijelaskan melalui konsep penawaran tenaga kerja. Faktor utama yang memengaruhi penawaran tenaga kerja meliputi jumlah penduduk usia kerja, persentase penduduk yang masuk ke angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan. Keputusan individu untuk bekerja dipengaruhi oleh efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi terjadi ketika kenaikan upah meningkatkan *opportunity cost* waktu luang, sehingga individu lebih memilih bekerja daripada menikmati waktu luang. Sebaliknya, efek pendapatan menyatakan bahwa peningkatan pendapatan non-kerja dapat mengurangi jumlah jam kerja karena individu sudah memiliki cukup pendapatan tanpa harus bekerja lebih banyak. Dengan demikian, upah riil menjadi faktor utama yang menentukan keputusan seseorang untuk bekerja. Jika upah meningkat, kemungkinan individu untuk bekerja juga meningkat. Namun, jika pendapatan non-kerja meningkat, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan cenderung menurun.⁴⁹ Berikut kurva asal penawaran tenaga kerja.

Gambar 2. 2 Kurva Asal Penawaran Tenaga Kerja



Sumber: Borjas, 2016

Gambar 2.2 menunjukkan kurva asal penawaran tenaga kerja yang menggambarkan

⁴⁸ Hidayati, et al, h. 49-50.

⁴⁹ Hidayati, et al, h.55.

hubungan antara upah dan jam kerja. Kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan jumlah jam kerja yang ditawarkan pekerja pada berbagai tingkat upah. Ketika upah berada di atas tingkat minimum yang diterima pekerja (*reservation wage*), kurva ini cenderung memiliki kemiringan positif hingga mencapai titik tertentu. Namun, ketika kesejahteraan pekerja meningkat atau mereka memiliki keterampilan lebih tinggi, jumlah jam kerja yang ditawarkan dapat berkurang meskipun upah terus naik. Akibatnya, kemiringan kurva menjadi negatif, membentuk pola melengkung ke belakang yang dikenal sebagai *backward-bending labor supply curve* (Borjas, 2016).

Relevansi teori permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam menjelaskan hubungan upah minimum dengan TPAK perempuan terletak pada fungsi upah sebagai insentif ekonomi. Kenaikan upah minimum mendorong perempuan terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah untuk masuk ke pasar kerja karena meningkatnya daya tarik bekerja yang sejalan dengan teori penawaran tenaga kerja, di mana kenaikan upah memicu efek substitusi yaitu individu lebih memilih bekerja daripada menghabiskan waktu untuk kegiatan non-produktif atau waktu luang karena imbalan dari bekerja menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, meskipun secara teori kenaikan upah dapat mengurangi permintaan tenaga kerja, perusahaan tetap dapat mempertahankan atau menambah tenaga kerja jika produktivitas meningkat atau permintaan pasar tinggi. Dengan demikian, perpaduan antara dorongan individu untuk bekerja dan kebutuhan tenaga kerja dari sisi perusahaan menjelaskan bagaimana upah minimum dapat meningkatkan partisipasi kerja perempuan.

2.1.4 Teori Gender

Gender kerap dipahami sebagai konstruksi sosial yang menetapkan perbedaan peran, perilaku, dan atribut antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam pandangan Islam, konsep gender tidak hanya dilihat dari sisi biologis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, serta diberikan hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam kehidupan. Namun, pemahaman masyarakat Muslim terhadap kesetaraan gender sering kali dipengaruhi oleh tafsir terhadap teks-teks keagamaan dan norma-norma budaya yang berkembang.⁵⁰ Konsep kesetaraan gender dalam Islam menjadi topik yang kerap dibahas dan dianalisis oleh berbagai kalangan. Islam memandang kesetaraan ini tidak semata-mata dari aspek biologis, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Ajaran Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki

⁵⁰ Fatmawati, "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam", *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 9.2 (2024), h. 89.

derajat yang sama di hadapan Allah, serta memperoleh hak dan tanggung jawab yang seimbang. Namun, pemahaman masyarakat Muslim mengenai kesetaraan gender sering kali dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang berlaku.⁵¹

Menurut Nasaruddin Umar dalam *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan* (2000), Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tercermin dalam beberapa hal berikut:

1. Kesamaan sebagai hamba Allah, dalam QS. al-Dzariyat [51]: 56 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah. Dalam konteks penghambaan ini, tidak ada perbedaan antara keduanya. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa (*muttaqin*), sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Hujurat [49]: 13 bahwa kriteria ketakwaan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, suku, atau ras tertentu.
2. Keduanya sebagai khalifah di bumi, QS. al-An'am [6]: 165 dan QS. al-Baqarah [2]: 30 menyebutkan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi tanpa menyebutkan jenis kelamin tertentu. Ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjalankan peran kekhalifahan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan di bumi.
3. Kesamaan dalam menerima amanah ilahi, dalam QS. al-A'raf [7]: 172 dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam perjanjian awal dengan Tuhan, di mana mereka mengakui keberadaan dan keesaan-Nya. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejak awal penciptaan, tidak terdapat diskriminasi gender dalam relasi spiritual manusia dengan Tuhan. Penegasan ini diperkuat dalam QS. al-Isra' [17]: 70 yang menyatakan bahwa seluruh keturunan Adam dimuliakan oleh Allah tanpa membedakan jenis kelamin.
4. Peran aktif Adam dan Hawa dalam kisah penciptaan, dalam berbagai ayat yang menceritakan kisah Adam dan Hawa di surga hingga mereka diturunkan ke bumi, al-Qur'an menggunakan kata ganti ganda (*humā*) yang menunjukkan keterlibatan aktif keduanya. Ini menandakan bahwa baik Adam maupun Hawa memiliki peran setara dalam "drama kosmis" tersebut.
5. Kesempatan yang sama dalam meraih pencapaian maksimal, dalam QS. Ali Imran [3]: 195, al-Nisa' [4]: 124, dan al-Nahl [16]: 97, disebutkan secara eksplisit bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk meraih keberhasilan, baik dalam aspek spiritual maupun dalam kehidupan profesional. Tidak ada dominasi satu jenis

⁵¹ Fatmawati, h.90.

kelamin atas yang lain dalam hal capaian dan kontribusi individu.⁵²

Husein Muhammad merupakan tokoh yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Ia memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta tanggung jawab yang setara, termasuk dalam aspek bekerja dan berperan di ruang publik. Husein menolak pandangan yang menempatkan perempuan secara subordinat dalam struktur sosial dan rumah tangga, sebab menurutnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis tidak dapat dijadikan dasar pembatasan peran sosial mereka. Dalam hal bekerja, Husein menegaskan bahwa tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang melarang perempuan bekerja, selama pekerjaan tersebut dilakukan secara terhormat dan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Bahkan sejarah mencatat adanya sahabat perempuan yang aktif dalam dunia usaha pada masa Nabi. Dalam pendekatan fiqihnya, Husein mengedepankan fiqih emansipatoris yaitu fiqih yang membebaskan manusia dari belenggu diskriminasi, termasuk ketimpangan berbasis gender. Ia juga menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dan sosiologis, mengingat banyak teks klasik lahir dari konstruksi budaya patriarki. Oleh karena itu, menurut Husein, perempuan boleh dan bahkan bisa jadi wajib bekerja jika dibutuhkan untuk menafkahi dirinya atau keluarganya. Pandangannya ini menegaskan bahwa Islam pada hakikatnya membawa visi keadilan sosial, termasuk dalam memperjuangkan hak perempuan untuk eksis secara mandiri di ruang publik maupun domestik.⁵³

Pandangan K.H. Husein Muhammad terhadap isu gender, terutama dalam konteks relasi suami istri dan kerja perempuan, menunjukkan kritik tajam terhadap pemahaman fiqih klasik yang dianggapnya bias gender. Menurut Husein, cara pandang keagamaan dalam masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang berakar pada penafsiran agama, terutama teks-teks keagamaan yang dimaknai secara literal dan sakral, sehingga cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, termarginalkan, bahkan dianggap sebagai pihak kedua dalam relasi sosial maupun rumah tangga. Salah satu kritik utama Husein Muhammad adalah pada konsep fiqih tentang nafkah dan istimta' (relasi seksual). Dalam fiqih tradisional, suami dianggap berkewajiban memberikan nafkah karena ia memiliki hak atas tubuh istri. Dengan kata lain, pemberian nafkah ditempatkan sebagai kompensasi atas hak seksual suami terhadap istri. Husein menyoroti bahwa dalam konsep ini, relasi seksual cenderung timpang karena hak suami atas tubuh istri begitu dominan. Namun, ia juga menjelaskan bahwa dalam aspek nafkah, justru istri yang memiliki otoritas

⁵² Maslamah and Suprati Muzani, 'Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9.2 (2014), h. 279–80.

⁵³ Mutimmah and Bakhrudin Safiullah, 'Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.5 (2022), h. 446–62.

lebih, sebab jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka istri berhak menuntut atau bahkan menolak hubungan seksual. Ini menunjukkan bahwa antara hak seksual dan hak nafkah sebenarnya saling terkait dan saling bergantung.⁵⁴

Lebih lanjut, Husein menyoroti bahwa realitas sosial telah berubah. Saat ini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan bahkan menjadi kepala keluarga karena kondisi tertentu seperti suami sakit, cacat, atau tidak mampu bekerja. Dalam kondisi ini, menurut Husein, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan tetap memperoleh nafkah, asalkan ada persetujuan suami. Jika suami merelakan istrinya bekerja, maka hak nafkah tetap melekat pada istri, dan konsekuensinya, suami juga harus siap jika akses seksualnya terhadap istri tidak lagi mutlak. Sebaliknya, jika istri bekerja tanpa izin suami, maka secara fiqih, ia dianggap kehilangan hak atas nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa relasi dalam rumah tangga bersifat timbal balik dan dilandasi oleh kesepakatan bersama, bukan dominasi sepihak.⁵⁵

Husein juga mengkritik beban ganda yang kerap dipikul perempuan dalam rumah tangga. Ia menyatakan bahwa dalam perspektif fiqih, jika istri tidak lagi bergantung pada nafkah suami atau jika ia turut bekerja, maka seharusnya beban domestik seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah tidak secara otomatis dibebankan kepada istri. Justru, suami memiliki tanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga tersebut karena tidak ada kewajiban fiqih yang membebankan perempuan untuk melakukannya. Secara keseluruhan, pemikiran Husein Muhammad menawarkan sebuah tafsir baru dalam fiqih Islam yang lebih adil gender dan kontekstual. Ia mendorong relasi suami istri yang setara, saling memahami, dan tidak membatasi peran berdasarkan jenis kelamin semata, melainkan berdasarkan kesepakatan, kondisi, dan keadilan. Pendekatannya menekankan pentingnya reaktualisasi teks keagamaan dengan mempertimbangkan realitas sosial, sehingga hukum Islam tidak lagi menjadi alat pembenaran ketimpangan, tetapi justru menjadi instrumen keadilan yang berpihak pada kemanusiaan, termasuk perempuan.⁵⁶

2.2 Deskripsi Teoritis Variabel Penelitian

2.2.1 Tenaga Kerja

Teori klasik Adam Smith berpendapat bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang berperan dalam menentukan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sumber daya alam, seperti tanah, tidak akan memiliki nilai jika tidak

⁵⁴ Assyifa Mardhatillah, 'Analisis Gender Dalam Perspektif K.H. Husein Muhammad' (UIN Ar-Raniriy Banda Aceh, 2022), h. 54-56.

⁵⁵ Mardhatillah.

⁵⁶ Mardhatillah.

dikelola dengan baik oleh manusia yang memiliki keahlian dalam mengolahnya agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan.⁵⁷ Artinya, manusia tidak hanya berperan sebagai faktor produksi utama, tetapi juga sebagai tenaga kerja yang menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Tenaga kerja memiliki peran yang penting dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, dan mendorong keberlanjutan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵⁸ Tenaga kerja menurut Payaman J. Simanjuntak (1985) merupakan penduduk yang telah atau sedang bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, serta individu yang menjalani aktivitas lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga. Kelompok ini berada dalam rentang usia minimal 15 tahun dan mencerminkan jumlah angkatan kerja yang bekerja di suatu daerah atau wilayah tertentu.⁵⁹ Menurut International Labour Organization (ILO), yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah individu yang berada dalam kelompok usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun.⁶⁰

Berdasarkan konsep Angkatan Kerja (The Labor Force Concept) yang dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO) dan telah diadaptasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah Penduduk Usia Kerja, sedangkan kelompok kedua adalah Penduduk Bukan Usia Kerja. Pembagian ini mengacu pada konsep yang digunakan oleh BPS. Berdasarkan konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk Usia Kerja mencakup individu yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk dalam kelompok ini dikategorikan menjadi dua berdasarkan aktivitas utamanya, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.⁶¹

2.2.1.1 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk yang secara aktif terlibat atau siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Kelompok ini mencakup individu yang sudah bekerja serta mereka yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Dengan kata lain, angkatan kerja terdiri dari penduduk yang berada dalam

⁵⁷ Anggaryani. Putri, 'Pengaruh Tenaga Kerja Dan Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1980-2012', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1.2 (2013).

⁵⁸ Presiden Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*, 2003.

⁵⁹ Uswatun Hasanah, "Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Periode 2016-2020", *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2022), h. 93.

⁶⁰ Maulida Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Gema Keadilan*, Vol. 3, No (2016), h. 68.

⁶¹ Zulfyandi et al, *Ketenagakerjaan Dalam Data 2021*, 4th edn (Jakarta Selatan: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, 2021), h. 19.

pasar tenaga kerja dan memiliki kesiapan untuk bekerja, baik dengan status bekerja maupun masih mencari peluang kerja.⁶²

Bukan angkatan kerja merupakan kelompok penduduk yang tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti bekerja atau mencari pekerjaan dalam satu minggu terakhir. Kelompok ini terdiri dari pelajar yang fokus pada pendidikan, individu yang mengurus rumah tangga tanpa menerima upah, serta mereka yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, disabilitas, atau kondisi tertentu. Mereka umumnya bergantung pada keluarga atau bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁶³ Berdasarkan jenis kegiatannya, angkatan kerja mencakup kegiatan bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya.

2.2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK diperoleh dengan cara membagi jumlah angkatan kerja (baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan) dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Indikator ini mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk usia produktif yang aktif maupun berusaha aktif dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar pula partisipasi masyarakat usia kerja dalam kegiatan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.⁶⁴

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan persentase penduduk usia produktif yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan ketersediaan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Informasi mengenai angkatan kerja yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin dan kelompok umur sangat berguna untuk membentuk gambaran distribusi penduduk yang berperan dalam aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, TPAK berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai seberapa besar proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau negara. Nilai TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja, kemudian dikalikan dengan 100.⁶⁵

⁶² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, h. 18.

⁶³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, h. 8-9 .

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, h. 23.

⁶⁵ BPS Provinsi Jawa Tengah, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2023*, BPS Provinsi Jawa

Menurut Simanjuntak (2001), berbagai faktor yang memengaruhi tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan dan mengurus rumah tangga, usia, besaran upah, tingkat pendidikan, serta aktivitas ekonomi.⁶⁶ Berikut rumus menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengacu pada persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang secara aktif terlibat di pasar tenaga kerja, baik dalam bentuk bekerja, mencari pekerjaan, maupun mempersiapkan usaha. Indikator ini memberikan gambaran tentang ketersediaan tenaga kerja yang berkontribusi dalam proses produksi barang dan jasa. Sementara itu, TPAK perempuan digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja.⁶⁷

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana perempuan berperan dalam aktivitas ekonomi melalui keterlibatan mereka di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja, pencari kerja, maupun individu yang mempersiapkan usaha. Angka ini mencerminkan tingkat kesetaraan gender dalam dunia kerja serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, kondisi ekonomi, dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Peningkatan TPAK perempuan dapat menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Berikut rumus untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan:

$$TPAK \text{ Perempuan} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan}} \times 100$$

2.2.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Perspektif Islam

Islam memandang perempuan sebagai individu yang memiliki hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Islam dan negara sama-sama

Tengah, 2024, 05.

⁶⁶ Yessy Purnamasari and Dini Amaliah, "Peranan Partisipasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Di DKI Jakarta Tahun 2009-2013", *Research and Development Journal of Education*, 2.1 (2015), h. 23.

⁶⁷ Rizky Amalia Yulianti and Vita Ratnasari, "Pemetaan Dan Pemodelan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Model Probit", *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2.2 (2013), h. 159.

memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi perempuan pekerja.⁶⁸ Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja selama pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Qasas ayat 23.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, ‘Apa maksudmu (berbuat begitu)?’ Kedua (perempuan) itu menjawab, ‘Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.’”⁶⁹ (QS. Al-Qasas [28]: 23)

Dikutip dari tafsir Al-Mishbah, ayat diatas menjelaskan bahwa secara prinsip, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri maupun dalam kerja sama dengan pihak swasta atau pemerintah, baik pada siang maupun malam hari. Hal ini diperbolehkan selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana yang terhormat, tetap menjaga nilai-nilai ajaran agama, serta menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap dirinya maupun lingkungan sekitarnya.⁷⁰

Diperlukan penafsiran dalil agama yang moderat dan progresif untuk mendukung gerakan kesetaraan gender. Pendekatan ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif wanita dalam berbagai aspek kehidupan yang terus berkembang, tanpa mengabaikan identitas mereka sebagai muslimah yang tetap memegang teguh nilai-nilai agama. Penafsiran tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pengembangan potensi wanita, mengingat peran mereka sebagai hamba Allah ('abdullah) dan khalifah di bumi (khalifatullah) yang harus dijalankan berdampingan dengan pria tanpa merugikan salah satu pihak.⁷¹

Yusuf Al-Qardhawi mengembangkan pandangan yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan syariat dengan mengintegrasikan Al-Qur'an dan Hadits serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan tantangan zaman. Ia mengakui bahwa wanita memiliki hak untuk bekerja dan berkarier, tetapi dengan ketentuan dan batasan tertentu yang

⁶⁸ Isna Rahmah Solihatin, "Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga", *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12.2 (2017), h. 46-47.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, h. 388.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 331-332.

⁷¹ Zunita Hidayatul Chusna, et al, "THE MODERATE PERSPECTIVE OF YUSUF AL-QARDHAWI ON CAREER WOMEN", *ICES: International Conference on Education and Sharia*, 1 (2024), h. 255.

bertujuan menjaga kehormatan serta martabat mereka, sehingga dapat berperan di ranah publik tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Yusuf al-Qardhawi secara tidak langsung mendukung peran wanita dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan politik, dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat tertentu sesuai prinsip syariah.⁷²

2.2.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan

Menurut BPS (2023) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mengukur jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Perhitungan RLS mencakup penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut seseorang umumnya telah menyelesaikan pendidikannya. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pendidikan yang diterima oleh penduduk. Semakin tinggi nilai RLS atau *Mean Years of Schooling* (MYS), semakin lama jenjang pendidikan yang telah ditempuh atau sedang dijalani oleh seseorang. Hal ini menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi.⁷³ Peningkatan RLS menjadi salah satu tujuan penting dalam pembangunan sektor pendidikan, baik di tingkat nasional maupun global, sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya dalam mencapai pendidikan berkualitas dan merata bagi semua.

RLS digunakan untuk menilai tingkat pendidikan masyarakat serta mengidentifikasi kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Semakin tinggi nilai RLS, semakin baik tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah, yang mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan dalam memberikan akses belajar yang lebih lama. Sebaliknya, nilai RLS yang rendah dapat mengindikasikan masih adanya hambatan dalam pemerataan pendidikan, seperti keterbatasan akses, faktor ekonomi, atau tingginya angka putus sekolah. Sebagai indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), RLS sering dikaitkan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak-anak yang memasuki jenjang pendidikan. Perbandingan antara RLS dan HLS dapat memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan pendidikan dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam penghitungan indeks pendidikan, RLS memiliki bobot yang sama dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Batasan nilai maksimum dan minimum RLS mengikuti standar United Nations Development Programme (UNDP), yaitu 15 tahun sebagai nilai maksimum dan 0 tahun sebagai nilai minimum.⁷⁴ Penduduk tamat SD dihitung memiliki lama sekolah 6 tahun, tamat SMP 9 tahun, dan tamat SMA 12

⁷² Chusna, et al, h.50.

⁷³ Dinas Perempuan dan Anak.

⁷⁴ Arwini Arisandi and Syandriana Syarifuddin, 'Memprediksikan Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Indonesia Bagian Timur Menggunakan Random Forest Classification', *Journal of Mathematics: Theory and Applications*, 5.1 (2023), h. 2.

tahun terlepas apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rumus menghitung Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan:

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun

n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan mencerminkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh perempuan dalam suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilai RLS menunjukkan semakin baik akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesetaraan gender. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan mencerminkan akses dan partisipasi mereka dalam pendidikan, di mana semakin lama mereka menempuh pendidikan, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berdaya saing. Pendidikan dapat membentuk cara berpikir seseorang dalam menentukan keputusan yang akan diambil.⁷⁵ Pendidikan menjadi faktor penting bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, serta membuka kesempatan yang lebih luas di berbagai sektor pekerjaan.

2.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Perspektif Islam

Islam secara konsisten mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Dalam Islam, pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu secara jasmani, akal, dan rohani agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, karena kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan gender. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Mujadalah Ayat 11 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu ‘Berilah

⁷⁵ Nurudin, Johan Arifin, and Anang Ma'ruf, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan Syariah, Dan Kebudayaan Terhadap Minat Menabung Santri Kota Semarang Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi', *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), h. 3.

kelapangan di dalam majelis-majelis,' lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mujadalah [58]: 11)⁷⁶

Dikutip dari tafsir Al-Mishbah, ayat diatas menegaskan bahwa ilmu memiliki peran besar dalam meninggikan derajat seseorang. Ayat yang dibahas tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Allah meninggikan derajat orang berilmu, tetapi menunjukkan bahwa mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sekadar beriman dan beramal saleh. Ilmu yang dimaksud tidak terbatas pada ilmu agama, tetapi mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Orang yang berilmu tidak hanya memiliki kedudukan tinggi karena ilmunya, tetapi juga karena amal serta pengajarannya kepada orang lain, baik melalui lisan, tulisan, maupun keteladanan.⁷⁷

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.'" (HR. Ibnu Majah No. 224)⁷⁸

Hadis tersebut menegaskan bahwa mencari ilmu bukan hanya sekadar anjuran, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun wanita. Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah kunci menuju kemuliaan dan dapat mengantarkan seseorang mencapai derajat ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah. Selain ilmu agama, Islam juga mendorong umatnya untuk mempelajari berbagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁹

Perspektif gender dalam pendidikan semakin menjadi perhatian global, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Islam memberikan perhatian besar kepada perempuan dan menempatkannya pada posisi yang terhormat. Jika di masa lalu perempuan hanya diajarkan keterampilan domestik seperti memasak dan menjahit, kini mereka didorong untuk menuntut ilmu guna mendidik generasi mendatang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial serta

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, h. 543.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), XIV, h. 79-80.

⁷⁸ Atika Agustina Tarik and Mohammad Kurjum, "Telaah Hadit Keutamaan Dan Urgensi Menuntut Ilmu Di Era Digital: Relevansi Dengan Tantangan Pendidikan Modern Dan Kriteria Pendidik Ideal", *STUDIA RELIGIA, Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8.2 (2024), h. 187.

⁷⁹ Ibid

ekonomi.⁸⁰

Sejak lama, budaya patriarki telah membentuk kreativitas dan kemampuan perempuan, hingga muncul anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena pada akhirnya mereka akan berperan sebagai ibu rumah tangga. Pandangan semacam ini terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan hanya sedikit orang yang mampu menentangnya, padahal dalam aspek pendidikan, Islam memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.⁸¹ Laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan harus diperlakukan dengan sama karena keduanya sama-sama berperan penting dalam kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, perempuan tidak pantas mengalami diskriminasi dalam pendidikan.

Buya Hamka berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, Hamka juga menyoroti bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab terhadap peran masing-masing dalam kehidupan.⁸² Menurut Muhammad Abduh, Islam memberikan persamaan peran bagi laki-laki dan perempuan, tetapi bukan dalam segala hal. Persamaan ini diwujudkan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas masing-masing individu. Abduh juga berpendapat bahwa perempuan harus memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana laki-laki. Ia mengkritik pembatasan budaya yang membatasi peran perempuan di sektor publik, karena hal ini justru menghambat mereka dalam mengakses pendidikan yang baik dan berkontribusi terhadap kemajuan. Baginya, perempuan memegang peran penting dalam mendidik generasi penerus.⁸³

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:331), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa serta mendorong naiknya kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menilai perkembangan ekonomi sebuah negara karena menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya,

⁸⁰ Fawziyah Tansya, Salminawati, and Usiono, "Pendidikan Wanita Dalam Filsafat Pendidikan Islam", *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3.4 (2022), h. 410.

⁸¹ Syarifah Rahmah, *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam)* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021), h.42.

⁸² Siti Defiani, Ahmad Fauzia, and Ummi Lailia Maghfiroh, "Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Buya Hamka", *BEST JOURNAL : Biology Education Science & Techmology*, 7.1 (2024), h. 1013.

⁸³ Mochamad Samsukadi, "Perspektif Gender Dalam Tafsir Muhammad 'Abduh', *Marâji'*: *Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2014), h. 253.

aktivitas ekonomi melibatkan proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output yang kemudian memberikan imbalan kepada pemilik faktor produksi dalam masyarakat.⁸⁴ Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan erat. Pembangunan ekonomi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi turut mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB berfungsi sebagai indikator yang mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dan dapat dijadikan acuan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan yang diperoleh.⁸⁵ Di tingkat regional, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB adalah jumlah total nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu.

PDRB dapat diukur menggunakan tiga metode utama, yaitu pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Pendekatan pendapatan menghitung PDRB dengan cara menjumlahkan imbalan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi, seperti upah, gaji, serta laba modal. Sementara itu, pendekatan pengeluaran berfokus pada total permintaan akhir, termasuk konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor netto. Sedangkan pendekatan produksi menghitung PDRB berdasarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah setelah dikurangi biaya produksi. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertumbuhan ekonomi suatu daerah.⁸⁶ PDRB dibedakan menjadi dua yaitu PDRB ADHB dan PDRB ADHK.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencerminkan perubahan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga aktual pada setiap tahunnya. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menggambarkan pertumbuhan nilai tambah barang dan jasa dengan memakai harga dari tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sering disebut PDRB Nominal karena menggunakan harga yang berlaku pada saat periode penghitungan. Data ini umumnya dipergunakan untuk menganalisis struktur perekonomian suatu daerah. Di sisi lain, PDRB ADHK dikenal sebagai PDRB Riil karena menggunakan harga tetap dari tahun dasar

⁸⁴ Mulyaningsih, h. 11.

⁸⁵ Revita Yuni and Dedi Lanova Hutabarat, "Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019", *NIAGAWAN*, 10.1 (2021), h. 63.

⁸⁶ Mohammad Soleh and Nunung Wahyuni, "Pengaruh IPM , PDRB Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap", *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6.2 (2021), h. 92.

tertentu. Data ini lebih sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.⁸⁷

PDRB ADHK yang sering disebut sebagai PDRB Riil umumnya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa dengan merujuk pada harga tahun tertentu sebagai acuan perhitungan. Namun, untuk memahami perubahan dinamika pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, diperlukan ukuran yang lebih menggambarkan perubahan ekonomi secara relatif, yaitu laju pertumbuhan PDRB ADHK. Laju pertumbuhan PDRB ADHK adalah persentase perubahan PDRB ADHK dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang mencerminkan seberapa cepat ekonomi suatu wilayah berkembang atau mengalami kontraksi. PDRB ADHK sendiri mencerminkan ukuran absolut dari nilai tambah barang dan jasa dalam suatu periode, sedangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK menunjukkan perubahan relatif dari ukuran tersebut. Hubungan antara keduanya terletak pada fakta bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHK dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK antar tahun, sehingga dapat menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi secara lebih jelas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK, karena indikator ini lebih tepat dalam menggambarkan perkembangan ekonomi riil dari tahun ke tahun dengan mengeliminasi pengaruh inflasi. Dengan demikian, laju pertumbuhan PDRB ADHK memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama enam tahun terakhir, yaitu dari 2018 hingga 2023

2.2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi menurut perspektif Islam merupakan tren berkelanjutan yang muncul dari faktor-faktor produksi utama yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Islam menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai aspek penting yang harus diperhatikan. Keterbatasan faktor produksi tidak boleh menjadi penghambat, terutama jika hal itu menyebabkan produksi barang dan jasa yang berdampak negatif atau berbahaya bagi umat manusia.⁸⁸ Menurut Imam Al-Ghazali, pertumbuhan dalam Islam mencakup pembangunan fisik, mental, dan spiritual. Sementara itu, Heidar Naqvi menekankan bahwa pertumbuhan dalam Islam meliputi aspek moral-spiritual dan material, dengan fokus pada distribusi pendapatan yang adil serta keseimbangan antar generasi melalui investasi dalam sumber daya manusia.⁸⁹

⁸⁷ Prasetyani and Sumardi, XI.

⁸⁸ Eza Okhy Awalia Br Nasution and others, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam", *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 1.1 (2023), h. 67.

⁸⁹ Moch Hoerul Gunawan, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Tahkim*, XVI.1 (2020), h. 126.

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus seimbang antara *'ubbudiyah* dan *ta'aquli*. Ini berarti kegiatan ekonomi perlu didasari oleh niat ibadah (spiritualitas) sekaligus menggunakan akal dan ilmu pengetahuan (rasionalitas). Kombinasi kedua unsur ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga memberikan keberkahan dan kesejahteraan yang holistik (dunia dan akhirat). Ekonomi Islam berlandaskan empat konsep utama yaitu *Tauhid*, *Rububiyyah*, *Khalifah*, dan *Tazkiyah*. *Tauhid* menekankan ketaatan kepada Allah dalam aktivitas ekonomi sebagai ibadah. *Rububiyyah* menunjukkan Allah sebagai Pengatur alam dengan aturan untuk kesejahteraan hidup. Melalui *Khalifah*, manusia diberi tanggung jawab menjaga lingkungan dan memastikan pembangunan yang adil. *Tazkiyah* mendorong penyucian diri dan hubungan harmonis dengan Allah, sesama manusia, dan makhluk lain.⁹⁰

2.2.5 Upah Minimum

Penetapan upah minimum merupakan bagian krusial dalam sistem pengupahan nasional yang bertujuan melindungi hak tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.⁹¹ Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum menyatakan bahwa “Upah minimum adalah besaran upah bulanan paling rendah yang meliputi upah pokok beserta tunjangan tetap, yang ditetapkan oleh gubernur sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pekerja”.⁹² Pada level regional, upah minimum terbagi menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) selalu mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP menjadi patokan dalam menentukan UMK, di mana UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP sehingga kenaikan UMP juga mencerminkan kenaikan UMK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan upah minimum harus sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum pada tahun sebelumnya. Ketentuan ini mengharuskan perusahaan mengalokasikan biaya tambahan guna memenuhi persyaratan tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gubernur diberi kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan UMP wajib dilakukan paling lambat 60 hari sebelum pelaksanaan, sedangkan UMK harus ditetapkan paling lambat 40 hari sebelumnya. Proses peninjauan

⁹⁰ Gunawan, h. 125-126.

⁹¹ Trimaya.

⁹² KEMNAKER.

terhadap UMP dan UMK dilakukan secara rutin setiap tahun.⁹³

Upah minimum di Kabupaten/Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan kenaikan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu pada KHL, sambil mempertimbangkan produktivitas dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam proses penetapan upah minimum, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah melibatkan Dewan Pengupahan Nasional yang berfungsi sebagai lembaga independen. Dewan ini terdiri dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI), serta akademisi dan praktisi dari perguruan tinggi. Mereka memiliki tugas untuk mengevaluasi upah minimum yang berlaku serta memberikan rekomendasi terkait kenaikan upah kepada pemerintah.⁹⁴

2.2.5.1 Upah Minimum Perspektif Islam

Ibnu Khaldun memandang buruh sebagai elemen penting dalam perekonomian dan menyebutnya dengan istilah *shina'ah*, yang berarti pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan kerja fisik. Dalam ekonomi modern, konsep ini dikenal sebagai ketenagakerjaan (*employment*), dan buruh disebut sebagai tenaga kerja (*labour*). Menurut Ibnu Khaldun, buruh adalah sumber nilai dalam proses produksi. Meskipun biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap harga barang, hal ini adalah bagian yang wajar dalam mekanisme produksi. Ia menegaskan bahwa tanpa kontribusi buruh, output ekonomi tidak akan tercipta. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa pengaturan tenaga kerja adalah tanggung jawab negara. Negara harus memastikan kesejahteraan buruh dengan mengatur sistem pengupahan yang adil. Pemikiran ini sejalan dengan kebijakan modern seperti upah minimum regional (UMR), di mana pemerintah turut campur tangan untuk melindungi hak buruh dan menjaga keseimbangan ekonomi.⁹⁵

Islam menekankan keseimbangan dalam pemberian upah, yaitu tidak boleh di bawah kebutuhan pokok pekerja, tetapi juga tidak boleh melebihi batas yang ditentukan berdasarkan kontribusi terhadap produksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan bagi pekerja dan keberlangsungan usaha. Prinsip kelayakan upah pekerja dalam Islam menekankan bahwa upah adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh majikan. Islam mengajarkan bahwa upah harus diberikan secara adil dan layak, sesuai dengan pekerjaan

⁹³ Mashari, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum Menuju Kebutuhan Hidup Layak Bagi Pekerja Di Jawa Tengah", *Jurnal Spektrum*, 12.1 (2015), h. 51.

⁹⁴ Mashari.

⁹⁵ Budi Solihin, "Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)", *Al-Mujaddid*, 1.1 (2018), h. 25–26.

yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan pekerja dan pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka.⁹⁶

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya melibatkan sebagian variabel dan menggunakan objek penelitian yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Metode Analisis	Variable yang Diteliti	Hasil penelitian
1	Rieke Novita (2024)	1 “Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di 6 Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022” 2 Regresi Data Panel	1 Pertumbuhan Ekonomi (X ₁) 2 Rata-rata Lama Sekolah (X ₂) 3 Perempuan Kepala Rumah Tangga (X ₃) 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	1 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap TPAK perempuan 2 RLS perempuan secara signifikan berpengaruh positif terhadap TPAK Perempuan 3 Perempuan kepala rumah tangga secara signifikan berpengaruh positif terhadap TPAK Perempuan
2	Wulan Kurniasari, Toto Gunarto, Dedy Yuliawan (2024)	1 “Dinamika Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: Faktor Kunci Di Indonesia” 2 Regresi Linier Multivariabel	1 Pertumbuhan Ekonomi (X ₁) 2 Pendidikan (X ₂) 3 Fertilitas (X ₃) 4 Penduduk Usia Kerja (X ₄) 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	1 Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan 2 Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan 3 Fertilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK perempuan 4 Penduduk usia kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK

⁹⁶ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Equilibrium*, 1.2 (2013), h. 253.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Metode Analisis	Variable yang Diteliti	Hasil penelitian
				perempuan
3	Paulus Uppun, Amanus Khalifah Fil'ardy, Adelia Dwiyantri (2024)	1 “Kajian Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Daerah Pusat Perekonomian Kawasan Tengah Indonesia” 2 Regresi Linier Berganda	1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan (X_1) 2 Upah Minimum Provinsi (UMP) (X_2) 3 Jumlah Kelahiran Hidup (X_3) 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	1 RLS perempuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan 2 UMP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan 3 Jumlah kelahiran hidup tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan
4	Nur Azizah Siregar, Rico Ricardo, Nanda Rembulan Nurdianto (2024)	1 “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, <i>Sex Ratio</i> dan Indeks Pembangunan Gender Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan” 2 Regresi Data Panel	1 Pertumbuhan Ekonomi (X_1) 2 Upah Minimum (X_2) 3 <i>Sex Ratio</i> (X_3) 4 Indeks Pembangunan Gender (X_4) 5 Covid-19 (X_5) 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	1 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan 2 Upah minimum memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap TPAK perempuan 3 <i>Sex Ratio</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan 4 IPG memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPAK perempuan 5 Covid-19 memiliki pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap TPAK perempuan
5	Febi Ariansyah, Doni Satria (2024)	1 “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Di Indonesia” 2 Regresi Data Panel	1 Pendidikan (X_1) 2 Upah (X_2) 3 Kesejahteraan Wanita (X_3) 4 Pertumbuhan Ekonomi (X_4) 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita	1 Pendidikan memiliki pengaruh terhadap TPAK wanita 2 Upah tidak berpengaruh terhadap TPAK wanita 3 Kesejahteraan wanita tidak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Metode Analisis	Variable yang Diteliti	Hasil penelitian
			(Y)	berpengaruh terhadap TPAK wanita 4 Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap TPAK wanita
6	Ibnu Choiru Muna (2023)	1 “Analisis Pengaruh Rata Lama Sekolah Perempuan, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Pulau Jawa Tahun 2017-2022” 2 Regresi Data Panel	1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan (X_1) 2 Upah Minimum Provinsi (UMP) (X_2) 3 Pertumbuhan Ekonomi (X_3) 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	1 RLS perempuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap TPAK Perempuan 2 UMP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap TPAK Perempuan 3 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan
7	Nur Rahma Amriani (2023)	1 “Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berbasis Gender Di Indonesia” 2 Regresi Data Panel	1 Indeks Pembangunan Gender (X_1) 2 Indeks Pemberdayaan Gender (X_2) 3 Jumlah Perempuan Mengurus Rumah Tangga (X_3) 4 Upah Minimum (X_4) 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	1 Indeks pembangunan gender berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan 2 Indeks pemberdayaan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan 3 Jumlah perempuan mengurus rumah tangga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap TPAK perempuan 4 Upah minimum secara signifikan berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan
8	Zulfi Arizona Balqist (2022)	1 “Analisis Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2015-2020” 2 Regresi Data Panel	1 Pendidikan (X_1) 2 Perempuan yang Mengurus Rumah Tangga (X_2) 3 Upah Minimum (X_3)	1 Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap TPAK perempuan 2 Perempuan yang mengurus rumah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Metode Analisis	Variable yang Diteliti	Hasil penelitian
			4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	4 tangga secara signifikan berpengaruh positif terhadap TPAK Perempuan 3 Upah minimum secara signifikan berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan
9	Anggi Septiawan, Siti Haiyinah Wijaya (2020)	1 “Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia Tahun 2015-2019 Menggunakan Model Regresi Data Panel” 2 Regresi Data Panel	1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan (X₁) 2 Upah Tenaga Kerja Perempuan (X₂) 3 Jumlah Penduduk yang Mengurus Rumah Tangga (X₃) 4 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (X₄) 5 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian (X₅) 6 PPDRB ADHK (X₆) 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) (Y)	1 RLS perempuan berpengaruh positif terhadap TPAKP 2 Upah tenaga kerja perempuan berpengaruh positif terhadap TPAKP 3 Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga berpengaruh negatif terhadap TPAKP 4 Jumlah tenaga sektor industri pengolahan berpengaruh positif terhadap TPAKP 5 Jumlah tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif terhadap TPAKP 6 PDRB ADHK berpengaruh positif terhadap TPAKP
10	Jusriati Harahap (2020)	1 “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2019” 2 Regresi Linier Berganda	1 Upah Minimum (X₁) 2 Kemiskinan (X₂) 3 Jumlah Penduduk Perempuan yang Mengurus Rumah Tangga (X₃) 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) (Y)	1 Upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK perempuan 2 Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK perempuan 3 Jumlah penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Metode Analisis	Variable yang Diteliti	Hasil penelitian
				perempuan
11	Vera Siti Rodiah (2019)	1 “Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Periode 2010-2015” 2 Regresi Data Panel	1 PDRB (X_1) 2 Upah Minimum (X_2) 3 Angka Melek Huruf (X_3) 4 Rata-rata Lama Sekolah (X_4) 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	1 PDRB tidak berpengaruh terhadap TPAK perempuan 2 Upah minimum secara signifikan berpengaruh negatif terhadap TPAK Perempuan 3 Angka melek huruf berpengaruh secara signifikan positif terhadap TPAK perempuan 4 Rata-rata lama sekolah secara signifikan berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan
12	Rani Ardella (2018)	1 “Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Pulau Jawa Tahun 2006-2017” 2 Regresi Data Panel	1 Pertumbuhan Ekonomi (X_1) 2 Tingkat Pendidikan (X_2) 3 Upah Minimum (X_3) 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita (Y)	1 Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap TPAK wanita 2 Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap TPAK wanita 3 Upah Minimum berpengaruh positif terhadap TPAK perempuan
13	Siti Hardiyanti Hatta (2017)	1 “Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Kota Makassar” 2 Regresi Linier Berganda	1 Upah Minimum (X_1) 2 Pertumbuhan Ekonomi (X_2) 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita (Y)	1 Upah minimum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap TPAK wanita 2 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap TPAK wanita
14	Ilham Akbar M (2011)	1 “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi	1 Pertumbuhan Ekonomi (X_1) 2 Upah Minimum (X_2)	1 Pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB Atas Dasar

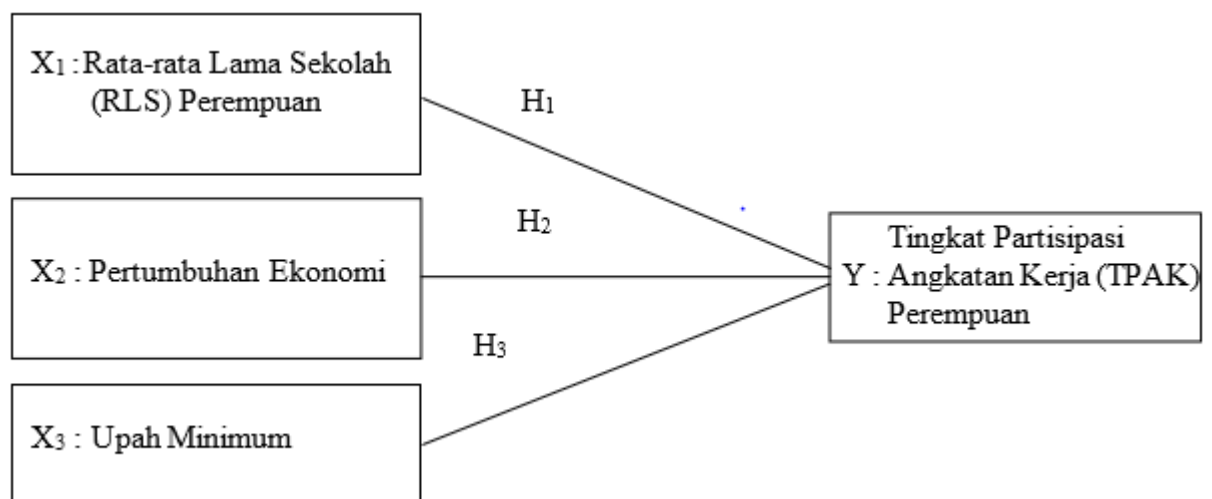
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Metode Analisis	Variable yang Diteliti	Hasil penelitian
		Angkatan Kerja Wanita Kota Makassar Periode 2000-2009” 2 Regresi Linier Berganda	3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita (Y)	Harga Konstan (ADHK) secara signifikan berpengaruh positif terhadap TPAK wanita 2 Upah minimum secara signifikan berpengaruh positif terhadap (TPAK) wanita

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji, mayoritas penelitian mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dilakukan dengan cakupan wilayah nasional atau beberapa provinsi secara agregat, dan belum banyak yang secara khusus menyoroti Provinsi Jawa Tengah. Sejauh pengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian yang membahas TPAK perempuan di Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2023 secara spesifik. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung hanya melihat TPAK perempuan dari sudut pandang ekonomi konvensional, tanpa mengaitkannya dengan perspektif Islam, seperti bagaimana Islam memandang perempuan bekerja di ranah publik. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi TPAK perempuan di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2023 serta menambahkan perspektif Islam dalam pembahasannya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara teoritis dapat dikembangkan sebagai berikut :

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas diketahui bahwa penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu X1 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, X2 : Pertumbuhan Ekonomi, X3 : Upah Minimum dan satu variabel dependen yaitu Y : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah dugaan awal yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Statusnya masih sementara karena hipotesis ini didasarkan pada landasan teori yang relevan, bukan pada data atau bukti empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis dapat dianggap sebagai solusi teoritis untuk permasalahan penelitian, yang belum dibuktikan secara empiris⁹⁷

1. Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan mencerminkan akses dan partisipasi mereka dalam pendidikan, di mana semakin lama mereka menempuh pendidikan, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berdaya saing. Hal tersebut sejalan dengan *Human Capital Theory* yang menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar keterampilannya, sehingga meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan dan meningkatkan produktivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Rieke Novita (2024) menyatakan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vera Siti Rodiah (2019) yang menyatakan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh perempuan, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga akan meningkat. Dengan kata lain, semakin lama perempuan mengenyam pendidikan, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat dalam pasar kerja, karena pendidikan yang lebih tinggi biasanya meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan peluang kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan (X₁) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (Y)

⁹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 64.

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan *output* suatu wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik Solow-Swan yang menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap tenaga kerja juga meningkat, seiring dengan berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang menciptakan lebih banyak peluang kerja. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksikan dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK. PDRB ADHK mencerminkan ukuran absolut dari nilai tambah riil yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam satu tahun tertentu. Nilai ini telah dikoreksi terhadap inflasi, sehingga lebih akurat dalam menunjukkan kapasitas ekonomi dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam analisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi umumnya diproksikan dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK, karena bukan hanya ukuran ekonomi yang penting, tetapi juga seberapa cepat ekonomi tersebut bertumbuh. Jika laju pertumbuhan PDRB ADHK positif, berarti ekonomi mengalami ekspansi, sedangkan jika negatif, menandakan adanya kontraksi ekonomi. Dengan demikian, PDRB ADHK menjadi dasar dalam penghitungan, laju pertumbuhan PDRB ADHK menggambarkan dinamika perubahan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi direpresentasikan melalui laju pertumbuhan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Siregar, dkk (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap TPAK perempuan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Hadiyanti Hatta (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap TPAK wanita. Artinya ketika ekonomi tumbuh lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan yang mendorong peningkatan TPAK perempuan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Pertumbuhan ekonomi (X₂) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (Y)

3. Pengaruh upah minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Berdasarkan konsep dasar teori permintaan tenaga kerja, kenaikan upah minimum secara teoritis dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta karena meningkatnya biaya tenaga kerja. Namun, hal ini tidak selalu terjadi, terutama jika produktivitas meningkat atau

permintaan terhadap barang dan jasa tetap tinggi, sehingga perusahaan tetap mempertahankan atau bahkan menambah tenaga kerja. Di sisi lain, dari sudut pandang teori penawaran tenaga kerja, kenaikan upah minimum dapat mendorong individu, khususnya perempuan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, untuk masuk ke pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh efek substitusi, di mana imbalan bekerja yang lebih tinggi membuat individu lebih memilih bekerja dibandingkan menghabiskan waktu untuk aktivitas non-produktif atau waktu luang. Dengan demikian, kombinasi antara dorongan individu untuk bekerja dan kebutuhan tenaga kerja dari sisi perusahaan menjadi dasar bagi hipotesis bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahma Amriani (2023) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap TPAK perempuan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jusriati Harahap (2020) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap TPAK perempuan. Artinya, kenaikan upah minimum membuat TPAK perempuan mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Upah minimum (X₃) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode utamanya. Metode kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme, yang berpandangan bahwa realitas atau fenomena dapat diklasifikasikan, bersifat tetap, konkret, dapat diamati, dan dapat diukur secara objektif. Selain itu, pendekatan ini mengasumsikan adanya hubungan kausal antar fenomena. Penelitian dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu, dengan data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik, dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.⁹⁸ Jenis penelitian ini yaitu penelitian kausal komparatif (*causal-comparatif reearch*). Menurut Sugiyono, penelitian kausal komparatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen.

3.1.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, sehingga peneliti bertindak sebagai pihak kedua dalam proses pengumpulan data. Data tersebut diperoleh dari berbagai referensi terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal ilmiah, serta sumber relevan lainnya⁹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta sumber data lain yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan data untuk masing-masing variabel dilakukan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber utama.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), populasi merupakan sekumpulan individu, objek, atau hal-hal tertentu yang menjadi sumber pengambilan sampel, serta memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian.

⁹⁸ Sugiyono, h.8.

⁹⁹ Enny Radjab and Andi Jama'an, *Metode Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017), h.111.

Populasi mencerminkan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan ciri khas yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, populasi tidak terbatas hanya pada manusia, tetapi juga dapat mencakup benda, fenomena, maupun elemen alam lainnya. Lebih dari sekadar jumlah objek atau subjek yang diamati, populasi juga meliputi keseluruhan karakteristik dan sifat yang melekat pada unit-unit tersebut.¹⁰⁰ Populasi dalam penelitian ini yaitu data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh laju pertumbuhan PDRB ADHK, dan upah minimum 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dianggap mampu merepresentasikan keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Nonprobability Sampling dengan pendekatan sampling jenuh. Teknik ini dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Sampling jenuh umumnya diterapkan ketika ukuran populasi relatif kecil atau ketika penelitian menghendaki generalisasi dengan tingkat kesalahan minimal. Teknik ini juga dikenal sebagai metode sensus, karena mencakup seluruh elemen dalam populasi yang diteliti¹⁰¹

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data meliputi buku, jurnal ilmiah, publikasi resmi, berita daring, dan referensi lainnya. Data utama diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, mencakup informasi mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum. Selain itu, data pendukung berasal dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian, dan sumber kredibel lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara data *cross section* dan data *time series*.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi beberapa variabel yang diambil dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2023. Pertama, data mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang mencerminkan proporsi perempuan yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Kedua, data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan yang

¹⁰⁰ Sugiyono, h.80.

¹⁰¹ Sugiyono, h.85.

menggambarkan tingkat pendidikan rata-rata yang ditempuh oleh perempuan di wilayah tersebut. Ketiga, data mengenai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK), yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Terakhir, data upah minimum regional yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota pada periode yang sama. Keempat jenis data ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel penelitian pada dasarnya merujuk pada segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti untuk dikaji guna memperoleh informasi mengenai aspek tersebut, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Secara teoritis, variabel dapat diartikan sebagai karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh seseorang atau suatu objek, yang dapat bervariasi antara individu satu dengan yang lain atau antara satu objek dengan objek lainnya.¹⁰² Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu sebagai berikut

1. Variabel Bebas (independen/stimulus/eksogen) yaitu variabel yang dapat memengaruhi atau menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen).¹⁰³ Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, serta upah minimum

- a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan (X_1)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. RLS perempuan merefleksikan tingkat pencapaian pendidikan yang telah ditempuh oleh perempuan di suatu daerah. Dalam penelitian ini, variabel RLS perempuan diukur dalam satuan tahun, berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2018 hingga 2023.

- b. Pertumbuhan ekonomi (X_2)

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi diproksikan melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan satuan juta rupiah untuk periode tahun 2018 hingga 2023

- c. Upah minimum (X_3)

Upah minimum merupakan jumlah upah bulanan terendah yang mencakup upah pokok beserta tunjangan tetap, yang ditetapkan oleh gubernur sebagai bentuk jaring pengaman. Dalam penelitian ini, variabel upah minimum diukur berdasarkan data upah

¹⁰² Sugiyono, h.38.

¹⁰³ Sugiyono, h.39.

minimum di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 2018 hingga 2023, dengan satuan rupiah per bulan.

2. Variabel Terikat (dependen/respon/endogen) yaitu variabel yang di pengaruhi atau menjadi akibat karena adanya keberadaan variabel bebas (independen).¹⁰⁴ Dalam penelitian ini, variabel terikat (dependen) yang digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Data yang dianalisis merupakan persentase TPAK perempuan dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018 hingga 2023.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Satuan	Sumber
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y)	Persentase perempuan usia kerja (≥ 15 tahun) yang bekerja atau aktif mencari kerja terhadap total jumlah penduduk perempuan usia kerja.	1. Angkatan kerja perempuan 2. Penduduk perempuan usia kerja	Persen	Badan Pusat Statistik
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan (X ₁)	Rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas.	1. Jumlah tahun sekolah formal yang telah ditempuh 2. Penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas	Tahun	Badan Pusat Statistik
3	Pertumbuhan Ekonomi (X ₂)	Perubahan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang diukur berdasarkan persentase perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) antar tahun.	1. Laju pertumbuhan PDRB ADHK	Persen	Badan Pusat Statistik
4	Upah Minimum (X ₃)	Jumlah terendah upah bulanan yang mencakup upah pokok dan tunjangan tetap, yang secara resmi ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pengupahan minimum di suatu wilayah.	1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Inflasi 4. Produktivitas tenaga kerja	Rupiah per bulan	Badan Pusat Statistik

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menyajikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya, tanpa bermaksud untuk menarik generalisasi atau kesimpulan yang berlaku secara luas. Jika penelitian dilakukan

¹⁰⁴ Ibid.

pada seluruh populasi tanpa menggunakan sampel, maka analisis yang digunakan pasti mengacu pada statistik deskriptif.¹⁰⁵ Statistik deskriptif menyajikan gambaran atau deskripsi suatu data melalui berbagai ukuran, seperti nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum, jumlah total (*sum*), rentang (*range*), serta karakteristik distribusi data yang mencakup kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).¹⁰⁶

3.5.2 Analisis Regresi Data Panel

3.5.2.1 Persamaan Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan metode analisis regresi yang digunakan untuk mengolah data yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi individu (*cross-section*) dan dimensi waktu (*time series*). Dengan kata lain, data panel merupakan kombinasi antara data *cross-section* dan *time series*, sehingga mampu menangkap perubahan antar individu maupun perubahan dalam satu individu dari waktu ke waktu.

Penelitian ini memanfaatkan metode regresi data panel sebagai alat analisis untuk mengkaji hubungan antar variabel yang diamati yaitu rata-rata lama sekolah perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Dalam model regresi, variabel Upah Minimum (UM) sering ditransformasi menggunakan logaritma natural (*ln*) karena memperbaiki distribusi data, mengurangi pengaruh *outlier*, serta mempermudah interpretasi koefisien regresi dalam bentuk elastisitas, yakni pengaruh perubahan persentase Upah Minimum terhadap TPAK perempuan. Berikut persamaan regresi data panel :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Maka, model empiris penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TPAKP_{it} = \beta_0 + \beta_1 RLSP_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 \ln(UM_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TPAKP	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
RLSP	= Rata-rata Lama Sekolah Perempuan
PE	= Pertumbuhan Ekonomi
UM	= Upah Minimum Kabupaten/Kota
ε	= Error term
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien masing-masing variabel independen
<i>ln</i>	= Logaritma natural
<i>i</i>	= Kabupaten/Kota
<i>t</i>	= Tahun (2018-2023)

¹⁰⁵ Sugiyono, h. 147.

¹⁰⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), h.19.

3.5.2.2 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Pada metode estimasi model regresi menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan bentuk paling dasar dalam analisis data panel, karena hanya menggabungkan elemen data time series dan cross-section tanpa memperhatikan variasi antar individu maupun perbedaan waktu. Model ini mengasumsikan bahwa perilaku setiap unit observasi, seperti perusahaan, bersifat homogen dan konstan sepanjang periode waktu yang diamati. Proses estimasinya dapat dilakukan dengan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) atau pendekatan kuadrat terkecil.

2. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa variasi antar individu dapat dijelaskan melalui perbedaan nilai intersep. Dalam analisis data panel, Fixed Effect Model (FEM) mengaplikasikan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar unit, seperti perusahaan. Faktor-faktor seperti budaya organisasi, sistem pengelolaan, dan kebijakan insentif dapat menjadi penyebab perbedaan tersebut. Meskipun demikian, nilai kemiringan (slope) diasumsikan tetap konstan untuk seluruh unit observasi. Pendekatan ini juga dikenal dengan istilah Least Squares Dummy Variable (LSDV).

3. Random Effect Model (REM)

Model ini diterapkan dalam analisis data panel dengan memperhitungkan kemungkinan adanya korelasi antara error term, baik lintas waktu maupun antar individu. Pada pendekatan Random Effect Model (REM), variasi intersep antarsatuan cross-section ditangani melalui komponen error masing-masing unit observasi. Salah satu kelebihan dari model ini adalah kemampuannya dalam menangani masalah heteroskedastisitas. Model ini juga sering disebut sebagai Error Component Model (ECM) dan umumnya diestimasi menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Agus Tri Basuki and Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), h.252-253.

3.5.2.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pada pemilihan model regresi data panel terdapat tiga macam pengujian guna menentukan model estimasi yang tepat dalam menganalisis regresi data panel, yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Jika hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima (nilai probabilitas $> 0,05$), maka Common Effect Model dianggap sebagai model yang lebih tepat. Namun, jika hipotesis nol ditolak (nilai probabilitas $< 0,05$), maka Fixed Effect Model yang lebih sesuai, dan proses pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dalam analisis data panel. Apabila nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak ditolak dan REM dianggap sebagai model yang lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, sehingga FEM dipilih sebagai model yang sesuai. Selain itu, apabila hasil pengujian Chow dan Hausman sama-sama menunjukkan bahwa model terbaik adalah Fixed Effect, maka tidak diperlukan lagi pengujian menggunakan metode Lagrange Multiplier (LM).

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai dalam analisis data panel, yaitu antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak ditolak, sehingga model Common Effect dinilai lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, dan model Random Effect dianggap lebih sesuai untuk digunakan.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah distribusi data dalam suatu variabel atau kelompok data mengikuti pola distribusi normal. Salah satu metode yang

sering digunakan dalam pengujian ini adalah uji Jarque-Bera (JB). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas hasil perhitungan JB dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas tersebut melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitasnya berada di bawah 0,05, maka data residual dianggap tidak berdistribusi normal dan asumsi normalitas tidak terpenuhi.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menganalisis hubungan antar variabel independen dalam matriks korelasi. Jika terdapat korelasi yang sangat tinggi (umumnya di atas 0,8) antara dua atau lebih variabel independen, maka ada indikasi multikolinearitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki keterkaitan yang kuat, sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, mengidentifikasi multikolinearitas dalam analisis regresi sangat penting untuk mencegah bias dan kesalahan dalam estimasi parameter.

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R Square) berfungsi untuk menilai seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Nilai R Square yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kontribusi yang besar dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Meski demikian, R Square memiliki keterbatasan, karena nilainya cenderung meningkat seiring dengan penambahan jumlah variabel independen, meskipun variabel tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, digunakan Adjusted R Square sebagai alternatif, karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan jumlah observasi, sehingga menghasilkan ukuran yang lebih akurat dalam menggambarkan kecocokan model terhadap data.

3.5.4.2 Uji t atau Uji Parsial

Uji t (parsial) merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) hasil estimasi dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Umumnya, tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji t adalah 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat atau dikatakan tidak signifikan.
2. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat atau dikatakan signifikan atau dikatakan signifikan.

3.5.4.3 Uji F atau Uji Simultan

Menurut Ghozali (2012), uji F atau yang sering disebut uji simultan digunakan untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel independen dalam suatu model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F-Statistik. Jika nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Gambar 4. 1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Wikipedia Commons

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan sejumlah wilayah, yakni Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Laut Jawa di utara. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah ini berada pada koordinat antara 5°40' hingga 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur. Kondisi topografi Provinsi Jawa Tengah cukup beragam, meliputi kawasan pantai, dataran rendah, serta wilayah dataran tinggi dan pegunungan yang tersebar di berbagai daerah administratif. Luas total wilayah provinsi ini mencapai 32.800,69 km².

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ini resmi terbentuk pada 4 Juli 1950, sementara hari jadinya diperingati setiap tanggal 19 Agustus. Dari segi administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 daerah otonom yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Semarang. Berikut ini disajikan daftar 35 kabupaten/kota beserta kode wilayahnya.

Tabel 4. 1 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota
1	3301	Kab. Cilacap
2	3301	Kab. Banyumas
3	3301	Kab. Purbalingga
4	3304	Kab. Banjarnegara

No	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota
5	3305	Kab. Kebumen
6	3306	Kab. Purworejo
7	3307	Kab. Wonosobo
8	3308	Kab. Magelang
9	3309	Kab. Boyolali
10	3310	Kab. Klaten
11	3311	Kab. Sukoharjo
12	3312	Kab. Wonogiri
13	3313	Kab. Karanganyar
14	3314	Kab. Sragen
15	3315	Kab. Grobogan
16	3316	Kab. Blora
17	3317	Kab. Rembang
18	3318	Kab. Pati
19	3319	Kab. Kudus
20	3320	Kab. Jepara
21	3321	Kab. Demak
22	3322	Kab. Semarang
23	3323	Kab. Temanggung
24	3324	Kab. Kendal
25	3325	Kab. Batang
26	3326	Kab. Pekalongan
27	3327	Kab. Pemalang
28	3328	Kab. Tegal
29	3329	Kab. Brebes
30	3371	Kota Magelang
31	3372	Kota Surakarta
32	3373	Kota Salatiga
33	3374	Kota Semarang
34	3375	Kota Pekalongan
35	3376	Kota Tegal

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah memiliki dinamika partisipasi angkatan kerja yang menarik untuk diteliti, khususnya dari sisi perempuan dari aspek ketenagakerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan perhatian terhadap isu kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan dunia kerja. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap, keberagaman kondisi sosial ekonomi, serta tingginya populasi perempuan usia kerja. Dengan demikian, provinsi ini menjadi wilayah yang representatif untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja.¹⁰⁸ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana perempuan berperan dalam aktivitas ekonomi melalui keterlibatan mereka di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja, pencari kerja, maupun individu yang mempersiapkan usaha. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua tertinggi rata-rata TPAK perempuan di Pulau Jawa periode 2018-2023. TPAK perempuan di Jawa Tengah selama periode 2018-2023 menunjukkan kenaikan yang positif meskipun pertumbuhannya cenderung lambat kecuali di tahun 2019 yang mengalami penurunan. Berikut data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.

Tabel 4. 2 TPAK Perempuan Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	TPAK Perempuan (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	47.70	47.10	52.45	46.99	49.83	48.11
2	Kabupaten Banyumas	52.59	51.27	51.74	49.95	47.91	46.08
3	Kabupaten Purbalingga	58.18	54.82	55.26	55.42	62.50	62.14
4	Kabupaten Banjarnegara	57.63	55.72	54.47	54.61	58.21	56.74
5	Kabupaten Kebumen	52.15	56.00	57.67	55.59	60.96	62.49
6	Kabupaten Purworejo	55.44	52.32	60.14	62.57	61.29	63.86
7	Kabupaten Wonosobo	60.51	57.60	58.18	58.66	60.79	59.77
8	Kabupaten Magelang	62.02	64.06	68.31	66.40	72.78	71.27
9	Kabupaten Boyolali	62.45	62.20	65.41	65.93	66.34	63.99
10	Kabupaten Klaten	55.72	58.23	56.59	56.54	56.96	52.69
11	Kabupaten Sukoharjo	57.87	56.67	57.99	58.75	58.14	57.05
12	Kabupaten Wonogiri	65.75	55.78	64.64	63.58	64.68	74.80
13	Kabupaten Karanganyar	60.41	58.42	63.42	64.72	57.62	59.88
14	Kabupaten Sragen	54.36	54.76	58.74	62.41	58.10	58.37
15	Kabupaten Grobogan	60.46	52.76	59.18	61.13	57.94	62.70
16	Kabupaten Blora	61.25	53.46	58.06	57.49	63.77	68.88
17	Kabupaten Rembang	55.15	50.29	51.17	57.49	61.82	58.22
18	Kabupaten Pati	53.11	50.17	52.02	56.26	57.88	59.62
19	Kabupaten Kudus	64.11	61.57	66.59	67.86	59.99	63.47
20	Kabupaten Jepara	55.46	54.20	56.66	55.75	52.85	57.81
21	Kabupaten Demak	59.84	54.43	56.52	51.75	52.29	57.99
22	Kabupaten Semarang	64.49	64.58	66.38	63.29	66.87	66.37

¹⁰⁸ Rizky Amalia Yulianti and Vita Ratnasari, 'Pemetaan Dan Pemodelan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Model Probit', *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2.2 (2013), h. 159.

No	Kabupaten/Kota	TPAK Perempuan (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
23	Kabupaten Temanggung	61.49	64.73	57.82	61.88	65.26	65.91
24	Kabupaten Kendal	50.57	55.52	58.64	58.80	61.44	65.11
25	Kabupaten Batang	56.69	54.65	53.24	57.45	61.51	64.71
26	Kabupaten Pekalongan	57.94	58.43	57.63	58.33	58.01	56.27
27	Kabupaten Pemalang	49.18	49.36	50.48	52.14	55.78	52.33
28	Kabupaten Tegal	49.19	51.38	51.25	53.46	51.63	52.36
29	Kabupaten Brebes	52.64	50.22	52.47	50.57	51.69	50.08
30	Kota Magelang	60.99	57.33	59.85	59.98	58.30	61.10
31	Kota Surakarta	56.68	59.77	59.04	56.51	58.25	57.66
32	Kota Salatiga	66.88	57.00	62.76	64.14	63.23	62.98
33	Kota Semarang	54.28	57.43	60.48	59.42	58.59	60.64
34	Kota Pekalongan	60.59	62.14	59.34	65.93	57.47	63.96
35	Kota Tegal	53.30	58.17	53.97	55.63	53.62	50.89
36	Jawa Tengah	56,43	55,35	57,54	57,58	58,31	58,92

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 4.2, berikut merupakan rincian daerah dengan nilai TPAK perempuan tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023:

1. Pada tahun 2018, Kabupaten Cilacap mencatatkan TPAK perempuan terendah sebesar 47,70%, sedangkan Kota Salatiga menunjukkan angka TPAK perempuan tertinggi sebesar 66,88%.
2. Pada tahun 2019, TPAK perempuan terendah masih dari Kabupaten Cilacap sebesar 47,10%, sedangkan TPAK perempuan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Temanggung sebesar 64,73%.
3. Pada tahun 2020, TPAK perempuan terendah berpindah ke Kabupaten Pemalang sebesar 50.48%, sedangkan TPAK perempuan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Magelang sebesar 68,31%.
4. Pada tahun 2021, TPAK perempuan terendah berpindah kembali ke Kabupaten Cilacap sebesar 46,99%, sedangkan TPAK perempuan tertinggi ditempati Kabupaten Kudus sebesar 67,86%.
5. Pada tahun 2022, TPAK perempuan terendah ditempati oleh Kabupaten Banyumas sebesar 47,91%, sedangkan TPAK perempuan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Magelang sebesar 72,78%.
6. Pada tahun 2023, TPAK perempuan terendah kembali ditempati Kabupaten Banyumas sebesar 46,08%, sedangkan tertinggi ditempati Kabupaten Wonogiri sebesar 74,80%.

4.2.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mengukur jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Perhitungan RLS mencakup penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut seseorang umumnya telah menyelesaikan pendidikannya. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan mencerminkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh perempuan dalam suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilai RLS menunjukkan semakin baik akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesetaraan gender. RLS perempuan di Provinsi Jawa Tengah termasuk rendah dan belum sesuai dengan program pemerintah yang mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Pada Tabel 1.3, diketahui bahwa RLS Perempuan di Provinsi Jawa Tengah cukup rendah dengan rata-rata 7,28 tahun selama periode 2018-2023. Berikut data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.

Tabel 4. 3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (Tahun)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	6.45	6.47	6.49	6.76	6.77	6.97
2	Kabupaten Banyumas	7.12	7.14	7.24	7.35	7.53	7.54
3	Kabupaten Purbalingga	6.59	6.76	6.87	6.95	7.09	7.11
4	Kabupaten Banjarnegara	6.09	6.32	6.57	6.58	6.59	6.61
5	Kabupaten Kebumen	6.87	7.09	7.10	7.11	7.42	7.43
6	Kabupaten Purworejo	7.34	7.49	7.70	7.89	8.00	8.01
7	Kabupaten Wonosobo	6.50	6.51	6.61	6.62	6.63	6.71
8	Kabupaten Magelang	7.17	7.28	7.29	7.30	7.32	7.38
9	Kabupaten Boyolali	6.85	6.94	7.25	7.26	7.51	7.52
10	Kabupaten Klaten	7.65	7.77	8.07	8.33	8.62	8.68
11	Kabupaten Sukoharjo	8.41	8.67	8.87	8.88	9.17	9.47
12	Kabupaten Wonogiri	6.49	6.71	6.80	6.81	7.05	7.32
13	Kabupaten Karanganyar	7.91	7.93	8.02	8.07	8.36	8.60
14	Kabupaten Sragen	6.60	6.61	6.93	6.97	7.27	7.38
15	Kabupaten Grobogan	6.14	6.34	6.50	6.51	6.76	6.77
16	Kabupaten Blora	5.96	6.06	6.30	6.58	6.60	6.82
17	Kabupaten Rembang	6.41	6.61	6.68	6.82	6.94	7.24
18	Kabupaten Pati	6.64	6.69	6.91	7.13	7.49	7.50
19	Kabupaten Kudus	8.09	8.10	8.18	8.27	8.59	8.87
20	Kabupaten Jepara	6.80	6.81	7.12	7.37	7.69	7.86
21	Kabupaten Demak	6.82	6.91	7.22	7.42	7.69	7.78
22	Kabupaten Semarang	7.44	7.62	7.63	7.75	7.76	7.83
23	Kabupaten Temanggung	6.72	6.80	7.01	7.02	7.28	7.46

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (Tahun)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
24	Kabupaten Kendal	6.47	6.63	6.84	6.89	7.16	7.34
25	Kabupaten Batang	6.16	6.17	6.53	6.54	6.55	6.77
26	Kabupaten Pekalongan	6.31	6.56	6.57	6.85	7.14	7.15
27	Kabupaten Pemalang	5.75	5.92	5.94	6.10	6.15	6.20
28	Kabupaten Tegal	6.09	6.31	6.32	6.48	6.79	6.88
29	Kabupaten Brebes	5.37	5.38	5.45	5.55	5.83	5.90
30	Kota Magelang	9.95	9.96	10.16	10.42	10.75	11.06
31	Kota Surakarta	10.01	10.09	10.30	10.54	10.56	10.81
32	Kota Salatiga	9.93	9.94	10.06	10.32	10.64	10.94
33	Kota Semarang	10.14	10.15	10.16	10.44	10.46	10.47
34	Kota Pekalongan	8.22	8.50	8.78	8.97	8.98	9.21
35	Kota Tegal	7.71	7.82	8.02	8.28	8.57	8.83
36	Jawa Tengah	6,87	7,03	7,24	7,34	7,55	7,62

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 4.3, berikut merupakan rincian daerah dengan nilai RLS perempuan tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023:

1. Pada tahun 2018, Kabupaten Brebes mencatatkan RLS perempuan terendah sebesar 5,37 tahun, sedangkan Kota Semarang menunjukkan angka RLS perempuan tertinggi sebesar 10,14 tahun.
2. Pada tahun 2019, RLS perempuan terendah masih dari Kabupaten Brebes sebesar 5,38 tahun, sedangkan RLS perempuan tertinggi masih ditempati oleh Kota Semarang sebesar 10,15 tahun.
3. Pada tahun 2020, RLS perempuan terendah masih ditempati Kabupaten Brebes sebesar 5,45 tahun, sedangkan RLS perempuan tertinggi ditempati oleh Kota Surakarta sebesar 10,30 tahun.
4. Pada tahun 2021, RLS perempuan terendah masih Kabupaten Brebes sebesar 5,55 tahun, sedangkan RLS perempuan tertinggi masih ditempati Kota Surakarta sebesar 10,54 tahun.
5. Pada tahun 2022, RLS perempuan terendah masih Kabupaten Brebes sebesar 5,83 tahun, sedangkan RLS perempuan tertinggi ditempati oleh Kota Magelang sebesar 10.75 tahun.
6. Pada tahun 2023, RLS perempuan terendah kembali ditempati Kabupaten Brebes sebesar 5.90 tahun, sedangkan RLS perempuan tertinggi kembali ditempati Kota Magelang sebesar 11,06 tahun.

4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB ADHK adalah persentase perubahan PDRB ADHK dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang mencerminkan seberapa cepat ekonomi suatu wilayah

berkembang atau mengalami kontraksi. PDRB ADHK sendiri mencerminkan ukuran absolut dari nilai tambah barang dan jasa dalam suatu periode, sedangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK menunjukkan perubahan relatif dari ukuran tersebut sehingga dapat menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi secara lebih jelas. Dengan demikian, laju pertumbuhan PDRB ADHK memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.

Tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan gangguan besar pada berbagai sektor ekonomi, terutama perdagangan, pariwisata, transportasi, industri manufaktur, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penutupan tempat usaha, serta penurunan mobilitas masyarakat mengakibatkan turunnya permintaan konsumsi dan investasi secara drastis. Hal ini tercermin pada laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang mengalami kontraksi signifikan. PDRB ADHK menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi tanpa dipengaruhi oleh inflasi, sehingga penurunan tajam pada indikator ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi secara fisik memang mengalami pelemahan serius di hampir seluruh sektor. Gangguan terhadap produktivitas dan rantai pasok juga memperburuk kondisi ini, sehingga menyebabkan hampir seluruh daerah mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun tersebut. Berikut data pertumbuhan ekonomi di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK selama periode 2018-2023.

Tabel 4. 4 Laju Pertumbuhan ADHK Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	2.99	2.27	-10.28	2.15	5.15	5.34
2	Kabupaten Banyumas	6.45	6.32	-1.65	4.00	5.86	5.40
3	Kabupaten Purbalingga	5.42	5.64	-1.18	3.19	5.41	4.51
4	Kabupaten Banjarnegara	5.67	5.60	-1.32	3.26	5.29	4.98
5	Kabupaten Kebumen	5.53	5.52	-1.45	3.71	5.79	5.66
6	Kabupaten Purworejo	5.33	5.44	-1.61	3.31	5.36	5.07
7	Kabupaten Wonosobo	5.06	5.57	-1.64	3.68	5.02	4.30
8	Kabupaten Magelang	5.28	5.30	-1.67	3.48	5.46	5.04
9	Kabupaten Boyolali	5.72	5.96	-1.20	4.63	6.33	5.62
10	Kabupaten Klaten	5.47	5.48	-1.17	3.82	5.90	5.70
11	Kabupaten Sukoharjo	5.79	5.92	-1.70	3.82	5.61	5.06
12	Kabupaten Wonogiri	5.41	5.14	-1.41	3.35	5.63	4.98
13	Kabupaten Karanganyar	5.98	5.76	-1.87	3.59	5.86	5.53

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
14	Kabupaten Sragen	5.75	5.90	-1.81	3.75	5.76	5.23
15	Kabupaten Grobogan	5.83	5.37	-1.57	3.78	5.98	4.99
16	Kabupaten Blora	4.38	4.05	-4.56	3.68	2.66	3.11
17	Kabupaten Rembang	5.89	5.20	-1.49	3.85	5.55	5.20
18	Kabupaten Pati	5.71	5.81	-1.16	3.38	5.56	5.02
19	Kabupaten Kudus	3.24	3.09	-3.11	-1.54	2.21	2.19
20	Kabupaten Jepara	5.85	6.02	-1.92	4.63	5.95	5.17
21	Kabupaten Demak	5.40	5.36	-0.23	2.62	5.25	5.01
22	Kabupaten Semarang	5.67	5.39	-2.67	3.63	5.31	4.74
23	Kabupaten Temanggung	5.13	5.05	-2.13	3.34	5.20	5.01
24	Kabupaten Kendal	5.77	5.71	-1.51	3.89	5.68	5.56
25	Kabupaten Batang	5.72	5.39	-1.29	4.88	5.97	5.53
26	Kabupaten Pekalongan	5.76	5.35	-1.89	3.54	5.11	5.14
27	Kabupaten Pemalang	5.69	5.80	-0.61	4.28	5.08	4.14
28	Kabupaten Tegal	5.51	5.56	-1.48	3.71	5.13	4.93
29	Kabupaten Brebes	5.26	5.76	-0.47	2.57	5.5	3.74
30	Kota Magelang	5.46	5.41	-2.45	3.20	5.77	5.45
31	Kota Surakarta	5.75	5.78	-1.76	4.01	6.25	5.57
32	Kota Salatiga	5.84	5.90	-1.68	3.35	5.53	5.34
33	Kota Semarang	6.48	6.81	-1.85	5.16	5.73	5.79
34	Kota Pekalongan	5.69	5.50	-1.87	3.59	5.76	5.44
35	Kota Tegal	5.87	5.77	-2.29	3.12	5.16	5.01
36	Jawa Tengah	5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 4.4, berikut merupakan rincian daerah dengan nilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023:

1. Pada tahun 2018, Kabupaten Cilacap mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 2,99%, sedangkan Kota Semarang menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,48%.
2. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi terendah masih dari Kabupaten Cilacap sebesar 2,27%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi kembali ditempati oleh Kota Semarang sebesar 6,81%.
3. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terendah masih di Kabupaten Cilacap sebesar -10,28%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Demak sebesar -0,23%. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif di tahun ini.
4. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi terendah masih ditempati Kabupaten Kudus dengan pertumbuhan ekonomi yang masih negatif sebesar -1,54%, sedangkan

pertumbuhan ekonomi tertinggi ditempati Kota Semarang sebesar 5,16%.

5. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terendah kembali ditempati oleh Kabupaten Kudus sebesar 2,21%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Boyolali sebesar 6,33%.
6. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi terendah masih ditempati Kabupaten Kudus sebesar 2,19%, sedangkan tertinggi ditempati Kota Semarang sebesar 5,79%.

4.2.4 Upah Minimum

Upah minimum pada tingkat regional terdiri atas dua jenis, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMP berfungsi sebagai dasar penetapan UMK di masing-masing daerah, di mana nilai UMK tidak diperbolehkan lebih rendah dari UMP. Dengan demikian, peningkatan UMP secara langsung memengaruhi kenaikan UMK di wilayah terkait. Di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki UMP terendah. Setiap tahunnya, UMK di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Kenaikan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah. Secara umum, UMK di wilayah Jawa Tengah menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Berikut ini disajikan data upah minimum di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tersebut.

Tabel 4. 5 Upah Minimum Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Kab./Kota	Upah Minimum (Rupiah)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Cilacap	1841209	1989058.08	2158327	2228904	2230731	2383090
2	Kab. Banyumas	1589000	1750000	1900000	1970000	1983261	2118124
3	Kab. Purbalingga	1655200	1788500	1940800	1988000	1996814	2130981
4	Kab. Banjarnegara	1490000	1610000	1748000	1805000	1819835	1958170
5	Kab. Kebumen	1560000	1686000	1835000	1895000	1906781	2035890
6	Kab. Purworejo	1573000	1700000	1845000	1905400	1911850	2043902
7	Kab. Wonosobo	1585000	1712500	1859000	1920000	1931285	2076209
8	Kab. Magelang	1742000	1882000	2042200	2075000	2081807	2236777
9	Kab. Boyolali	1651650	1790000	1942500	2000000	2010299	2155712
10	Kab. Klaten	1661632.35	1795061.43	1947821.16	2011515	2015623	2152323
11	Kab. Sukoharjo	1648000	1783500	1938000	1986450	1998153	2138248
12	Kab. Wonogiri	1542000	1655000	1797000	1827000	1839043	1968448
13	Kab. Karanganyar	1696000	1833000	1989000	2054040	2064313	2207484
14	Kab. Sragen	1546492.72	1673500	1815914.85	1829500	1839429	1969569

15	Kab. Grobogan	1560000	1685500	1830000	1890000	1894032	2029569
16	Kab. Blora	1564000	1690000	1834000	1894000	1904196	2040080
17	Kab. Rembang	1535000	1660000	1802000	1861000	1874322	2015927
18	Kab. Pati	1585000	1742000	1891000	1953000	1968339	2107697
19	Kab. Kudus	1892500	2044467.75	2218451.95	2290995	2293058	2439814
20	Kab. Jepara	1739360	1879031	2040000	2107000	2108403	2272627
21	Kab. Demak	2065490	2240000	2432000	2511526	2513005	2680421
22	Kab. Semarang	1900000	2055000	2229880.5	2302798	2311254	2480988
23	Kab. Temanggung	1557000	1682027.1	1825200	1885000	1887832	2027569
24	Kab. Kendal	1929458	2084393.48	2261775	2335735	2340312	2508300
25	Kab. Batang	1749900	1900000	2061700	2129117	2135535	2282026
26	Kab. Pekalongan	1721637.55	1859885.05	2018161.27	2084155	2094646	2247346
27	Kab. Pemalang	1588000	1718000	1865000	1926000	1940890	2081783
28	Kab. Tegal	1617000	1747000	1896000	1958000	1968446	2106238
29	Kab. Brebes	1542000	1665850	1807614	1866723	1885019	2018837
30	Kota Magelang	1580000	1707000	1853000	1914000	1935913	2066007
31	Kota Surakarta	1668700	1802700	1956200	2013810	2035720	2174169
32	Kota Salatiga	1735930.06	1875325.24	2034915.42	2101457	2128523	2284180
33	Kota Semarang	2310087.5	2498587.53	2715000	2810025	2835021	3060349
34	Kota Pekalongan	1765178.63	1906922.47	2072000	2139754	2156213	2305823
35	Kota Tegal	1630500	1762000	1925000	1982750	2005930	2145012
36	Jawa Tengah	1367000	1605396	1742015	1798979	1812935	1958169

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 4.5, upah minimum tertinggi ditempati Kota Semarang sebagai urutan pertama, disusul Kabupaten Demak urutan kedua, dan urutan ketiga ditempati oleh Kabupaten Kendal. Upah minimum terendah ditempati Kabupaten Banjarnegara sebagai urutan pertama, disusul Kabupaten Wonogiri yang menempati urutan kedua, dan urutan ketiga ditempati oleh Kabupaten Sragen.

4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan ringkasan umum terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai maksimum dan minimum dari masing-masing variabel.. Pengolahan data dilakukan menggunakan software EViews 12 untuk memperoleh nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Untuk mempermudah proses pengolahan data dan interpretasi hasil di EViews 12, masing-masing variabel dalam penelitian ini telah diberi nama singkat. Penamaan ini digunakan secara konsisten dalam seluruh Tabel dan *output* hasil analisis. Adapun penamaan variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. TPAK mewakili variabel terikat (Y) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) perempuan.
2. RLSP mewakili variabel bebas (X_1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan.
3. PE mewakili variabel bebas (X_2) pertumbuhan ekonomi.
4. UM mewakili variabel bebas (X_3) upah minimum

. Uraian deskriptif dalam penelitian ini mencakup seluruh variabel yang diteliti, mencakup variabel dependen dan independen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sedangkan variabel independennya terdiri dari rata-rata lama sekolah perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum. Adapun hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	TPAKP*	RLSP	PE	UM
Mean	58.12452	7.523714	3.806571	1964035.
Median	58.00000	7.155000	5.155000	1939400.
Maximum	74.80000	11.06000	6.810000	3060349.
Minimum	46.08000	5.370000	-10.28000	1490000.
Std. Dev.	5.238384	1.278720	2.848139	258833.3
Skewness	0.170873	1.072336	-1.707268	0.942931
Kurtosis	2.882506	3.445612	5.614327	4.814045
Jarque-Bera	1.142712	41.98412	161.8204	59.91333
Probability	0.564759	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	12206.15	1579.980	799.3800	4.12E+08
Sum Sq. Dev.	5735.099	341.7413	1695.387	1.40E+13
Observations	210	210	210	210

Sumber: *Output EViews 12*, data diolah 2025

Tabel 4.6 menyajikan statistik deskriptif dari seluruh variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 210 observasi yang berasal dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 6 tahun yaitu dari tahun 2018 hingga 2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai Tabel 4.5 disajikan sebagai berikut:

1. Variabel dependen (Y) tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) berjumlah 210 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan pada periode 2018-2023 rata-rata TPAK perempuan sebesar 58,12452%, nilai maksimum sebesar 74,80000%, nilai minimum sebesar 46,08000%, dan nilai standar deviasi sebesar 5,238384%.
2. Variabel independen (X_1) rata-rata lama sekolah perempuan (RLSP) berjumlah 210

sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan pada periode 2018-2023 rata-rata RLS perempuan sebesar 7,523714 tahun, nilai maksimum sebesar 11,06000 tahun, nilai minimum sebesar 5,370000 tahun, dan nilai standar deviasi sebesar 1,278720 tahun.

3. Variabel independen (X_2) pertumbuhan ekonomi berjumlah 210 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan pada periode 2018-2023 rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3.806571%, nilai maksimum sebesar 6.810000%, nilai minimum sebesar -10.28000%, dan nilai standar deviasi sebesar 2.848139%.
4. Variabel independen (X_3) upah minimum berjumlah 210 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan pada periode 2018-2023 rata-rata upah minimum sebesar Rp 1.964.035, nilai maksimum sebesar Rp 3.060.349, nilai minimum sebesar Rp 1.490.000, dan nilai standar deviasi sebesar 2.848.139.

4.3.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan dalam analisis regresi data panel, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Setiap pendekatan didasarkan pada asumsi tertentu serta memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Pemilihan model yang paling tepat sangat bergantung pada sifat data dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Oleh karena itu, sebagai tahap awal, estimasi dilakukan dengan ketiga model tersebut untuk membandingkan hasilnya. Model yang menunjukkan kesesuaian terbaik dengan karakteristik data akan dipilih sebagai model akhir dalam penelitian ini. Berikut ini disajikan hasil estimasi menggunakan Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect Model:

1. Common Effect Model (CEM)

Tabel 4. 7 Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.650679	43.08299	-0.131158	0.8958
RLSP	0.992864	0.299700	3.312864	0.0011
PE	-0.032862	0.124225	-0.264537	0.7916
LOG(UM)	3.896501	3.030128	1.285920	0.1999
Root MSE	4.995197	R-squared		0.086342
Mean dependent var	58.12452	Adjusted R-squared		0.073036
S.D. dependent var	5.238384	S.E. of regression		5.043461
Akaike info criterion	6.092926	Sum squared resid		5239.919
Schwarz criterion	6.156681	Log likelihood		-635.7572
Hannan-Quinn criter.	6.118700	F-statistic		6.489103
Durbin-Watson stat	0.494790	Prob(F-statistic)		0.000324

Sumber: *Output* EViews 12, data diolah 2025

Tabel 4.7 menjelaskan hasil estimasi model regresi data panel dengan menggunakan Common Effect Model menghasilkan konstanta sebesar -5,650679 dengan probabilitas 0,8958. Selain itu, didapat nilai adjusted R^2 sebesar 0,073036 yang berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dipengaruhi oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum sebesar 7% dan sisanya sekitar 93% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 4. 8 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-147.3506	67.18997	-2.193045	0.0296
RLSP	-1.119852	1.677671	-0.667504	0.5053
PE	0.056198	0.084037	0.668732	0.5046
LOG(UM)	14.75503	5.396793	2.734036	0.0069
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	2.646136	R-squared	0.743609	
Mean dependent var	58.12452	Adjusted R-squared	0.688455	
S.D. dependent var	5.238384	S.E. of regression	2.923867	
Akaike info criterion	5.145983	Sum squared resid	1470.428	
Schwarz criterion	5.751650	Log likelihood	-502.3282	
Hannan-Quinn criter.	5.390832	F-statistic	13.48245	
Durbin-Watson stat	1.821463	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: *Ouput* EVIEWS 12, data diolah 2025

Tabel 4.8 menjelaskan hasil estimasi model regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model menghasilkan konstanta sebesar -147,3506 dengan probabilitas 0,0296. Selain itu, didapat nilai adjusted R^2 sebesar 0.688455 yang berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dipengaruhi oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum sebesar 68% dan sisanya sekitar 32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Random Effect Model (REM)

Tabel 4. 9 Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-75.98418	39.78903	-1.909677	0.0576
RLSP	0.686639	0.602361	1.139912	0.2556
PE	0.010775	0.075979	0.141816	0.8874
LOG(UM)	8.900636	2.929134	3.038658	0.0027
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			4.286357	0.6825
Idiosyncratic random			2.923867	0.3175
Weighted Statistics				
Root MSE	2.892307	R-squared		0.108456
Mean dependent var	15.59316	Adjusted R-squared		0.095472
S.D. dependent var	3.070502	S.E. of regression		2.920252
Sum squared resid	1756.742	F-statistic		8.353277
Durbin-Watson stat	1.496909	Prob(F-statistic)		0.000029
Unweighted Statistics				
R-squared	0.073595	Mean dependent var		58.12452
Sum squared resid	5313.026	Durbin-Watson stat		0.494950

Sumber: *Output* EVIEWS 12, data diolah 2025

Tabel 4.9 menjelaskan hasil estimasi model regresi data panel dengan menggunakan Random Effect Model menghasilkan konstanta sebesar -75,98418 dengan probabilitas 0,0576. Selain itu, didapat nilai adjusted R^2 sebesar 0,095472 yang berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dipengaruhi oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum sebesar 9% dan sisanya sekitar 91% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga uji yang digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat dalam menganalisis regresi data panel, yaitu melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Ketiga pengujian ini dilakukan secara berurutan guna memilih model terbaik di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan dan menentukan model yang lebih

tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Jika hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima (nilai probabilitas Cross-Section Chi Square $> 0,05$), maka Common Effect Model dianggap sebagai model yang lebih tepat. Namun, jika hipotesis nol (H_0) ditolak (nilai probabilitas Cross-Section Chi Square $< 0,05$), maka Fixed Effect Model yang lebih sesuai, dan proses pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.968468	(34,172)	0.0000
Cross-section Chi-square	266.858094	34	0.0000

Sumber: *Output* EViews 12, data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji Chow yang ditampilkan pada Tabel 4.10, diperoleh nilai probabilitas Cross-Section Chi Square sebesar 0,0000 yang kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis kerja (H_1) diterima. Artinya model yang terpilih yaitu Fixed Effect Model dan pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) lebih tepat dalam mengestimasi data panel. Jika hasil uji menunjukkan bahwa jika hipotesis nol (H_0) ditolak (nilai probabilitas Cross-Section Random $< 0,05$), maka Fixed Effect Model yang lebih sesuai. Namun, jika hipotesis nol (H_0) diterima (nilai probabilitas Cross-Section Random $> 0,05$), maka Random Effect Model yang lebih sesuai.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.490976	3	0.4769

Sumber: *Output* EViews 12, data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji Hausman yang dapat dilihat pada Tabel 4.11, diperoleh nilai probabilitas Cross-Section Random sebesar 0,4769 yang lebih dari 0,05 ($0,4769 > 0,05$),

maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis kerja (H_1) ditolak. Artinya, model yang terpilih yaitu Random Effect Model dan pengujian dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk menentukan apakah Common Effect Model (CEM) atau Random Effect Model (REM) lebih tepat dalam mengestimasi data panel. Jika hasil uji menunjukkan bahwa jika hipotesis nol (H_0) diterima (nilai probabilitas Breusch-Pagan Cross-section $> 0,05$), maka yang lebih sesuai Common Effect Model. Namun, jika hipotesis nol (H_0) ditolak (nilai probabilitas Breusch-Pagan Cross-section $< 0,05$), maka Random Effect Model yang lebih sesuai.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		Both
	Cross-section	Time	
Breusch-Pagan	223.2876 (0.0000)	0.079835 (0.7775)	223.3675 (0.0000)

Sumber: *Output EViews 12*, data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji LM yang ditampilkan pada Tabel 4.12, diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan pada Cross-section sebesar 0,0000 yang kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis kerja (H_1) diterima. Artinya, model yang terpilih yaitu Random Effect Model.

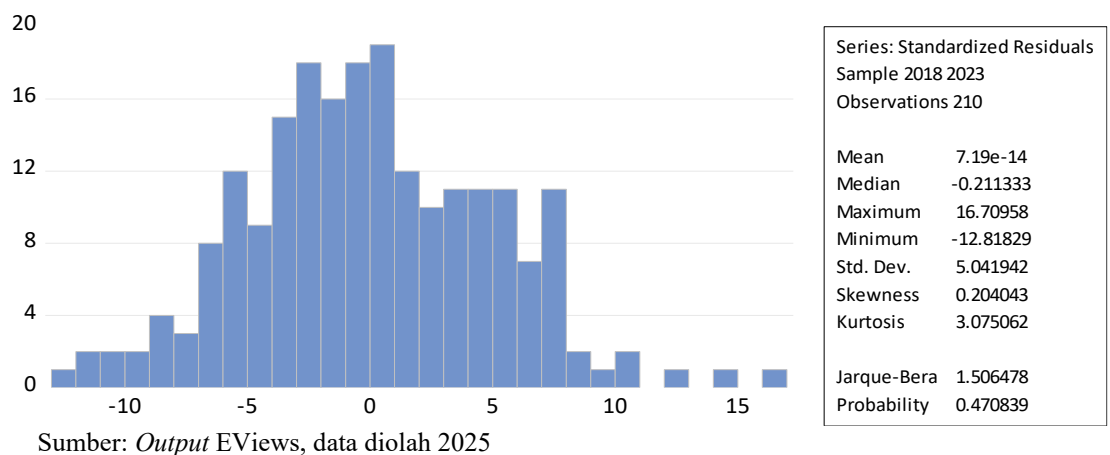
4.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan setelah pemilihan model regresi data panel dan model yang terpilih dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Berikut uji asumsi klasik yang dilakukan pada regresi data panel:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data dalam suatu variabel atau kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menguji normalitas adalah Jarque-Bera (JB) Test. Jika nilai probabilitas $JB > 0,05$, maka residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilainya $< 0,05$, maka residual tidak terdistribusi normal, sehingga tidak dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas



Tabel 4.13 menyajikan hasil uji normalitas pada model regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,470839 lebih besar dari 0,005 ($0,470839 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menganalisis hubungan antar variabel independen dalam matriks korelasi. Masalah multikolinearitas dapat terjadi jika koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8 yang berpotensi mengganggu keakuratan estimasi.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas

	RLSP	PE	LOG(UM)
RLSP	1.000000	0.054263	0.400586
PE	0.054263	1.000000	-0.122598
LOG(UM)	0.400586	-0.122598	1.000000

Sumber: *Output* EViews, data diolah 2025

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Hal tersebut karena nilai koefisien antar variabel independen kurang dari 0,8. Nilai koefisien korelasi antara X_1 (TPAK) dengan X_2 (PE) sebesar 0,054263 kurang dari 0,8. Nilai Koefisiensi korelasi X_1 (TPAK) dengan X_3 (UM) sebesar 0,400586 kurang dari 0,8. Nilai koefisien korelasi X_2 (PE) dengan X_3 (UM) sebesar -0,122598 kurang dari 0,8.

4.3.5 Uji Hipotesis

1. Regresi Data Panel

Tabel 4. 15 Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-75.98418	39.78903	-1.909677	0.0576
RLSP	0.686639	0.602361	1.139912	0.2556
PE	0.010775	0.075979	0.141816	0.8874
LOG(UM)	8.900636	2.929134	3.038658	0.0027
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		4.286357	0.6825	
Idiosyncratic random		2.923867	0.3175	
Weighted Statistics				
Root MSE	2.892307	R-squared	0.108456	
Mean dependent var	15.59316	Adjusted R-squared	0.095472	
S.D. dependent var	3.070502	S.E. of regression	2.920252	
Sum squared resid	1756.742	F-statistic	8.353277	
Durbin-Watson stat	1.496909	Prob(F-statistic)	0.000029	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.073595	Mean dependent var	58.12452	
Sum squared resid	5313.026	Durbin-Watson stat	0.494950	

Sumber: *Ouput* EViews 12, data diolah 2025

Berdasarkan hasil regresi panel dengan Random Effect Model yang ditampilkan pada Tabel 4.15, diperoleh hasil estimasi pengaruh variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Hasil estimasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$TPAK_{it} = -75,98418 + 0,686639RLSP_{it} + 0,010775PE_{it} + 8,900636ln(UM_{it}) + e_{it}$$

Berikut interpretasi persamaan regresi data panel di atas:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta sebesar $-75,98418$ dalam regresi ini menunjukkan bahwa apabila Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum semuanya bernilai nol, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar $-75,98418\%$. Namun, karena nilai-nilai tersebut tidak mungkin nol dalam konteks nyata dan TPAK tidak bisa bernilai negatif, maka konstanta ini tidak memiliki makna praktis secara langsung dan hanya berfungsi sebagai titik awal prediksi dalam model regresi.

b. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (X_1)

Koefisien regresi pada variabel Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RSLP) adalah sebesar 0,686639 yang berarti setiap kenaikan Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RSLP) sebesar 1 tahun, maka akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,686639 poin persentase dengan asumsi variabel independen lain dalam model dianggap konstan (*ceteris paribus*).

c. Pertumbuhan Ekonomi (X_2)

Koefisien regresi pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 0,010775 yang berarti setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 poin persentase, maka akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,010775 poin persentase dengan asumsi variabel independen lain dalam model dianggap konstan (*ceteris paribus*).

d. Upah Minimum (X_3)

Variabel upah minimum dalam regresi telah ditransformasi menggunakan logaritma natural, sehingga interpretasinya berubah dari perubahan absolut (dalam rupiah) menjadi perubahan relatif (persentase). Koefisien regresi pada variabel $\log(\text{Upah Minimum})$ adalah sebesar 8,900636, yang berarti bahwa setiap kenaikan upah minimum sebesar 1% akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sekitar sebesar 0,08900636 poin persentase ($8,900636 \times 0,01 = 0,08900636$), dengan asumsi variabel independen lain dalam model dianggap konstan (*ceteris paribus*).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen.

Tabel 4. 16 Hasil Uji R^2

Root MSE	2.892307	R-squared	0.108456
Mean dependent var	15.59316	Adjusted R-squared	0.095472
S.D. dependent var	3.070502	S.E. of regression	2.920252
Sum squared resid	1756.742	F-statistic	8.353277
Durbin-Watson stat	1.496909	Prob(F-statistic)	0.000029

Sumber: *Output* EVIEWS 12, data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.16, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,095472 atau 9,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum hanya mampu menjelaskan 9,5% variasi variabel dependen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode

penelitian dan sisanya 90,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model regresi.

3. Uji F atau Uji Simultan

Tabel 4. 17 Hasil Uji Simultan

Root MSE	2.892307	R-squared	0.108456
Mean dependent var	15.59316	Adjusted R-squared	0.095472
S.D. dependent var	3.070502	S.E. of regression	2.920252
Sum squared resid	1756.742	F-statistic	8.353277
Durbin-Watson stat	1.496909	Prob(F-statistic)	0.000029

Sumber: *Ouput* EViews 12, data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.17, diperoleh nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0,000029 yang berarti kurang dari 0,05 ($0,000029 < 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama (silmultan) variabel independen yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.

4. Uji t atau Uji Parsial

Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-75.98418	39.78903	-1.909677	0.0576
RLSP	0.686639	0.602361	1.139912	0.2556
PE	0.010775	0.075979	0.141816	0.8874
LOG(UM)	8.900636	2.929134	3.038658	0.0027

Sumber: *Ouput* EViews 12, data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji parsial yang ditampilkan pada Tabel 4.18, dapat diketahui bahwa pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- Variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan (X_1) memiliki nilai koefisien 0,686639 dan nilai probabilitas 0,2556 yang lebih besar dari 0,05 ($0,2556 > 0,05$). Artinya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.
- Variabel pertumbuhan ekonomi (X_2) memiliki nilai koefisien 0,010775 dan nilai probabilitas 0,8874 yang lebih besar dari 0,05 ($0,8874 > 0,05$). Artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023.
- Variabel upah minimum (X_3) yang sudah ditransformasi dalam bentuk logaritma

natural memiliki nilai koefisien 8,900636 dan nilai probabilitas 0,0027 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,0027 < 0,05$). Artinya upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan suatu wilayah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan mencerminkan akses dan partisipasi mereka dalam pendidikan, di mana semakin lama mereka menempuh pendidikan, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berdaya saing. Dalam *Human Capital Theory*, tingginya pendidikan berdampak pada kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, peningkatan produktivitas, serta peningkatan pendapatan. *Human Capital Theory* memandang pendidikan dan proses pembelajaran sebagai investasi dalam sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan produktivitas, mempersiapkan tenaga kerja, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan global.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada model regresi data panel, variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan (X_1) berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,686639 dan nilai probabilitas sebesar 0,2556 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,2556 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023, sehingga hipotesis kerja (H_1) ditolak.

Arah hubungan yang positif mencerminkan bahwa secara teori, semakin tinggi RLS perempuan, maka peluang mereka untuk masuk ke pasar kerja juga cenderung meningkat. Namun, ketidaksignifikanan pengaruh ini menunjukkan bahwa RLS perempuan yang mencerminkan tingkat pendidikan suatu wilayah. Lebih lanjut, dalam konteks lokal seperti di Jawa Tengah, banyak perempuan bekerja di sektor informal, seperti industri rumah tangga, UMKM, atau perdagangan kecil-kecilan. Di sektor ini, tingkat pendidikan formal tidak menjadi syarat utama. Misalnya, ibu rumah tangga yang memproduksi makanan rumahan atau berjualan dari rumah tetap bisa berpartisipasi dalam angkatan kerja

tanpa harus memiliki pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan RLS perempuan tidak serta-merta mendorong peningkatan TPAK perempuan. Menurut data BPS proporsi lapangan kerja informal yang menunjukkan persentase pekerja yang masuk ke sektor informal lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 19 Proporsi Lapangan Kerja Informal Di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Kelamin	Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laki-laki	53,90	52,81	57,29	56,61	56,03	55,81
2	Perempuan	61,90	60,81	63,35	63,80	64,43	62,45

Sumber : jateng.bps.go.id

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Uppun, dkk. (2024), yang menemukan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2005-2020. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal yang cenderung berskala kecil dan kurang terorganisir.¹⁰⁹ Penelitian ini selaras dengan temuan Muna (2023), yang menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di wilayah Pulau Jawa selama periode 2017–2022.

4.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) karena indikator ini tidak hanya mencerminkan besarnya ekonomi, tetapi juga seberapa cepat ekonomi tersebut tumbuh. Tenaga kerja menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja dapat memperbesar produktivitas dan *output*. Hal tersebut sesuai dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik Solow-Swan yang menekankan peran tenaga kerja sebagai salah satu faktor utama dalam proses produksi yang memengaruhi pertumbuhan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap tenaga kerja juga akan cenderung naik karena perluasan sektor-sektor ekonomi yang menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada model regresi data panel,

¹⁰⁹ Uppun, Fil'ardy, and Dwiyaniti.

variabel pertumbuhan ekonomi (X_2) berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap variabel TPAK perempuan (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,010775 dan nilai probabilitas 0,8874 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,8874 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023, sehingga hipotesis kerja (H_2) ditolak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum secara langsung mendorong keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode tersebut ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Namun, sektor-sektor ini memiliki keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja perempuan. Konstruksi dan industri berat, masih didominasi oleh pekerja laki-laki. Di sisi lain, sektor industri pengolahan dan perdagangan memang dikenal lebih terbuka terhadap tenaga kerja perempuan, namun peningkatan *output* di sektor ini lebih banyak didorong oleh efisiensi dan penggunaan teknologi dibandingkan dengan perluasan lapangan kerja, sehingga peningkatan output ekonomi tidak serta-merta meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja. Selain faktor struktural tersebut, partisipasi kerja perempuan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor endogen yang bersifat personal dan sosial. Faktor-faktor seperti status pernikahan, jumlah anak, pendapatan rumah tangga, beban kerja domestik, motivasi kerja, dan tingkat religiusitas memiliki peran penting dalam menentukan keputusan perempuan untuk bekerja. Oleh karena itu, tanpa adanya pendekatan kebijakan yang mampu menjawab tantangan-tantangan endogen tersebut, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mendorong peningkatan TPAK perempuan secara signifikan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari, dkk. (2024), yang menemukan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia periode 1991-2021. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi mendorong spesialisasi yang mengurangi permintaan tenaga kerja perempuan.¹¹⁰ Penelitian ini selaras dengan temuan Novita (2024), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 6 Provinsi di Pulau Jawa periode 2018-2022. Hal tersebut karena peningkatan ekonomi tidak secara langsung mendorong keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja dan ada faktor endogen yang lebih mendominasi, seperti norma sosial dan budaya, yang masih kuat dalam

¹¹⁰ Kurniasari, Gunarto, and Yuliawan.

menentukan peran gender tradisional.¹¹¹

4.4.3 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Upah memegang peran strategis bagi pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Bagi pekerja, upah merupakan sumber pendapatan sekaligus motivasi untuk bekerja, sedangkan bagi perusahaan dan pemerintah, upah memengaruhi efisiensi produksi dan distribusi kesejahteraan. Dalam Teori Penawaran Tenaga Kerja, kenaikan upah akan mendorong peningkatan penawaran tenaga kerja, sebagaimana tercermin dalam kurva penawaran yang memiliki *slope* positif. Efek substitusi yang muncul dari kenaikan upah menyebabkan individu, termasuk perempuan, lebih terdorong untuk bekerja karena waktu luang menjadi relatif lebih mahal. Dalam konteks ini, upah minimum yang lebih tinggi dapat menjadi insentif penting bagi perempuan untuk masuk ke pasar kerja, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP).

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang diperoleh melalui analisis regresi data panel, variabel upah minimum (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (Y). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 8,900636 dan nilai probabilitas 0,0027 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0027 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023, sehingga hipotesis kerja (H_2) diterima.

. Hasil penelitian menunjukkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAP perempuan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018–2023. Artinya, semakin tinggi upah minimum, semakin besar dorongan bagi perempuan untuk masuk atau bertahan dalam pasar kerja. Hal ini sesuai dengan teori penawaran tenaga kerja terkait efek substitusi, di mana kenaikan upah menjadikan bekerja lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan tidak bekerja. Kondisi ini terutama dirasakan oleh perempuan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang memiliki dorongan finansial untuk menambah pendapatan rumah tangga atau memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Kenaikan upah minimum juga memberi sinyal bahwa bekerja di sektor formal menjadi lebih layak dan menarik secara finansial. Hal tersebut berdampak pada semakin banyak perempuan baik yang sudah menikah, lajang, maupun yang baru lulus sekolah yang terdorong untuk bekerja. Perempuan dalam hal ini tidak lagi hanya sebagai pendukung

¹¹¹ Novita.

ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai kontributor utama dalam pembangunan ekonomi.

Penelitian ini selaras dengan temuan Harahap (2020), yang menemukan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap TPAK perempuan di Kabupaten Simalungun tahun 2012-2019. Hal tersebut karena Kenaikan upah minimum dalam masyarakat yang semakin tinggi berdampak pada masyarakat lebih tertarik masuk pasar kerja.¹¹² Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Amriani (2023) dan Balqist (2022), yang menemukan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.

4.5 Tinjauan terhadap Partisipasi Kerja Perempuan dalam Perspektif Islam

Partisipasi perempuan dalam ranah publik, khususnya di sektor ekonomi, semakin mengalami peningkatan pada masa kini. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja bukan lagi hal yang asing, melainkan telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Banyak perempuan yang turut serta dalam aktivitas ekonomi keluarga maupun berkarir secara mandiri, seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan berkembangnya kesempatan kerja yang terbuka luas bagi semua gender. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi di ruang publik, termasuk dalam dunia kerja dan karir profesional.

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja atau berkontribusi di ranah publik, selama dilakukan dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam ajaran Islam, peran utama menafkahi keluarga memang berada di tangan suami, tetapi perempuan juga boleh membantu suami dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan apabila kondisi mendesak. Istri-istri Nabi Muhammad Saw., seperti Siti Aisyah dan Khadijah juga berperan dalam mendukung perekonomian keluarga. Islam menekankan pentingnya tolong-menolong antar sesama muslim, termasuk dalam lingkup keluarga. Selama perempuan menjaga adab, menunaikan kewajiban rumah tangga, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, maka bekerja bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga bisa bernilai ibadah. Islam tidak memandang bahwa peran domestik dan publik saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara seimbang dan saling melengkapi.¹¹³ Dalam perspektif Islam, partisipasi perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam dunia kerja atau angkatan kerja, merupakan hal yang diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan tetap menjaga adab serta tanggung jawab utamanya sebagai istri dan ibu.

Islam tidak membatasi perempuan untuk berkarya atau berkontribusi di luar rumah, justru

¹¹² Harahap.

¹¹³ Asriaty, 'Wanita Karir Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Al-Maiyyah*, 7.2 (2014), h. 180.

membuka peluang bagi mereka untuk turut mengambil peran dalam pembangunan masyarakat. Salah satu sektor penting yang mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia kerja adalah faktor ekonomi, di mana perempuan sering kali terdorong untuk bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama di kalangan menengah ke bawah. Selain itu, aktualisasi diri juga menjadi pendorong perempuan bekerja untuk mengamalkan ilmu, mewujudkan cita-cita, serta memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang diraih.¹¹⁴

Sejarah Islam mencatat banyak tokoh perempuan yang tampil aktif di ruang publik, khususnya dalam bidang ekonomi. Siti Khadijah binti Khuwaylid, istri Nabi Muhammad SAW, adalah contoh nyata perempuan sukses yang terlibat langsung dalam dunia perdagangan sebagai seorang pebisnis dan pengelola usaha besar. Selain itu, Zainab binti Jahsy bekerja sebagai penyamak kulit, Ummu Salim sebagai perias pengantin, dan Al-Syifa' bahkan dipercaya Khalifah Umar bin Khattab untuk mengelola pasar Madinah karena kecakapannya dalam literasi dan manajemen. Kisah lain juga menyebutkan istri Abdullah ibn Mas'ud yang turut berwirausaha demi menopang ekonomi keluarga. Semua ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di sektor ekonomi, selama tetap memperhatikan nilai-nilai syar'i. Dengan demikian, perempuan yang bekerja tidak hanya berperan dalam menopang perekonomian keluarga, tetapi juga dalam pembangunan sosial secara lebih luas.¹¹⁵

Yusuf Al-Qaradhawi mengembangkan pandangan yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan syariat dengan mengintegrasikan Al-Qur'an dan Hadits serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan tantangan zaman. Ia mengakui bahwa wanita memiliki hak untuk bekerja dan berkarier, tetapi dengan ketentuan dan batasan tertentu yang bertujuan menjaga kehormatan serta martabat mereka, sehingga dapat berperan di ranah publik tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Yusuf al-Qaradhawi secara tidak langsung mendukung peran wanita dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan politik, dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat tertentu sesuai prinsip syariah.¹¹⁶

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, perempuan dibolehkan bekerja di luar rumah selama tidak melanggar ketentuan syariat. Ia menegaskan bahwa tidak ada dalil yang secara sahih dan jelas mengharamkan perempuan untuk menjalankan aktivitas publik atau profesi tertentu. Hukum asal perempuan bekerja adalah mubah (boleh), terutama jika dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, kondisi sebagai pencari nafkah utama, atau adanya kebutuhan masyarakat terhadap profesi yang lebih tepat diisi oleh perempuan, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, atau pelayanan khusus perempuan. Meski demikian, perempuan tetap

¹¹⁴ Asriaty, h.180-182.

¹¹⁵ Shofwatunnida, 'Peran Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 57-58.

¹¹⁶ Chusna, et al, h.50.

dituntut untuk menjaga adab dan etika Islam, seperti menjaga aurat, tidak ber-tabarruj, tidak berikhtilat bebas, dan tidak mengabaikan tanggung jawab utama dalam rumah tangga. Al-Qaradawi juga mengutip contoh para sahabatiyah seperti Asma' binti Abu Bakar yang membantu suaminya bekerja, sebagai bukti bahwa kontribusi perempuan dalam ruang publik telah ada sejak masa awal Islam.¹¹⁷

K.H. Husein Muhammad adalah tokoh yang membela keadilan gender dalam Islam dengan pendekatan kontekstual dan fiqh emansipatoris, yaitu fiqh yang berpihak pada keadilan dan pembebasan manusia dari diskriminasi, termasuk terhadap perempuan. Ia melihat bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan bukan berasal dari Islam, tetapi dari penafsiran agama yang bias dan tidak memperhatikan konteks sosial. Karena itu, menurut Husein, ayat-ayat Al-Qur'an tentang laki-laki dan perempuan harus dipahami sesuai konteks zaman dan kondisi masyarakat saat ayat itu turun, bukan dimaknai secara kaku. Husein menyatakan bahwa Al-Qur'an membawa misi besar untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, termasuk penindasan terhadap perempuan. Maka, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Dalam hal pekerjaan dan relasi dalam rumah tangga, Husein menekankan pentingnya saling pengertian antara suami dan istri. Jika ada yang bekerja di luar rumah, maka harus ada kesepakatan bersama. Begitu juga dengan hak-hak nafkah dan hubungan suami-istri, keduanya harus didasarkan pada keadilan dan saling rela.¹¹⁸

Kesadaran Husein terhadap isu perempuan muncul sejak ia mengikuti seminar lintas agama pada tahun 1993. Di sana ia mulai sadar bahwa perempuan menghadapi masalah besar yang selama ini sering dianggap sepele. Ia menegaskan bahwa jika perempuan terus dianggap lebih rendah, maka itu adalah masalah serius bagi kemanusiaan. Namun, perjuangannya tidak mudah karena masih banyak lingkungan pesantren dan masyarakat yang menganggap penafsiran agama yang patriarkal sebagai sesuatu yang mutlak. Melalui pendekatan fiqh emansipatoris, Husein ingin menghadirkan fiqh yang lebih membebaskan, adil, dan tidak mendiskriminasi siapapun. Ia menggunakan berbagai pendekatan seperti ilmu sosial, hermeneutika, dan analisis bahasa untuk memahami Al-Qur'an secara menyeluruh. Baginya, ajaran Islam harus menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, bukan sebaliknya. Pendekatan inilah yang membuat pemikiran Husein cukup bisa diterima masyarakat, karena tetap berakar pada nilai-nilai Islam, tapi mampu menjawab masalah-masalah nyata yang dihadapi perempuan.¹¹⁹

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan utama dari diturunkannya syariat Islam, yang

¹¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Gema Insani Press, 1995), h. 422-423.

¹¹⁸ Mutimmah and Bakhrudin Safiullah, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.5 (2022), h. 458-460.

¹¹⁹ Mutimmah and Safiullah.

bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek individu maupun sosial. Kelima prinsip utama dalam maqashid syariah meliputi menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Dalam konteks perempuan yang bekerja, aktivitas ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mencapai maqashid tersebut. Dengan bekerja, perempuan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, menjaga kelangsungan hidupnya, dan terhindar dari ketergantungan ekonomi yang dapat membahayakan dirinya (*hifdz an-nafs*). Penghasilan yang diperoleh juga dapat digunakan untuk menjalankan perintah agama, seperti zakat dan sedekah, serta memperkuat peran sosial keagamaannya (*hifdz ad-din*). Di samping itu, pekerjaan menjadi sarana untuk mengembangkan wawasan, berpikir kritis, dan meningkatkan kapasitas intelektual (*hifdz al-'aql*). Dari sisi ekonomi, perempuan dapat menjaga dan mengelola harta yang diperoleh secara halal dan bertanggung jawab (*hifdz al-mal*). Tidak kalah penting, dengan adanya tambahan pendapatan dari ibu yang bekerja, kebutuhan anak-anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan lainnya dapat terpenuhi secara lebih optimal. Hal ini menunjukkan peran perempuan dalam menjaga dan merawat generasi, serta menjamin keberlangsungan keturunan secara lebih berkualitas (*hifdz an-nasl*).¹²⁰

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja merupakan wujud nyata kontribusi terhadap kemaslahatan sosial dan ekonomi. Selain memenuhi hak atas kesetaraan akses, peran ini membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi ketergantungan finansial, dan memperkuat daya tahan sosial. Partisipasi perempuan juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Lebih jauh, keterlibatan ini menantang dan mematahkan stereotip bahwa perempuan hanya berperan di ranah domestik. Oleh karena itu, partisipasi aktif perempuan di sektor kerja tidak hanya mencerminkan keadilan gender, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.

¹²⁰ Ahmad Syafii Rahman, et al, "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah", *Uhumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1 (2021), h. 14–16.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2023 secara parsial. Hasil uji t menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,2556 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,2556 > 0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2023, jika dilihat secara parsial. Hasil uji t menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,8874 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,8874 > 0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_2) ditolak.
3. Variabel upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2023. Hasil uji t menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0027 yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0027 < 0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_3) diterima.
4. Variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2023. Hasil uji simultan menunjukkan nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0,000029 yang berarti kurang dari 0,05 ($0,000029 < 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pemaparan uji hipotesis serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan upah minimum terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, pemerintah diharapkan lebih cermat dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan, khususnya bagi pekerja perempuan. Kenaikan upah minimum yang terukur sesuai dengan kebutuhan hidup layak tidak hanya berdampak pada daya

tarik pekerjaan formal, tetapi juga mampu mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pengupahan sebaiknya diiringi dengan program pemberdayaan tenaga kerja perempuan, serta peningkatan akses terhadap informasi pasar kerja dan perlindungan ketenagakerjaan, guna menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan berkeadilan gender.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,095472 atau setara dengan 9,5%. Artinya, variabel-variabel independen dalam model ini hanya mampu menjelaskan sebesar 9,5% variasi dari variabel dependen, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2023. Sementara itu, sisanya sebesar 90,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel yang digunakan, khususnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kultural seperti status pernikahan, jumlah anak, pendapatan rumah tangga, beban kerja domestik, motivasi kerja, dan tingkat religiusitas. Pemanfaatan data primer dan pendekatan kualitatif atau *mixed-method* dapat dipertimbangkan untuk menggali faktor-faktor yang tidak tercakup dalam data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan data hanya sampai tahun 2023 karena data tahun 2024 yang relevan dari BPS belum tersedia atau belum dipublikasikan pada saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbarui periode penelitian dengan memasukkan data terbaru yang akan dirilis pada tahun-tahun mendatang, agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan relevan dengan kondisi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Great, Rosalina A.M. Koleangan, and Hanly F. Dj. Siwu, 'Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20.1 (2020), p. 10
- Amalia, Fitri, Roeskani Sinaga, Asyari, and Rahmah Farahdita Soeyatno, *Ekonomi Pembangunan* (Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Amriani, Nur Rahma, 'Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berbasis Gender Di Indonesia', *Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2023
- Arisandi, Arwini, and Syandriana Syarifuddin, 'Memprediksikan Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Indonesia Bagian Timur Menggunakan Random Forest Classification', *Journal of Mathematics: Theory and Applications*, 5.1 (2023), pp. 1–6, doi:10.31605/jomta.v5i1.2402
- Asriaty, 'Wanita Karir Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Al-Maiyyah*, 7.2 (2014), p. 180
- Atiyatna, Dirta Pratama, Nurlina T. Muhyiddin, and Bambang Bemby Soebyakto, 'Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14.1 (2016), p. 10
- Ayuningtyas, Ika, and Muhammad Suryanata, 'Pengelompokan Provinsi Di Indonesia Menurut Indikator Pasar Tenaga Kerja', *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022.1 (2022), p. 430, doi:10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1489
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Profil Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Hasil Sakernas Agustus 2023* (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024)
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (RajaGrafindo Persada, 2015)
- Bayumi, Muhamad Rahman, Rizal Alfit Jaya, and Bunga Maratush Shalihah, 'Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia', *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 2.2 (2022), pp. 115–28
- BPS Provinsi Jawa Tengah, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2023*, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024, 05
- Chusna, Zunita Hidayatul, Ita Ma'rifatul Fauziyah, Sandi Yoga Pradana, and Intan Amalia, 'THE MODERATE PERSPECTIVE OF YUSUF AL-QARDHAWI ON CAREER WOMEN', *ICES: International Conference on Education and Sharia*, 1 (2024), p. 250
- Defiani, Siti, Ahmad Fauzia, and Ummi Lailia Maghfiroh, 'Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Buya Hamka', *BEST JOURNAL : Biology Education Science & Techmology*, 7.1 (2024), p. 10
- Dinas Perempuan dan Anak, *Profil Gender Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*, 2023
- Fatmawati, 'Konsep Gender Dalam Perspektif Islam', *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9.2 (2024), pp. 91–93, doi:10.53429/iljs.v9i2.984

- Fitriyaningsih, Putri Dyah Ayu, and Fita Nurotul Faizah, 'Relevansi Kesetaraan Gender Dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)', *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13.1 (2020), p. 39, doi:10.35905/al-maiyyah.v13i1.703
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)
- Gunawan, Moch Hoerul, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam', *Tahkim*, XVI.1 (2020), p. 126, doi:10.62504/nexus767
- Harahap, Jusriati, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) Perempuan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2019' (UIN Sumatera Utara, 2020)
- Hasan, Muhammad, Acai Sudirman, Indarta Priyana, Yullya Romadonna, Rini Setiowati, Nurhidayati, and others, *Human Capital Management (Teori Dan Aplikasi), Sustainability (Switzerland)* (Media Sains Indonesia, 2023), XI
- Hasanah, Uswatun, 'Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Periode 2016-2020', *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2022), p. 93, doi:10.58561/margin.v1i2.41
- Hatta, Siti Hardiyanti, 'Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Kota Makassar' (UIN Alauddin Makassar, 2017)
- Hidayati, Hermin Nainggolan, Rezi Erdiansyah, Wahyu Setya Ratri, and Eddy Supriyadinata Gorda, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Pradina Pustaka, 2022)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Qur'an Kemenag*
- Indriani, Maulida, 'Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Gema Keadilan*, Vol. 3, No (2016), p. h. 68 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>>
- KEMNAKER, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, 2008, pp. 1–69 <https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/7_Tahun_2013.pdf>
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2021)
- Kurniasari, Wulan, Toto Gunarto, and Dedy Yuliawan, 'Dinamika Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: Faktor Kunci Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7.1 (2024), p. 41, doi:10.37600/ekbi.v7i1.1343
- Maimun, Sholeh, 'Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4.1 (2007), pp. 63–64
- Mardhatillah, Assyifa, 'Analisis Gender Dalam Perspektif K.H. Husein Muhammad' (UIN Ar-Raniriy Banda Aceh, 2022)
- Mashari, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum Menuju Kebutuhan Hidup Layak Bagi Pekerja Di Jawa Tengah', *Jurnal Spektrum*, 12.1 (2015), p. 51

- Maslamah, and Suprpti Muzani, 'Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9.2 (2014), pp. 279–80, doi:10.21580/sa.v9i2.636
- Mawadah, Sokhikhatul, 'Kurva Penawaran Tenaga Kerja Dan Jam Kerja Perempuan', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.3 (2018), p. 360, doi:10.21580/sa.v12i3.2084
- Mulyaningsih, *Pembangunan Ekonomi* (CV Kimfa Mandiri, 2019)
- Muna, Ibnu Choiru, 'Pengaruh Rata Lama Sekolah Perempuan, Upah Minimum Provinsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Pulau Jawa Tahun 2017-2022', *Repositori Mahasiswa Untidar* (Universitas Tidar, 2023)
- Mutimmah, and Bakhrudin Safiullah, 'Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.5 (2022), pp. 446–62, doi:10.15642/mal.v3i5.155
- Na'afi, Septiana, 'Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19', *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2020), p. 242
- Nasution, Eza Okhy Awalia Br, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, and Khairina Tambunan, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, 1.1 (2023), p. 67
- Nirmalasari, Shindita Apriliani, and Nurchalisa Putri, 'Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)', *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), pp. 43–52, doi:10.14421/jmes.2022.011-04
- Novita, Rieke, 'Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di 6 Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79442>>
- Nurudin, Johan Arifin, and Anang Ma'ruf, 'Pengaruh Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan Syariah, Dan Kebudayaan Terhadap Minat Menabung Santri Kota Semarang Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi', *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2021), p. 3, doi:10.53491/elmudhorib.v2i1.79
- Prasetyani, Dwi, and Sumardi, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Sustainability (Switzerland)* (CV. Djiwa Amarta Press, 2020), xi
- Pratomo, Devanto Shasta, 'Pendidikan Dan Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Di Indonesia: Analisis Terhadap Hipotesis Kurva-U', *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10.02 (2017), p. 2
- Presiden Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*, 2003
- Purnamasari, Yessy, and Dini Amaliah, 'Peranan Partisipasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Di Dki Jakarta Tahun 2009-2013', *Research and Development Journal of Education*,

2.1 (2015), p. 23, doi:10.30998/rdje.v2i1.1420

- Putri, Anggaryani., ‘Pengaruh Tenaga Kerja Dan Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1980-2012’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1.2 (2013)
- Putri, Yulia, and Mike Triani, ‘Analisis Pasar Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap Tingkat Upah Di Indonesia’, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1.2 (2019), p. 488
<<https://www.academia.edu/download/110919716/3169.pdf>>
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Gema Insani Press, 1995)
- Rachmandani, M. Fitra, ‘Peyorasi Istilah Independent Woman’, *Kompasiana.Com*, 24 September 2023
<<https://www.kompasiana.com/fitrarch/6510228008a8b50fd81fb7f2/peyorasi-istilah-independent-woman>>
- Radjab, Enny, and Andi Jama’an, *Metode Penelitian Bisnis* (Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017)
- Rahmah, Syarifah, *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam)* (CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021)
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari, ‘Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah’, *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1 (2021), pp. 14–16, doi:10.47200/ulumuddin.v12i1.940
- Rahman, Yozi Aulia, and Ayunda Lintang Chamelia, ‘Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012’, *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8.1 (2015), p. 89, doi:10.15294/jejak.v8i1.3857
- Ridwan, Murtadho, ‘Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam’, *Equilibrium*, 1.2 (2013), p. 253
- Romeo, Erlyger, Nabel Pasaribu, Nani Ariani, and Eromeonebel@upnvj Ac Id, ‘Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Belanja Modal, Dan Pengguna Internet Terhadap Tingkat Pertumbuhan PDRB Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur’, *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, 2.2 (2023), p. 111
- Saepul Anwar, Aep, and Imam Sofi’i, ‘Konsep Dan Isu Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita Dalam Pandangan Islam’, *Jurnal Paris Langkis*, 5.1 (2024), p. 151
- Samsukadi, Mochamad, ‘Perspektif Gender Dalam Tafsir Muhammad ‘Abduh’, *Marâji’: Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2014), p. 253
- Sandila, Rona, Muhammad Rizal S, Fiqh Arya Satya, Lis Sulastri, Muhammad Arif Fahrudin Alfana, and Agus Joko Pitoyo, ‘Analisis Kesenjangan Gender Provinsi Papua Tahun 2019’, *Analisis Sumberdaya Manusia Dan Ekonomi-ASDME Yogyakarta*, October, 2020, doi:10.13140/RG.2.2.11783.62882
- Senjaya, Klarissa, ‘Stigma Independent Woman Dalam Kesenjangan Gender’, *Kompasiana.Com*, 24 January 2024
<<https://www.kompasiana.com/klarissasenjaya/65b09ef7de948f6d6a30d8d2/stigma->

independent-women-dalam-kesetaraan-gender>

- Septiawan, Anggi, and Siti Haiyinah Wijaya, 'Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia Tahun 2015-2019 Menggunakan Model Regresi Data Panel', in *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021, MMXX, 452, doi:10.34123/semnasoffstat.v2020i1.387
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Lentera Hati, 2002)
- , *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 14 (Lentera Hati, 2005), XIV
- Shofwatunnida, 'Peran Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2020)
- Soleh, Mohammad, and Nunung Wahyuni, 'Pengaruh IPM , PDRB Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap', *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 6.2 (2021), p. 92
- Solihatin, Isna Rahmah, 'Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga', *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12.2 (2017), pp. 38–48
- Solihin, Budi, 'Pandangan Islam Tentang Penetapan Upah Minimum Regional (UMR)', *Al-Mujaddid*, 1.1 (2018), pp. 25–26
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta, 2013)
- Sukarniati, Lestari, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, and Nurul Azizah Az Zakiyyah, *Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Tantangan Di Negara Berkembang)*, UAD Press, (UAD PRESS, 2021)
- Tansya, Fawziyah, Salminawati, and Usiono, 'Pendidikan Wanita Dalam Filsafat Pendidikan Islam', *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3.4 (2022), p. 410, doi:10.51590/waraqat.v5i1.95
- Tarik, Atika Agustina, and Mohammad Kurjum, 'Telaah Hadit Keutamaan Dan Urgensi Menuntut Ilmu Di Era Digital: Relevansi Dengan Tantangan Pendidikan Modern Dan Kriteria Pendidik Ideal', *STUDIA RELIGIA, Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 8.2 (2024), p. 187
- Trimaya, Arrista, 'Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5.1 (2014), p. 19
- Uppun, Paulus, Amanus Khalifah Fil'ardy, and Adelia Dwiyaniti, 'Kajian Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Daerah Pusat Perekonomian Kawasan Tengah Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Dinamika Sosial*, 3.1 (2024), pp. 79–93
- Wahyuningsih, Tri, 'Sektor Pertanian Dan Perannya Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Buru', *Media Trend*, 10.2 (2015), pp. 156–71
- Yulianti, Rizky Amalia, and Vita Ratnasari, 'Pemetaan Dan Pemodelan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Model Probit', *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2.2 (2013), p. 159
- <http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/4960%0Ahttps://ejurnal.its.ac.id>

Yuni, Revita, and Dedi Lanova Hutabarat, 'Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019', *NIAGAWAN*, 10.1 (2021), p. 63

Zulfiyandi, Franciscus Anton Wirawan, Nikhen Pratiwi Sekar Tanjung, Roselina Yolanda, M. Zaini, Devi Andrian, and others, *Ketenagakerjaan Dalam Data 2021*, 4th edn (Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, 2021), doi:10.1177/030802265702001214

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Sampel 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tahun 2018-2023

Data Variabel Penelitian

No	Kabupaten/Kota	TPAK Perempuan (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	47.70	47.10	52.45	46.99	49.83	48.11
2	Kabupaten Banyumas	52.59	51.27	51.74	49.95	47.91	46.08
3	Kabupaten Purbalingga	58.18	54.82	55.26	55.42	62.50	62.14
4	Kabupaten Banjarnegara	57.63	55.72	54.47	54.61	58.21	56.74
5	Kabupaten Kebumen	52.15	56.00	57.67	55.59	60.96	62.49
6	Kabupaten Purworejo	55.44	52.32	60.14	62.57	61.29	63.86
7	Kabupaten Wonosobo	60.51	57.60	58.18	58.66	60.79	59.77
8	Kabupaten Magelang	62.02	64.06	68.31	66.40	72.78	71.27
9	Kabupaten Boyolali	62.45	62.20	65.41	65.93	66.34	63.99
10	Kabupaten Klaten	55.72	58.23	56.59	56.54	56.96	52.69
11	Kabupaten Sukoharjo	57.87	56.67	57.99	58.75	58.14	57.05
12	Kabupaten Wonogiri	65.75	55.78	64.64	63.58	64.68	74.80
13	Kabupaten Karanganyar	60.41	58.42	63.42	64.72	57.62	59.88
14	Kabupaten Sragen	54.36	54.76	58.74	62.41	58.10	58.37
15	Kabupaten Grobogan	60.46	52.76	59.18	61.13	57.94	62.70
16	Kabupaten Blora	61.25	53.46	58.06	57.49	63.77	68.88
17	Kabupaten Rembang	55.15	50.29	51.17	57.49	61.82	58.22
18	Kabupaten Pati	53.11	50.17	52.02	56.26	57.88	59.62
19	Kabupaten Kudus	64.11	61.57	66.59	67.86	59.99	63.47
20	Kabupaten Jepara	55.46	54.20	56.66	55.75	52.85	57.81
21	Kabupaten Demak	59.84	54.43	56.52	51.75	52.29	57.99
22	Kabupaten Semarang	64.49	64.58	66.38	63.29	66.87	66.37
23	Kabupaten Temanggung	61.49	64.73	57.82	61.88	65.26	65.91
24	Kabupaten Kendal	50.57	55.52	58.64	58.80	61.44	65.11
25	Kabupaten Batang	56.69	54.65	53.24	57.45	61.51	64.71
26	Kabupaten Pekalongan	57.94	58.43	57.63	58.33	58.01	56.27
27	Kabupaten Pemalang	49.18	49.36	50.48	52.14	55.78	52.33
28	Kabupaten Tegal	49.19	51.38	51.25	53.46	51.63	52.36
29	Kabupaten Brebes	52.64	50.22	52.47	50.57	51.69	50.08
30	Kota Magelang	60.99	57.33	59.85	59.98	58.30	61.10
31	Kota Surakarta	56.68	59.77	59.04	56.51	58.25	57.66
32	Kota Salatiga	66.88	57.00	62.76	64.14	63.23	62.98
33	Kota Semarang	54.28	57.43	60.48	59.42	58.59	60.64
34	Kota Pekalongan	60.59	62.14	59.34	65.93	57.47	63.96
35	Kota Tegal	53.30	58.17	53.97	55.63	53.62	50.89

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (Tahun)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	6.45	6.47	6.49	6.76	6.77	6.97
2	Kabupaten Banyumas	7.12	7.14	7.24	7.35	7.53	7.54
3	Kabupaten Purbalingga	6.59	6.76	6.87	6.95	7.09	7.11
4	Kabupaten Banjarnegara	6.09	6.32	6.57	6.58	6.59	6.61
5	Kabupaten Kebumen	6.87	7.09	7.10	7.11	7.42	7.43
6	Kabupaten Purworejo	7.34	7.49	7.70	7.89	8.00	8.01
7	Kabupaten Wonosobo	6.50	6.51	6.61	6.62	6.63	6.71
8	Kabupaten Magelang	7.17	7.28	7.29	7.30	7.32	7.38
9	Kabupaten Boyolali	6.85	6.94	7.25	7.26	7.51	7.52
10	Kabupaten Klaten	7.65	7.77	8.07	8.33	8.62	8.68
11	Kabupaten Sukoharjo	8.41	8.67	8.87	8.88	9.17	9.47
12	Kabupaten Wonogiri	6.49	6.71	6.80	6.81	7.05	7.32
13	Kabupaten Karanganyar	7.91	7.93	8.02	8.07	8.36	8.60
14	Kabupaten Sragen	6.60	6.61	6.93	6.97	7.27	7.38
15	Kabupaten Grobogan	6.14	6.34	6.50	6.51	6.76	6.77
16	Kabupaten Blora	5.96	6.06	6.30	6.58	6.60	6.82
17	Kabupaten Rembang	6.41	6.61	6.68	6.82	6.94	7.24
18	Kabupaten Pati	6.64	6.69	6.91	7.13	7.49	7.50
19	Kabupaten Kudus	8.09	8.10	8.18	8.27	8.59	8.87
20	Kabupaten Jepara	6.80	6.81	7.12	7.37	7.69	7.86
21	Kabupaten Demak	6.82	6.91	7.22	7.42	7.69	7.78
22	Kabupaten Semarang	7.44	7.62	7.63	7.75	7.76	7.83
23	Kabupaten Temanggung	6.72	6.80	7.01	7.02	7.28	7.46
24	Kabupaten Kendal	6.47	6.63	6.84	6.89	7.16	7.34
25	Kabupaten Batang	6.16	6.17	6.53	6.54	6.55	6.77
26	Kabupaten Pekalongan	6.31	6.56	6.57	6.85	7.14	7.15
27	Kabupaten Pemalang	5.75	5.92	5.94	6.10	6.15	6.20
28	Kabupaten Tegal	6.09	6.31	6.32	6.48	6.79	6.88
29	Kabupaten Brebes	5.37	5.38	5.45	5.55	5.83	5.90
30	Kota Magelang	9.95	9.96	10.16	10.42	10.75	11.06
31	Kota Surakarta	10.01	10.09	10.30	10.54	10.56	10.81
32	Kota Salatiga	9.93	9.94	10.06	10.32	10.64	10.94
33	Kota Semarang	10.14	10.15	10.16	10.44	10.46	10.47
34	Kota Pekalongan	8.22	8.50	8.78	8.97	8.98	9.21
35	Kota Tegal	7.71	7.82	8.02	8.28	8.57	8.83

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Cilacap	2.99	2.27	-10.28	2.15	5.15	5.34
2	Kabupaten Banyumas	6.45	6.32	-1.65	4.00	5.86	5.40
3	Kabupaten Purbalingga	5.42	5.64	-1.18	3.19	5.41	4.51
4	Kabupaten Banjarnegara	5.67	5.60	-1.32	3.26	5.29	4.98
5	Kabupaten Kebumen	5.53	5.52	-1.45	3.71	5.79	5.66
6	Kabupaten Purworejo	5.33	5.44	-1.61	3.31	5.36	5.07
7	Kabupaten Wonosobo	5.06	5.57	-1.64	3.68	5.02	4.30
8	Kabupaten Magelang	5.28	5.30	-1.67	3.48	5.46	5.04
9	Kabupaten Boyolali	5.72	5.96	-1.20	4.63	6.33	5.62
10	Kabupaten Klaten	5.47	5.48	-1.17	3.82	5.90	5.70
11	Kabupaten Sukoharjo	5.79	5.92	-1.70	3.82	5.61	5.06
12	Kabupaten Wonogiri	5.41	5.14	-1.41	3.35	5.63	4.98
13	Kabupaten Karanganyar	5.98	5.76	-1.87	3.59	5.86	5.53
14	Kabupaten Sragen	5.75	5.90	-1.81	3.75	5.76	5.23
15	Kabupaten Grobogan	5.83	5.37	-1.57	3.78	5.98	4.99
16	Kabupaten Blora	4.38	4.05	-4.56	3.68	2.66	3.11
17	Kabupaten Rembang	5.89	5.20	-1.49	3.85	5.55	5.20
18	Kabupaten Pati	5.71	5.81	-1.16	3.38	5.56	5.02
19	Kabupaten Kudus	3.24	3.09	-3.11	-1.54	2.21	2.19
20	Kabupaten Jepara	5.85	6.02	-1.92	4.63	5.95	5.17
21	Kabupaten Demak	5.40	5.36	-0.23	2.62	5.25	5.01
22	Kabupaten Semarang	5.67	5.39	-2.67	3.63	5.31	4.74
23	Kabupaten Temanggung	5.13	5.05	-2.13	3.34	5.20	5.01
24	Kabupaten Kendal	5.77	5.71	-1.51	3.89	5.68	5.56
25	Kabupaten Batang	5.72	5.39	-1.29	4.88	5.97	5.53
26	Kabupaten Pekalongan	5.76	5.35	-1.89	3.54	5.11	5.14
27	Kabupaten Pemalang	5.69	5.80	-0.61	4.28	5.08	4.14
28	Kabupaten Tegal	5.51	5.56	-1.48	3.71	5.13	4.93
29	Kabupaten Brebes	5.26	5.76	-0.47	2.57	5.5	3.74
30	Kota Magelang	5.46	5.41	-2.45	3.20	5.77	5.45
31	Kota Surakarta	5.75	5.78	-1.76	4.01	6.25	5.57
32	Kota Salatiga	5.84	5.90	-1.68	3.35	5.53	5.34
33	Kota Semarang	6.48	6.81	-1.85	5.16	5.73	5.79
34	Kota Pekalongan	5.69	5.50	-1.87	3.59	5.76	5.44
35	Kota Tegal	5.87	5.77	-2.29	3.12	5.16	5.01

No	Kab./Kota	Upah Minimum (Rupiah)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Cilacap	1841209	1989058.08	2158327	2228904	2230731	2383090
2	Kab. Banyumas	1589000	1750000	1900000	1970000	1983261	2118124
3	Kab. Purbalingga	1655200	1788500	1940800	1988000	1996814	2130981
4	Kab. Banjarnegara	1490000	1610000	1748000	1805000	1819835	1958170
5	Kab. Kebumen	1560000	1686000	1835000	1895000	1906781	2035890
6	Kab. Purworejo	1573000	1700000	1845000	1905400	1911850	2043902
7	Kab. Wonosobo	1585000	1712500	1859000	1920000	1931285	2076209
8	Kab. Magelang	1742000	1882000	2042200	2075000	2081807	2236777
9	Kab. Boyolali	1651650	1790000	1942500	2000000	2010299	2155712
10	Kab. Klaten	1661632.35	1795061.43	1947821.16	2011515	2015623	2152323
11	Kab. Sukoharjo	1648000	1783500	1938000	1986450	1998153	2138248
12	Kab. Wonogiri	1542000	1655000	1797000	1827000	1839043	1968448
13	Kab. Karanganyar	1696000	1833000	1989000	2054040	2064313	2207484
14	Kab. Sragen	1546492.72	1673500	1815914.85	1829500	1839429	1969569
15	Kab. Grobogan	1560000	1685500	1830000	1890000	1894032	2029569
16	Kab. Blora	1564000	1690000	1834000	1894000	1904196	2040080
17	Kab. Rembang	1535000	1660000	1802000	1861000	1874322	2015927
18	Kab. Pati	1585000	1742000	1891000	1953000	1968339	2107697
19	Kab. Kudus	1892500	2044467.75	2218451.95	2290995	2293058	2439814
20	Kab. Jepara	1739360	1879031	2040000	2107000	2108403	2272627
21	Kab. Demak	2065490	2240000	2432000	2511526	2513005	2680421
22	Kab. Semarang	1900000	2055000	2229880.5	2302798	2311254	2480988
23	Kab. Temanggung	1557000	1682027.1	1825200	1885000	1887832	2027569
24	Kab. Kendal	1929458	2084393.48	2261775	2335735	2340312	2508300
25	Kab. Batang	1749900	1900000	2061700	2129117	2135535	2282026
26	Kab. Pekalongan	1721637.55	1859885.05	2018161.27	2084155	2094646	2247346
27	Kab. Pemalang	1588000	1718000	1865000	1926000	1940890	2081783
28	Kab. Tegal	1617000	1747000	1896000	1958000	1968446	2106238
29	Kab. Brebes	1542000	1665850	1807614	1866723	1885019	2018837
30	Kota Magelang	1580000	1707000	1853000	1914000	1935913	2066007
31	Kota Surakarta	1668700	1802700	1956200	2013810	2035720	2174169
32	Kota Salatiga	1735930.06	1875325.24	2034915.42	2101457	2128523	2284180
33	Kota Semarang	2310087.5	2498587.53	2715000	2810025	2835021	3060349
34	Kota Pekalongan	1765178.63	1906922.47	2072000	2139754	2156213	2305823
35	Kota Tegal	1630500	1762000	1925000	1982750	2005930	2145012

Pengelompokan Data

No	Kabupaten/Kota	Tahun	TPAKP	RLSP	PE	UM
1	Kabupaten Cilacap	2018	47.70	6.45	2.99	1841209
1	Kabupaten Cilacap	2019	47.10	6.47	2.27	1989058.08
1	Kabupaten Cilacap	2020	52.45	6.49	-10.28	2158327
1	Kabupaten Cilacap	2021	46.99	6.76	2.15	2228904
1	Kabupaten Cilacap	2022	49.83	6.77	5.15	2230731
1	Kabupaten Cilacap	2023	48.11	6.97	5.34	2383090
2	Kabupaten Banyumas	2018	52.59	7.12	6.45	1589000
2	Kabupaten Banyumas	2019	51.27	7.14	6.32	1750000
2	Kabupaten Banyumas	2020	51.74	7.24	-1.65	1900000
2	Kabupaten Banyumas	2021	49.95	7.35	4.00	1970000
2	Kabupaten Banyumas	2022	47.91	7.53	5.86	1983261
2	Kabupaten Banyumas	2023	46.08	7.54	5.40	2118124
3	Kabupaten Purbalingga	2018	58.18	6.59	5.42	1655200
3	Kabupaten Purbalingga	2019	54.82	6.76	5.64	1788500
3	Kabupaten Purbalingga	2020	55.26	6.87	-1.18	1940800
3	Kabupaten Purbalingga	2021	55.42	6.95	3.19	1988000
3	Kabupaten Purbalingga	2022	62.50	7.09	5.41	1996814
3	Kabupaten Purbalingga	2023	62.14	7.11	4.51	2130981
4	Kabupaten Banjarnegara	2018	57.63	6.09	5.67	1490000
4	Kabupaten Banjarnegara	2019	55.72	6.32	5.60	1610000
4	Kabupaten Banjarnegara	2020	54.47	6.57	-1.32	1748000
4	Kabupaten Banjarnegara	2021	54.61	6.58	3.26	1805000
4	Kabupaten Banjarnegara	2022	58.21	6.59	5.29	1819835
4	Kabupaten Banjarnegara	2023	56.74	6.61	4.98	1958170
5	Kabupaten Kebumen	2018	52.15	6.87	5.53	1560000
5	Kabupaten Kebumen	2019	56.00	7.09	5.52	1686000
5	Kabupaten Kebumen	2020	57.67	7.10	-1.45	1835000
5	Kabupaten Kebumen	2021	55.59	7.11	3.71	1895000
5	Kabupaten Kebumen	2022	60.96	7.42	5.79	1906781
5	Kabupaten Kebumen	2023	62.49	7.43	5.66	2035890
6	Kabupaten Purworejo	2018	55.44	7.34	5.33	1573000
6	Kabupaten Purworejo	2019	52.32	7.49	5.44	1700000
6	Kabupaten Purworejo	2020	60.14	7.70	-1.61	1845000
6	Kabupaten Purworejo	2021	62.57	7.89	3.31	1905400
6	Kabupaten Purworejo	2022	61.29	8.00	5.36	1911850
6	Kabupaten Purworejo	2023	63.86	8.01	5.07	2043902
7	Kabupaten Wonosobo	2018	60.51	6.50	5.06	1585000
7	Kabupaten Wonosobo	2019	57.60	6.51	5.57	1712500
7	Kabupaten Wonosobo	2020	58.18	6.61	-1.64	1859000
7	Kabupaten Wonosobo	2021	58.66	6.62	3.68	1920000
7	Kabupaten Wonosobo	2022	60.79	6.63	5.02	1931285
7	Kabupaten Wonosobo	2023	59.77	6.71	4.30	2076209

No	Kabupaten/Kota	Tahun	TPAKP	RLSP	PE	UM
8	Kabupaten Magelang	2018	62.02	7.17	5.28	1742000
8	Kabupaten Magelang	2019	64.06	7.28	5.30	1882000
8	Kabupaten Magelang	2020	68.31	7.29	-1.67	2042200
8	Kabupaten Magelang	2021	66.40	7.30	3.48	2075000
8	Kabupaten Magelang	2022	72.78	7.32	5.46	2081807
8	Kabupaten Magelang	2023	71.27	7.38	5.04	2236777
9	Kabupaten Boyolali	2018	62.45	6.85	5.72	1651650
9	Kabupaten Boyolali	2019	62.20	6.94	5.96	1790000
9	Kabupaten Boyolali	2020	65.41	7.25	-1.20	1942500
9	Kabupaten Boyolali	2021	65.93	7.26	4.63	2000000
9	Kabupaten Boyolali	2022	66.34	7.51	6.33	2010299
9	Kabupaten Boyolali	2023	63.99	7.52	5.62	2155712
10	Kabupaten Klaten	2018	55.72	7.65	5.47	1661632.35
10	Kabupaten Klaten	2019	58.23	7.77	5.48	1795061.43
10	Kabupaten Klaten	2020	56.59	8.07	-1.17	1947821.16
10	Kabupaten Klaten	2021	56.54	8.33	3.82	2011515
10	Kabupaten Klaten	2022	56.96	8.62	5.90	2015623
10	Kabupaten Klaten	2023	52.69	8.68	5.70	2152323
11	Kabupaten Sukoharjo	2018	57.87	8.41	5.79	1648000
11	Kabupaten Sukoharjo	2019	56.67	8.67	5.92	1783500
11	Kabupaten Sukoharjo	2020	57.99	8.87	-1.70	1938000
11	Kabupaten Sukoharjo	2021	58.75	8.88	3.82	1986450
11	Kabupaten Sukoharjo	2022	58.14	9.17	5.61	1998153
11	Kabupaten Sukoharjo	2023	57.05	9.47	5.06	2138248
12	Kabupaten Wonogiri	2018	65.75	6.49	5.41	1542000
12	Kabupaten Wonogiri	2019	55.78	6.71	5.14	1655000
12	Kabupaten Wonogiri	2020	64.64	6.80	-1.41	1797000
12	Kabupaten Wonogiri	2021	63.58	6.81	3.35	1827000
12	Kabupaten Wonogiri	2022	64.68	7.05	5.63	1839043
12	Kabupaten Wonogiri	2023	74.80	7.32	4.98	1968448
13	Kabupaten Karanganyar	2018	60.41	7.91	5.98	1696000
13	Kabupaten Karanganyar	2019	58.42	7.93	5.76	1833000
13	Kabupaten Karanganyar	2020	63.42	8.02	-1.87	1989000
13	Kabupaten Karanganyar	2021	64.72	8.07	3.59	2054040
13	Kabupaten Karanganyar	2022	57.62	8.36	5.86	2064313
13	Kabupaten Karanganyar	2023	59.88	8.60	5.53	2207484
14	Kabupaten Sragen	2018	54.36	6.60	5.75	1546492.72
14	Kabupaten Sragen	2019	54.76	6.61	5.90	1673500
14	Kabupaten Sragen	2020	58.74	6.93	-1.81	1815914.85
14	Kabupaten Sragen	2021	62.41	6.97	3.75	1829500
14	Kabupaten Sragen	2022	58.10	7.27	5.76	1839429
14	Kabupaten Sragen	2023	58.37	7.38	5.23	1969569
15	Kabupaten Grobogan	2018	60.46	6.14	5.83	1560000
15	Kabupaten Grobogan	2019	52.76	6.34	5.37	1685500

No	Kabupaten/Kota	Tahun	TPAKP	RLSP	PE	UM
15	Kabupaten Grobogan	2020	59.18	6.50	-1.57	1830000
15	Kabupaten Grobogan	2021	61.13	6.51	3.78	1890000
15	Kabupaten Grobogan	2022	57.94	6.76	5.98	1894032
15	Kabupaten Grobogan	2023	62.70	6.77	4.99	2029569
16	Kabupaten Blora	2018	61.25	5.96	4.38	1564000
16	Kabupaten Blora	2019	53.46	6.06	4.05	1690000
16	Kabupaten Blora	2020	58.06	6.30	-4.56	1834000
16	Kabupaten Blora	2021	57.49	6.58	3.68	1894000
16	Kabupaten Blora	2022	63.77	6.60	2.66	1904196
16	Kabupaten Blora	2023	68.88	6.82	3.11	2040080
17	Kabupaten Rembang	2018	55.15	6.41	5.89	1535000
17	Kabupaten Rembang	2019	50.29	6.61	5.20	1660000
17	Kabupaten Rembang	2020	51.17	6.68	-1.49	1802000
17	Kabupaten Rembang	2021	57.49	6.82	3.85	1861000
17	Kabupaten Rembang	2022	61.82	6.94	5.55	1874322
17	Kabupaten Rembang	2023	58.22	7.24	5.20	2015927
18	Kabupaten Pati	2018	53.11	6.64	5.71	1585000
18	Kabupaten Pati	2019	50.17	6.69	5.81	1742000
18	Kabupaten Pati	2020	52.02	6.91	-1.16	1891000
18	Kabupaten Pati	2021	56.26	7.13	3.38	1953000
18	Kabupaten Pati	2022	57.88	7.49	5.56	1968339
18	Kabupaten Pati	2023	59.62	7.50	5.02	2107697
19	Kabupaten Kudus	2018	64.11	8.09	3.24	1892500
19	Kabupaten Kudus	2019	61.57	8.10	3.09	2044467.75
19	Kabupaten Kudus	2020	66.59	8.18	-3.11	2218451.95
19	Kabupaten Kudus	2021	67.86	8.27	-1.54	2290995
19	Kabupaten Kudus	2022	59.99	8.59	2.21	2293058
19	Kabupaten Kudus	2023	63.47	8.87	2.19	2439814
20	Kabupaten Jepara	2018	55.46	6.80	5.85	1739360
20	Kabupaten Jepara	2019	54.20	6.81	6.02	1879031
20	Kabupaten Jepara	2020	56.66	7.12	-1.92	2040000
20	Kabupaten Jepara	2021	55.75	7.37	4.63	2107000
20	Kabupaten Jepara	2022	52.85	7.69	5.95	2108403
20	Kabupaten Jepara	2023	57.81	7.86	5.17	2272627
21	Kabupaten Demak	2018	59.84	6.82	5.40	2065490
21	Kabupaten Demak	2019	54.43	6.91	5.36	2240000
21	Kabupaten Demak	2020	56.52	7.22	-0.23	2432000
21	Kabupaten Demak	2021	51.75	7.42	2.62	2511526
21	Kabupaten Demak	2022	52.29	7.69	5.25	2513005
21	Kabupaten Demak	2023	57.99	7.78	5.01	2680421
22	Kabupaten Semarang	2018	64.49	7.44	5.67	1900000
22	Kabupaten Semarang	2019	64.58	7.62	5.39	2055000
22	Kabupaten Semarang	2020	66.38	7.63	-2.67	2229880.5
22	Kabupaten Semarang	2021	63.29	7.75	3.63	2302798

No	Kabupaten/Kota	Tahun	TPAKP	RLSP	PE	UM
22	Kabupaten Semarang	2022	66.87	7.76	5.31	2311254
22	Kabupaten Semarang	2023	66.37	7.83	4.74	2480988
23	Kabupaten Temanggung	2018	61.49	6.72	5.13	1557000
23	Kabupaten Temanggung	2019	64.73	6.80	5.05	1682027.1
23	Kabupaten Temanggung	2020	57.82	7.01	-2.13	1825200
23	Kabupaten Temanggung	2021	61.88	7.02	3.34	1885000
23	Kabupaten Temanggung	2022	65.26	7.28	5.20	1887832
23	Kabupaten Temanggung	2023	65.91	7.46	5.01	2027569
24	Kabupaten Kendal	2018	50.57	6.47	5.77	1929458
24	Kabupaten Kendal	2019	55.52	6.63	5.71	2084393.48
24	Kabupaten Kendal	2020	58.64	6.84	-1.51	2261775
24	Kabupaten Kendal	2021	58.80	6.89	3.89	2335735
24	Kabupaten Kendal	2022	61.44	7.16	5.68	2340312
24	Kabupaten Kendal	2023	65.11	7.34	5.56	2508300
25	Kabupaten Batang	2018	56.69	6.16	5.72	1749900
25	Kabupaten Batang	2019	54.65	6.17	5.39	1900000
25	Kabupaten Batang	2020	53.24	6.53	-1.29	2061700
25	Kabupaten Batang	2021	57.45	6.54	4.88	2129117
25	Kabupaten Batang	2022	61.51	6.55	5.97	2135535
25	Kabupaten Batang	2023	64.71	6.77	5.53	2282026
26	Kabupaten Pekalongan	2018	57.94	6.31	5.76	1721637.55
26	Kabupaten Pekalongan	2019	58.43	6.56	5.35	1859885.05
26	Kabupaten Pekalongan	2020	57.63	6.57	-1.89	2018161.27
26	Kabupaten Pekalongan	2021	58.33	6.85	3.54	2084155
26	Kabupaten Pekalongan	2022	58.01	7.14	5.11	2094646
26	Kabupaten Pekalongan	2023	56.27	7.15	5.14	2247346
27	Kabupaten Pemalang	2018	49.18	5.75	5.69	1588000
27	Kabupaten Pemalang	2019	49.36	5.92	5.80	1718000
27	Kabupaten Pemalang	2020	50.48	5.94	-0.61	1865000
27	Kabupaten Pemalang	2021	52.14	6.10	4.28	1926000
27	Kabupaten Pemalang	2022	55.78	6.15	5.08	1940890
27	Kabupaten Pemalang	2023	52.33	6.20	4.14	2081783
28	Kabupaten Tegal	2018	49.19	6.09	5.51	1617000
28	Kabupaten Tegal	2019	51.38	6.31	5.56	1747000
28	Kabupaten Tegal	2020	51.25	6.32	-1.48	1896000
28	Kabupaten Tegal	2021	53.46	6.48	3.71	1958000
28	Kabupaten Tegal	2022	51.63	6.79	5.13	1968446
28	Kabupaten Tegal	2023	52.36	6.88	4.93	2106238
29	Kabupaten Brebes	2018	52.64	5.37	5.26	1542000
29	Kabupaten Brebes	2019	50.22	5.38	5.76	1665850
29	Kabupaten Brebes	2020	52.47	5.45	-0.47	1807614
29	Kabupaten Brebes	2021	50.57	5.55	2.57	1866723
29	Kabupaten Brebes	2022	51.69	5.83	5.5	1885019
29	Kabupaten Brebes	2023	50.08	5.90	3.74	2018837

No	Kabupaten/Kota	Tahun	TPAKP	RLSP	PE	UM
30	Kota Magelang	2018	60.99	9.95	5.46	1580000
30	Kota Magelang	2019	57.33	9.96	5.41	1707000
30	Kota Magelang	2020	59.85	10.16	-2.45	1853000
30	Kota Magelang	2021	59.98	10.42	3.20	1914000
30	Kota Magelang	2022	58.30	10.75	5.77	1935913
30	Kota Magelang	2023	61.10	11.06	5.45	2066007
31	Kota Surakarta	2018	56.68	10.01	5.75	1668700
31	Kota Surakarta	2019	59.77	10.09	5.78	1802700
31	Kota Surakarta	2020	59.04	10.30	-1.76	1956200
31	Kota Surakarta	2021	56.51	10.54	4.01	2013810
31	Kota Surakarta	2022	58.25	10.56	6.25	2035720
31	Kota Surakarta	2023	57.66	10.81	5.57	2174169
32	Kota Salatiga	2018	66.88	9.93	5.84	1735930.06
32	Kota Salatiga	2019	57.00	9.94	5.90	1875325.24
32	Kota Salatiga	2020	62.76	10.06	-1.68	2034915.42
32	Kota Salatiga	2021	64.14	10.32	3.35	2101457
32	Kota Salatiga	2022	63.23	10.64	5.53	2128523
32	Kota Salatiga	2023	62.98	10.94	5.34	2284180
33	Kota Semarang	2018	54.28	10.14	6.48	2310087.5
33	Kota Semarang	2019	57.43	10.15	6.81	2498587.53
33	Kota Semarang	2020	60.48	10.16	-1.85	2715000
33	Kota Semarang	2021	59.42	10.44	5.16	2810025
33	Kota Semarang	2022	58.59	10.46	5.73	2835021
33	Kota Semarang	2023	60.64	10.47	5.79	3060349
34	Kota Pekalongan	2018	60.59	8.22	5.69	1765178.63
34	Kota Pekalongan	2019	62.14	8.50	5.50	1906922.47
34	Kota Pekalongan	2020	59.34	8.78	-1.87	2072000
34	Kota Pekalongan	2021	65.93	8.97	3.59	2139754
34	Kota Pekalongan	2022	57.47	8.98	5.76	2156213
34	Kota Pekalongan	2023	63.96	9.21	5.44	2305823
35	Kota Tegal	2018	53.30	7.71	5.87	1630500
35	Kota Tegal	2019	58.17	7.82	5.77	1762000
35	Kota Tegal	2020	53.97	8.02	-2.29	1925000
35	Kota Tegal	2021	55.63	8.28	3.12	1982750
35	Kota Tegal	2022	53.62	8.57	5.16	2005930
35	Kota Tegal	2023	50.89	8.83	5.01	2145012

Lampiran 2: Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Eviews 12

Hasil Statistik Deskriptif

Date: 05/31/25

Time: 11:23

Sample: 2018 2023

	TPAKP	RLSP	PE	UM
Mean	58.12452	7.523714	3.806571	1964035.
Median	58.00000	7.155000	5.155000	1939400.
Maximum	74.80000	11.06000	6.810000	3060349.
Minimum	46.08000	5.370000	-10.28000	1490000.
Std. Dev.	5.238384	1.278720	2.848139	258833.3
Skewness	0.170873	1.072336	-1.707268	0.942931
Kurtosis	2.882506	3.445612	5.614327	4.814045
Jarque-Bera	1.142712	41.98412	161.8204	59.91333
Probability	0.564759	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	12206.15	1579.980	799.3800	4.12E+08
Sum Sq. Dev.	5735.099	341.7413	1695.387	1.40E+13
Observations	210	210	210	210

Hasil Regresi Panel dengan *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.650679	43.08299	-0.131158	0.8958
RLSP	0.992864	0.299700	3.312864	0.0011
PE	-0.032862	0.124225	-0.264537	0.7916
LOG(UM)	3.896501	3.030128	1.285920	0.1999
Root MSE	4.995197	R-squared		0.086342
Mean dependent var	58.12452	Adjusted R-squared		0.073036
S.D. dependent var	5.238384	S.E. of regression		5.043461
Akaike info criterion	6.092926	Sum squared resid		5239.919
Schwarz criterion	6.156681	Log likelihood		-635.7572
Hannan-Quinn criter.	6.118700	F-statistic		6.489103
Durbin-Watson stat	0.494790	Prob(F-statistic)		0.000324

Hasil Regresi Panel dengan *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-147.3506	67.18997	-2.193045	0.0296
RLSP	-1.119852	1.677671	-0.667504	0.5053
PE	0.056198	0.084037	0.668732	0.5046
LOG(UM)	14.75503	5.396793	2.734036	0.0069
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	2.646136	R-squared	0.743609	
Mean dependent var	58.12452	Adjusted R-squared	0.688455	
S.D. dependent var	5.238384	S.E. of regression	2.923867	
Akaike info criterion	5.145983	Sum squared resid	1470.428	
Schwarz criterion	5.751650	Log likelihood	-502.3282	
Hannan-Quinn criter.	5.390832	F-statistic	13.48245	
Durbin-Watson stat	1.821463	Prob(F-statistic)	0.000000	

Hasil Regresi Panel dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-75.98418	39.78903	-1.909677	0.0576
RLSP	0.686639	0.602361	1.139912	0.2556
PE	0.010775	0.075979	0.141816	0.8874
LOG(UM)	8.900636	2.929134	3.038658	0.0027
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			4.286357	0.6825
Idiosyncratic random			2.923867	0.3175
Weighted Statistics				
Root MSE	2.892307	R-squared		0.108456
Mean dependent var	15.59316	Adjusted R-squared		0.095472
S.D. dependent var	3.070502	S.E. of regression		2.920252
Sum squared resid	1756.742	F-statistic		8.353277
Durbin-Watson stat	1.496909	Prob(F-statistic)		0.000029
Unweighted Statistics				
R-squared	0.073595	Mean dependent var		58.12452
Sum squared resid	5313.026	Durbin-Watson stat		0.494950

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.968468	(34,172)	0.0000
Cross-section Chi-square	266.858094	34	0.0000

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.490976	3	0.4769

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

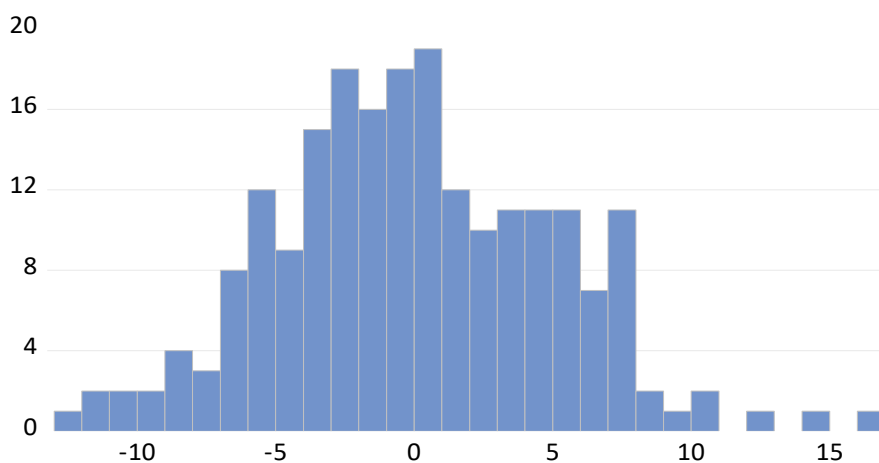
Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	223.2876 (0.0000)	0.079835 (0.7775)	223.3675 (0.0000)

Hasil Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals
Sample 2018 2023
Observations 210

Mean 7.19e-14
Median -0.211333
Maximum 16.70958
Minimum -12.81829
Std. Dev. 5.041942
Skewness 0.204043
Kurtosis 3.075062

Jarque-Bera 1.506478
Probability 0.470839

Hasil Uji Multikolinearitas

	RLSP	PE	LOG(UM)
RLSP	1.000000	0.054263	0.400586
PE	0.054263	1.000000	-0.122598
LOG(UM)	0.400586	-0.122598	1.000000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Fuji Rondlotul Haniah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 30 April 2003
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Prampelan RT.02/RW.03, Kec. Sayung,
Kab. Demak, Jawa Tengah
No. Telepon : 089630837423
Email : fujihaniah@gmail.com



B. Pendidikan

1. SDN Prampelan 1
2. SMPN 1 Karangtengah
3. SMAN 3 Demak

C. Pengalaman Magang

1. Magang di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang (13 Desember – 12 Januari 2024)
2. Magang di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (9 September – 6 Desember 2024)